

20 LAPORAN 24 KINERJA

BALAI MONITOR SFR KELAS I - MAKASSAR

20 LAPORAN 24 KINERJA

BALAI MONITOR SFR KELAS I - MAKASSAR





RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara spesifik tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) meliputi urusan tata usaha dan kerumahtanggaan termasuk penyusunan rencana dan program, kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, pengukuran stasiun radio, pemantauan atau monitoring dan penertiban frekuensi radio, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, verifikasi dan validasi data pengguna frekuensi radio,



evaluasi dan pengujian ilmiah, pelayanan pengaduan masyarakat, serta penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang menyajikan capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar selama tahun 2024 dengan tujuan untuk menganalisis antara capaian dan target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini penting untuk akuntabilitas, evaluasi, dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 adalah realisasi program kerja yang berhasil dilaksanakan selama tahun anggaran 2024 yang tercermin dalam laporan akuntabilitas keuangan dan laporan capaian kinerja tahun anggaran 2024.

Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 99,61% dengan pagu anggaran Sebesar Rp 22.750.427.000,-. Hal ini menunjukkan indikator keseluruhan program kerja berhasil terlaksana dengan baik. Penilaian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024.



KINERJA 1

MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1

Persentase (%) Monitoring
Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio di Kab/Kota

TARGET 100% | CAPAIAN : 100%

2

Persentase (%) Pemeriksaan
Stasiun Radio

TARGET 100% | CAPAIAN : 100%

3

Persentase (%) Penanganan
Gangguan Spektrum Frekuensi
Radio

TARGET 100% | CAPAIAN : 100%

4

Persentase (%) Penertiban
Spektrum Frekuensi Radio dan
Alat/Perangkat Telekomunikasi

TARGET 93% | CAPAIAN : 107,52%

5

Persentase (%) Berfungsinya
perangkat pendukung SMFR dan
alat monitoring/ukur di UPT

TARGET 95% | CAPAIAN : 105,26%

6

Persentase (%) Peserta Ujian
Negara Amatir Radio berbasis
CAT

TARGET 100% | CAPAIAN : 254%

7

Persentase (%) Penanganan
Piutang dan Koordinasi
Pelimpahan ke KPKNL

TARGET 100% | CAPAIAN : 100%

8

Persentase (%) Sosialisasi
Pelayanan Publik dan Survei
Kepuasan Masyarakat

TARGET 100% | CAPAIAN : 100%

9

Persentase (%) Bimbingan Teknis
SRC/LRC

TARGET 100% | CAPAIAN : 298%

10

Persentase (%) ISR Maritim
Nelayan program MOTS-IKRAN

TARGET 100% | CAPAIAN : 242%

11

Persentase (%) Verifikasi Data
Koordinat Site ISR

TARGET 100% | CAPAIAN : 100%



KINERJA 2

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

1

Nilai Kinerja Anggaran UPT
Makassar Tahun 2024

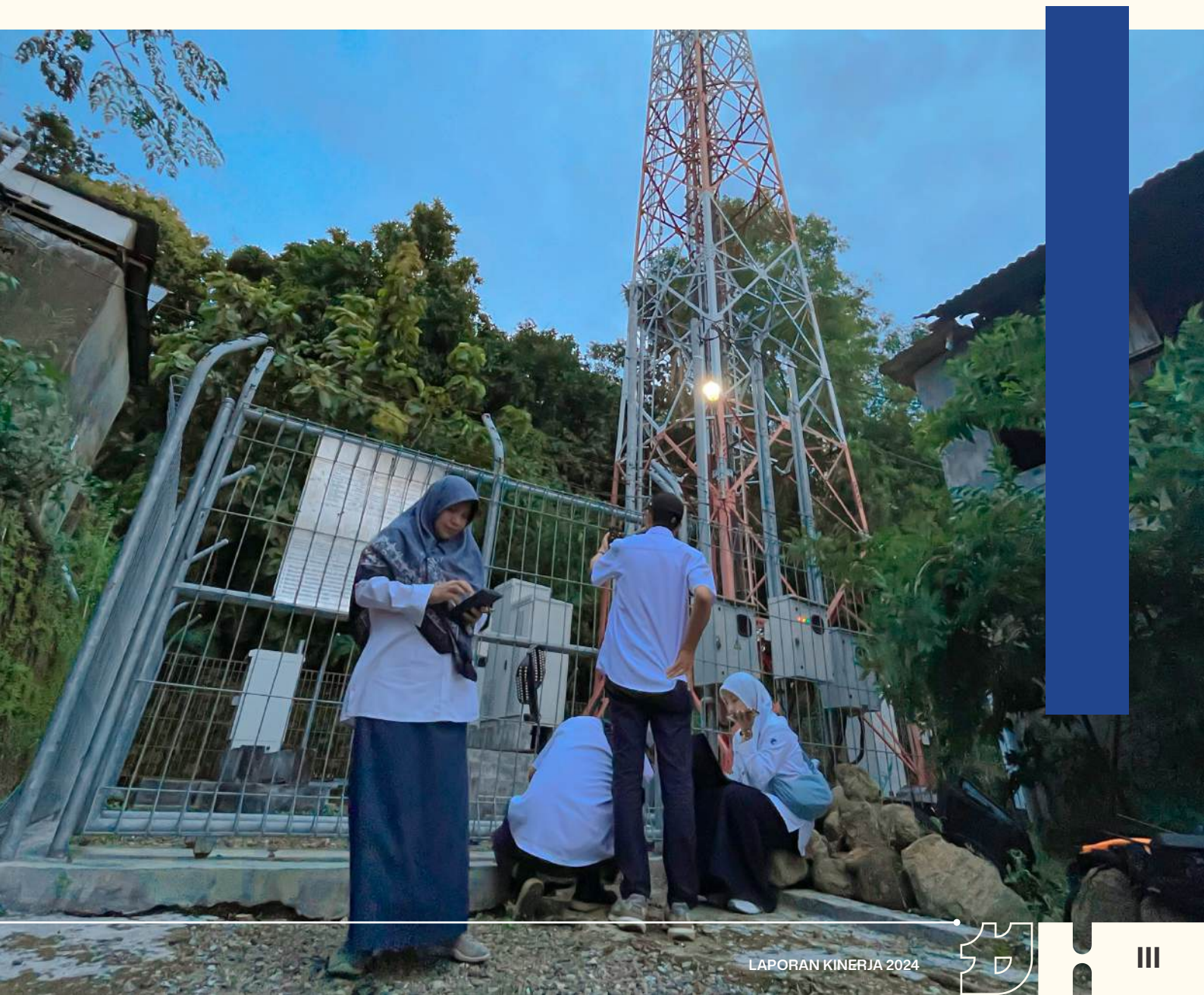
TARGET 89 | CAPAIAN : 91,90

2

Nilai Kualitas Pelaporan
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA)

TARGET 80% | CAPAIAN : 100%

Berikut penjelasan singkat mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar untuk tahun anggaran 2024.





Pada Sasaran Kinerja 1 “Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi” terdapat 11 indikator kinerja. Berikut penjelasan singkat mengenai pencapaian masing-masing indikator kinerja

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, Ditjen SDPPI menargetkan 100% monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan kegiatan pemantauan frekuensi radio pada 24 kabupaten/kota di wilayah kerja Sulawesi Selatan yang meliputi monitoring pita frekuensi radio di kabupaten/kota, monitoring rutin pita frekuensi marabahaya dengan komponen 100% kabupaten/kota termonitor,

monitoring rutin pita frekuensi marabahaya dengan komponen 100% kabupaten/kota termonitor, 15 pita frekuensi radio dilakukan observasi dan identifikasi, 50% ISR termonitor dan 70% hasil monitor teridentifikasi.

Capaian indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar tahun anggaran 2024 sebesar 100% atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan..

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio. Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 100% pemeriksaan stasiun radio sampling ISR yang diperiksa (inspeksi). Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan pemeriksaan stasiun radio yang terdiri dari pemeriksaan microwave link melalui remote site (akses NOC dan/atau NMS), inspeksi open shelter serta pengukuran stasiun siaran melalui pengukuran parameter teknis dan karakteristik radio FM serta pengukuran parameter teknis dan karakteristik TV Digital.

Capaian indikator Pemeriksaan Stasiun Radio yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar tahun anggaran 2024 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2024, Ditjen SDPPI menargetkan 100% jumlah aduan gangguan yang tertangani.

Capaian Balai Monitor SFR Kelas I Makassar pada akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100%. Sepanjang tahun 2024 sebanyak 11 aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang masuk pada aplikasi trouble ticket telah terselesaikan.

Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi. pada tahun 2024, Ditjen SDPPI menargetkan 93% jumlah penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan penertiban SFR dengan indikator jumlah illegal menjadi off air serta capaian penertiban perangkat.

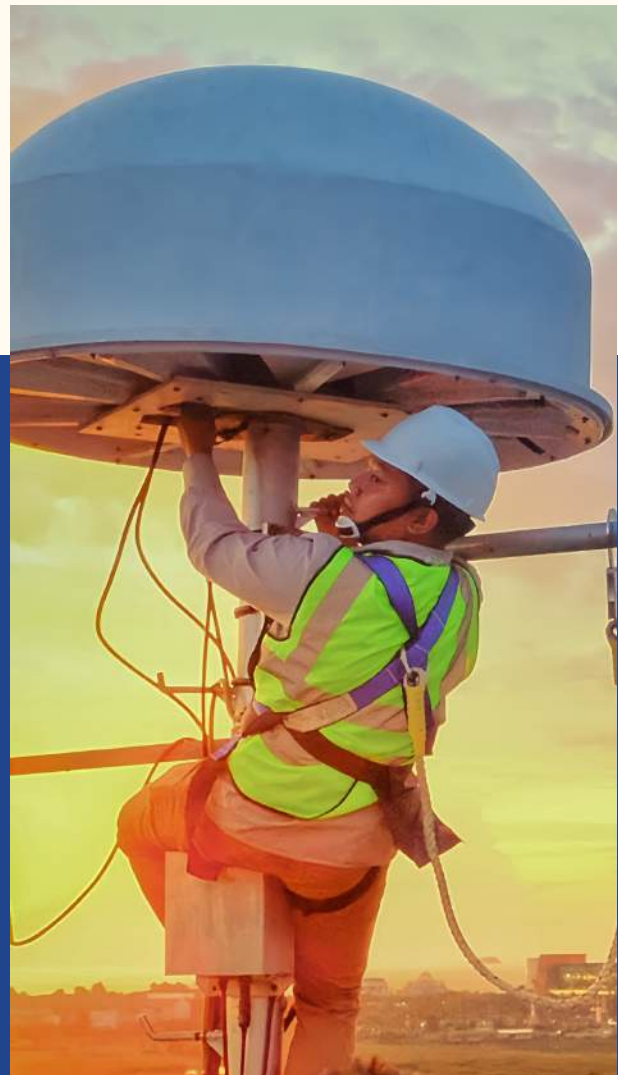
Capaian indikator Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar tahun anggaran 2024 sebesar 100% atau sebesar 107,52% dari target yang telah ditetapkan oleh Ditjen Infrastruktur Digital.

Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT. Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 95% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT untuk tahun

anggaran 2024. Pada akhir tahun anggaran 2024 realisasi untuk indikator ini sebesar 105,26% dari target yang telah ditetapkan.

Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT. Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 100% peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT untuk tahun anggaran 2024.

Pada akhir tahun anggaran 2024 realisasi untuk indikator ini sebesar 254% dari target yang telah ditetapkan.





Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL.

Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 100% Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL untuk tahun anggaran 2024. Pada akhir tahun anggaran 2024 realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 100% Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat untuk tahun anggaran 2024. Pada akhir tahun anggaran 2024 realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC.

Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 100% Bimbingan Teknis SRC/LRC untuk tahun anggaran 2024. Pada akhir tahun anggaran 2024 realisasi untuk indikator ini sebesar 298% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 298%.

Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN.

Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 100% ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN untuk tahun anggaran 2024. Pada akhir tahun anggaran 2024 realisasi untuk indikator ini sebesar 242% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 242%.



Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR. Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 100% Verifikasi Data Koordinat Site ISR untuk tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2024 realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Pada Sasaran Kinerja 2 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien” terdapat 2 indikator kinerja. Berikut penjelasan pencapaian indikator kinerja tersebut.

Nilai Kinerja Anggaran UPT Makassar Tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran UPT untuk Tahun 2024 didasarkan pada hasil capaian 2 komponen utama, yaitu capaian Nilai IKPA dan capaian Nilai SMART dengan komposisi masing-masing 50%.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 90,91 pada akhir tahun anggaran 2024 atau sebesar 103,25% dari target yang telah ditetapkan oleh Ditjen Infrastruktur Digital yaitu sebesar 89.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Pada tahun 2024, Ditjen Infrastruktur Digital menargetkan 80% untuk indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor SFR Kelas I Makassar pada Tahun 2024 sebesar 100%, melebihi target yang telah ditentukan oleh Ditjen Infrastruktur Digital.





“

**Assalamu’alaikum wa
Rahmatullahi wa Barokaatuh**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat diselesaikan dan dipaparkan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran di tahun 2024 kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

LAKIN ini merupakan media pelaporan kinerja instansi yang diukur dari pencapaian target kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan dengan melihat hasil pelaksanaannya selama tahun 2024 yang berkaitan dengan aspek keuangan, kepegawaian, peningkatan SDM, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan perangkat monitoring sistem, penegakan hukum dan pelayanan publik serta ketatausahaan yang implementasinya dirinci pada Program Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengukur kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2024 dengan membandingkan antara tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selaku Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ditjen Infrastruktur Digital dengan target kinerja hasil pelaksanaan selama tahun 2024, dan juga sebagai bahan evaluasi kinerja untuk tahun anggaran berikutnya

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024. Kami menyadari bahwa hasil yang diinformasikan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun guna mewujudkan laporan yang lebih baik di tahun yang akan datang.



Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang terlibat maupun yang mendukung penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini, semoga Allah SWT menilainya sebagai amal ibadah, Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Wa
Rahmatullahi Wa Barokaatuh..** ”

Plt. Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

ABDUL MADJID HASANUDDIN







DAFTAR ISI

01	RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI	I VIII XI
02	BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Potensi & Permasalahan Strategis Sistematika Pelaporan	3 7 10 11
03	BAB II PERJANJIAN KERJA Rencana Strategis Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15 19 20
04	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran 1 - Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio & Perangkat Telekomunikasi Sasaran 2 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif & Efisien Benchmark Kinerja Lainnya	25 100 129 137
05	BAB 4 PENUTUP LAMPIRAN	145 147



BAB I ————— PENDAHULUAN





- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Potensi dan Permasalahan Strategis
- Sistematika Pelaporan





LATAR BELAKANG



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang monitoring frekuensi radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2020–2024. Salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020–2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah

Nasional (RPJMN) 2020–2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional di bidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap Akhir adalah “terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis”.



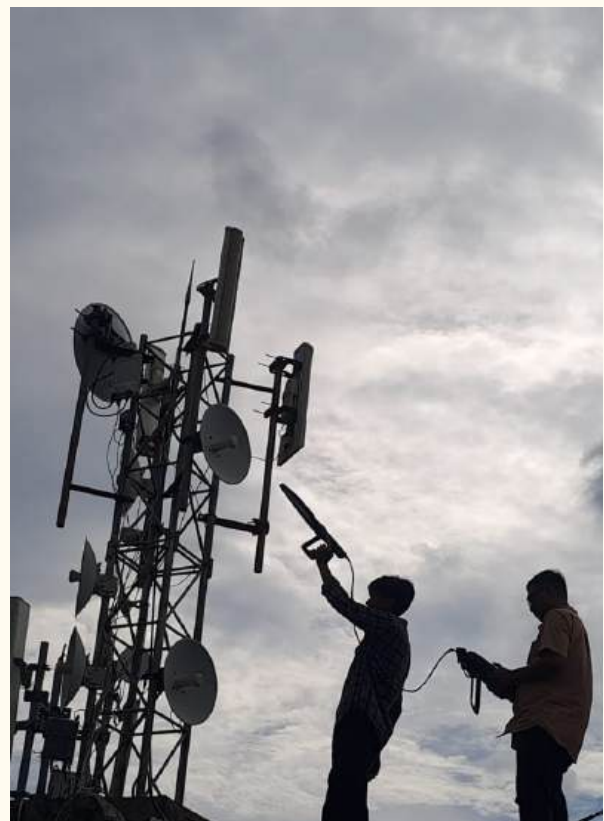
Salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020–2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Ditjen SDPPI dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance*.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal SDPPI, pembinaan administrasi di bawah koordinasi Sekretariat Ditjen SDPPI dan pembinaan teknis operasional di bawah koordinasi Direktorat Pengendalian SDPPI Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Ditjen SDPPI dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai alat untuk mendapatkan masukan dari para stakeholders demi perbaikan kinerja Ditjen SDPPI dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.



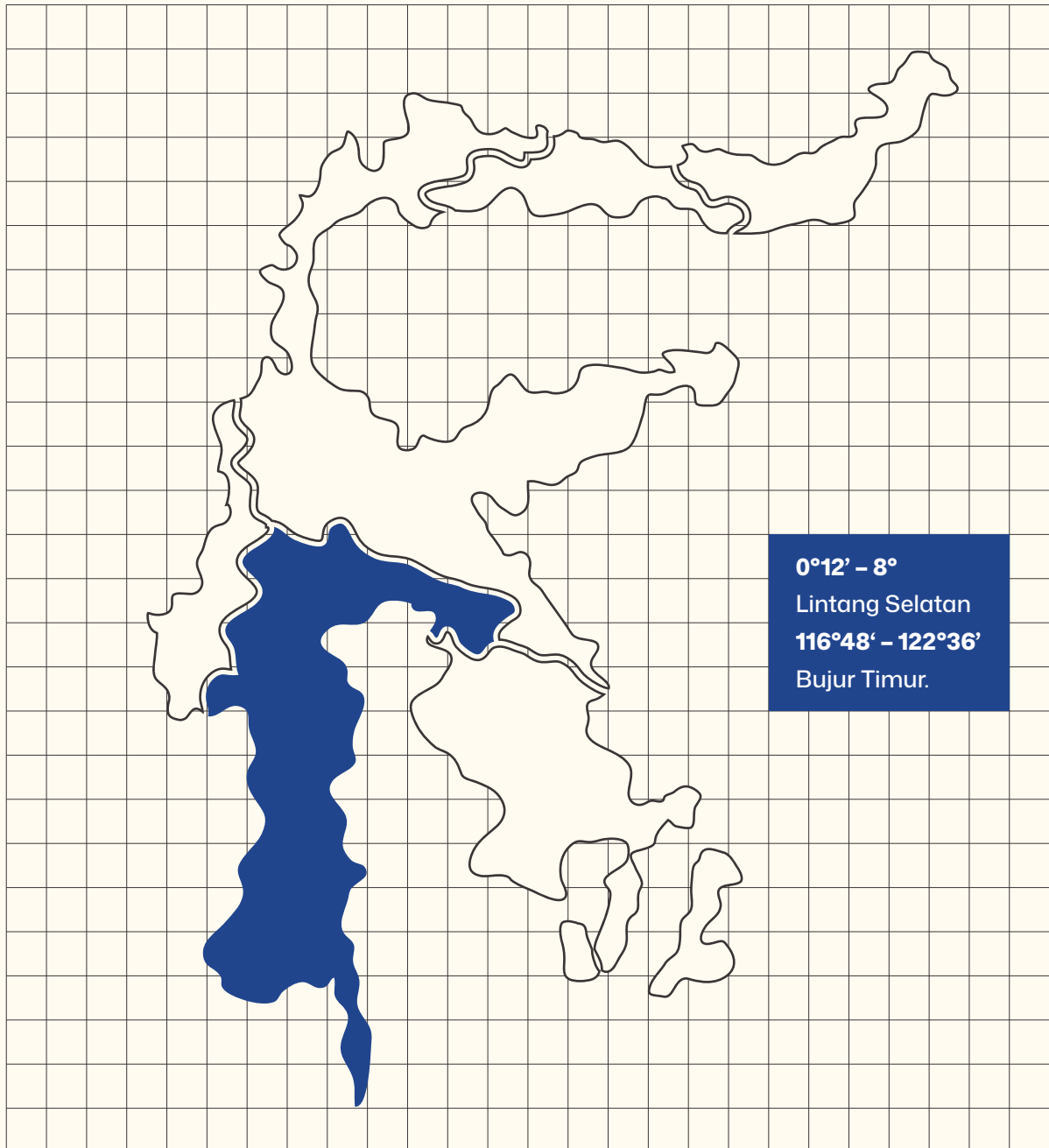
“

Wilayah Sulawesi Selatan didominasi oleh dataran rendah dan dataran tinggi dengan beberapa gunung, seperti Gunung Bawakaraeng, Gunung Lompobattang, dan Rante Mario.





PROVINSI SULAWESI SELATAN



Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar.

46.717,48 km²

- 24 KABUPATEN / KOTA
- 311 KECAMATAN
- 2.255 DESA / KELURAHAN





Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.



FUNGSI

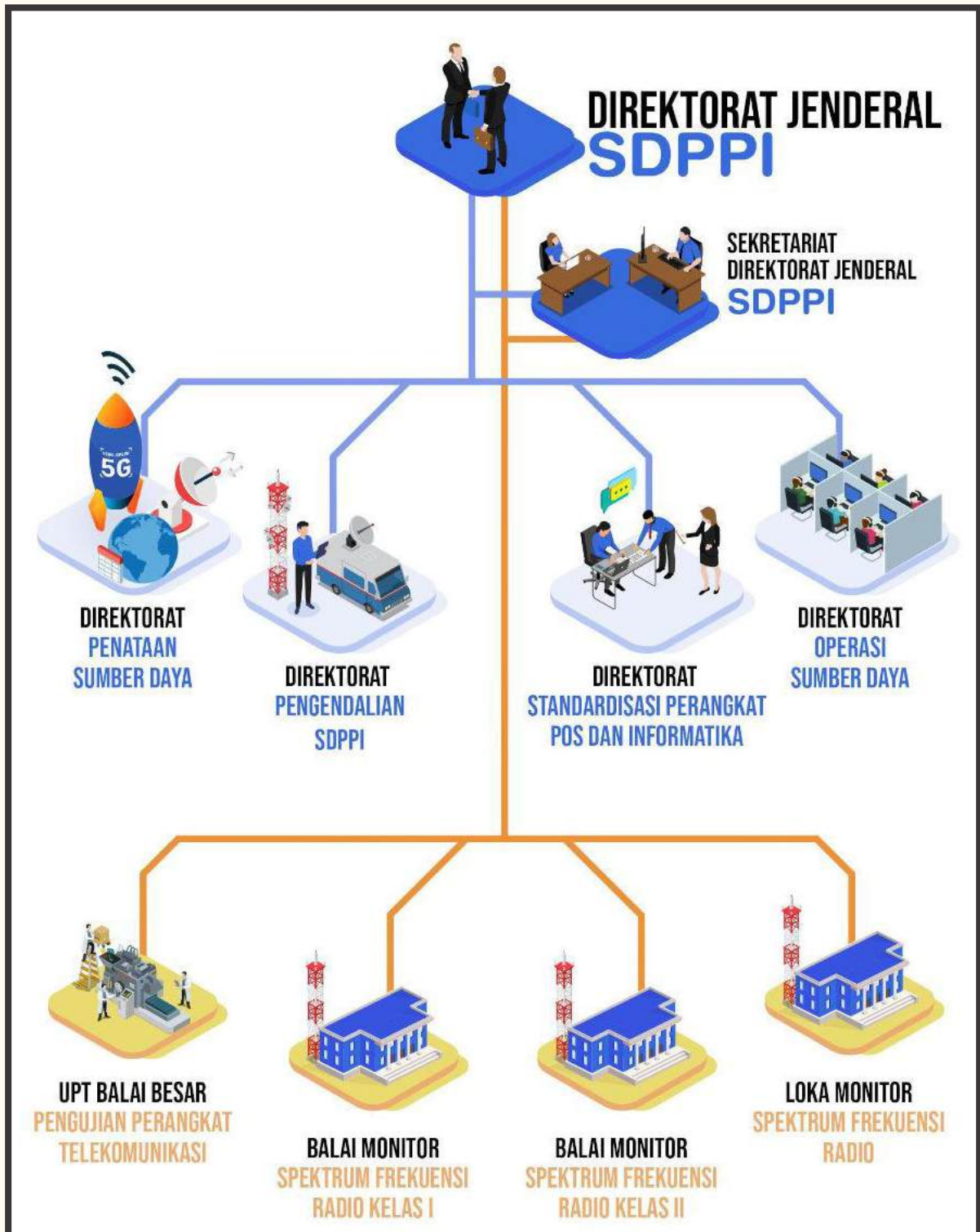
1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitoring frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio;
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.



STRUKTUR ORGANISASI

SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unit kerja setingkat eselon satu yang menjalankan Sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

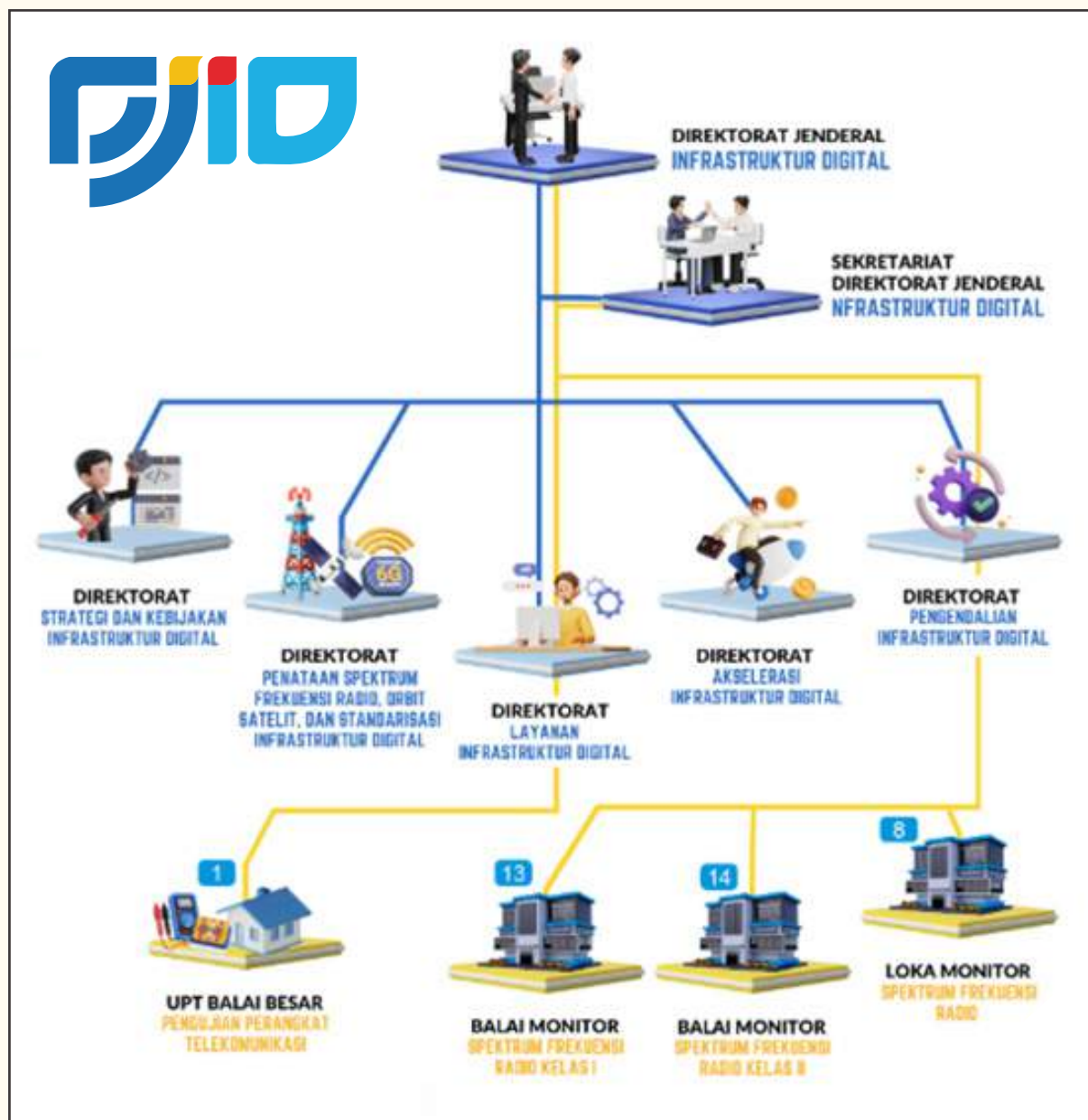


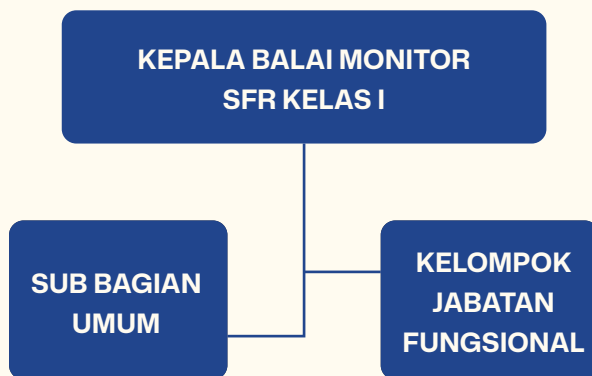


STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL

Tanggal 5 November 2024 melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Melalui Perpres ini, susunan organisasi juga mengalami perubahan sesuai yang tertuang pada BAB III Pasal 17. Ditjen SDPPI juga mengalami penyesuaian yang semula Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital terdiri atas:





POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan yang memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (wireless broadband). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik. Adanya transformasi digital dan layanan broadband terutama wireless broadband akan menyebabkan terjadinya ledakan kebutuhan bandwidth yang berdampak pada kebutuhan alokasi spektrum frekuensi yang besar, kinerja industri, kebutuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan ekosistem industri secara menyeluruh.

Perkembangan Teknologi dan layanan TIK yang pesat telah berdampak pada perubahan industri TIK secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari adanya transformasi perubahan industri yang mengarah pada digitalisasi industri. Transformasi perubahan industri tersebut didorong oleh adanya inovasi dan kreativitas industri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan penciptaan layanan TIK yang bervariasi sesuai kebutuhan pasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memiliki tugas dan fungsi yang luas. Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perangkat SMFR pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar perlu ditingkatkan atau di-upgrade yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
2. Penguatan dalam hal perencanaan anggaran dan kegiatan yang perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan program kerja dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (capacity building) di bidang teknis dan administrasi perlu ditingkatkan.
4. Belum optimalnya informasi mengenai proses perizinan spektrum frekuensi radio kepada masyarakat.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga perlu ditingkatkan serta diperbaharui sesuai dengan kemajuan teknologi.
6. Gangguan interferensi frekuensi radio yang masih sering terjadi.



SISTEMATIKA PELAPORAN





PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1

Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

2

Perencanaan Kinerja yang berisi penjelasan ringkas mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2024.

3

Akuntabilitas Kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

4

Penutup yang berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.





BAB 3 PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Sasaran Kegiatan
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024



RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya visi dan misi Ditjen SDPPI tahun 2020–2024, yaitu

Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband..

Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerja sama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.

Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.

Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi di bidang wireless broadband.

Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.

Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.

Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.

Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.

Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.



Untuk mewujudkan misi tersebut, ada sejumlah sasaran program yang diemban oleh Ditjen SDPPI, antara lain:

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBPD Ditjen SDPPI.

Optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengembangan ekosistem industri perangkat TIK.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.



Untuk mencapai sasaran program di atas, Ditjen SDPPI melakukan rencana kegiatan yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan oleh Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio.

Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal maka dibutuhkan adanya layanan perizinan di bidang layanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat, dan benar secara profesional dan berintegritas. Hal ini akan meningkatkan kontribusi sektor bisnis sebagai aktor utama. UPT Balai Monitor sebagai garda terdepan dalam pelayanan spektrum frekuensi radio memberikan layanan konsultasi pendampingan dan bimtek e-licensing, penyampaian invoice, menjaga operasional perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk mendukung kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio di UPT, menjamin Operasional Aplikasi e-licensing SIMS untuk mendukung smart service, layanan pengaduan penyelesaian gangguan frekuensi radio dan penanganan pelanggaran standar perangkat telekomunikasi.

2. Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat TIK.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan publik bidang frekuensi dan perangkat TIK dibutuhkan peningkatan penyelenggaraan layanan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini diperoleh dari adanya layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan layanan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi serta penyelesaian penanganan piutang BHP frekuensi radio yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, diperlukan juga peningkatan layanan monitoring.

UPT sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen SDPPI melakukan upaya pencegahan timbulnya piutang dengan selalu memantau penyelesaian tagihan oleh wajib bayar serta melakukan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio yang dilakukan oleh KPKNL. Selain itu, UPT juga melakukan peningkatan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.





3. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum.

Pengelolaan keuangan, BMN dan Umum merupakan kegiatan untuk dukungan manajemen dan teknis yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan teknis administratif yang sesuai dengan reformasi birokrasi. Layanan publik yang cepat, akurat dan benar akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis telekomunikasi serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menetapkan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pengukuran, pemeriksaan (validasi) dan penertiban penggunaan frekuensi radio.

Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan TIK.

Peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Peningkatan kualitas pembinaan dan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio ilegal.

Menjaga berfungsinya perangkat pendukung layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penanganan gangguan.

Peningkatan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemanfaatan teknologi informasi/media sosial dalam diseminasi informasi.

Melakukan branding dengan cara melakukan kunjungan ke para pengguna frekuensi radio.

Melakukan survei kepuasan publik serta bimtek e-licensing terkait pelayanan perizinan. Senantiasa melakukan analisa dan evaluasi untuk peningkatan tata kerja dan kualitas pelaksanaan tugas.



SASARAN KEGIATAN

Perjanjian Kinerja merupakan sasaran kegiatan disusun untuk menciptakan tolok ukur penilaian atas kinerja UPT sehingga dapat dilakukan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai dua sasaran kegiatan utama yang telah ditetapkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi
 - Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota dengan target 100%.
 - Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dengan target 100%.
 - Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dengan target 100%.
 - Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan target 93%.
 - Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT dengan target 95%.
 - Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT dengan target 100%.
 - Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL dengan target 100%.
 - Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dengan target 100%.
 - Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC dengan target 100%.
 - Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN dengan target 100%.
 - Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR dengan target 100%.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT Makassar Tahun 2024 dengan target 89.
 - Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan target 80%.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

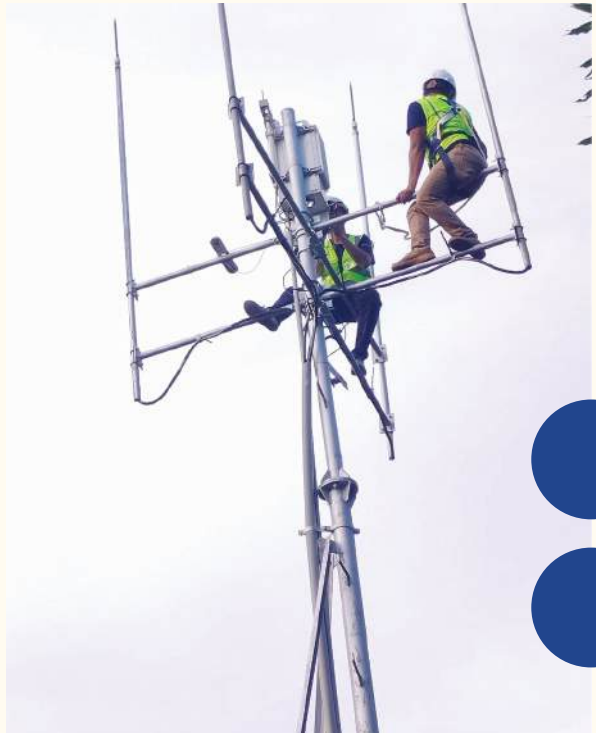
Perjanjian Kinerja merupakan yang berisi sasaran kegiatan utama resmi dari pimpinan instansi yang memuat indikator kinerja yang terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas,

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%
2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%
4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%
5. Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	95%
6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%
7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%
8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat	100%
9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%
10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%
11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1. Nilai Kinerja Anggaran UPT Makassar Tahun 2024	89
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80



TOTAL PENGELOLAAN ANGGARAN 2024

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 22.750.427.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



- Sasaran 1 Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi
- Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Benchmark
- Kinerja Lainnya



Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Latar Belakang : Spektrum frekuensi radio adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk berbagai keperluan komunikasi dan penyiaran, seperti radio, televisi, dan telepon seluler. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang terbatas dan sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai layanan komunikasi, termasuk telekomunikasi, radio, televisi, penerbangan, maritim, pertahanan, komunikasi kepolisian, marabahaya, dan lain sebagainya.

Padatnya pengguna ISR pada Wilayah Kota Makassar menunjukkan bahwa spektrum frekuensi radio sangat dibutuhkan dalam penggunaan sehari-hari. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam strategis yang terbatas, oleh karena itu penggunaannya diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio maka dipandang perlu dilakukan kegiatan monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi).

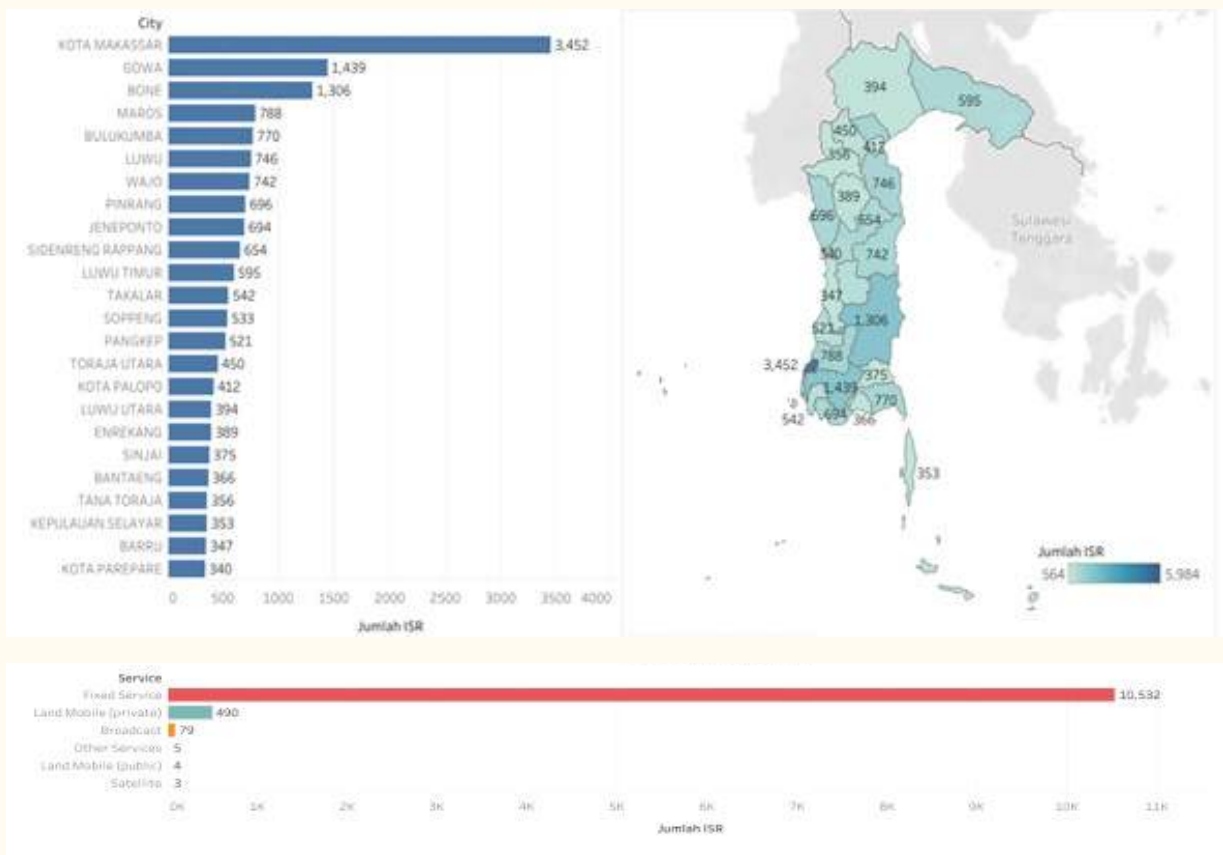
Monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi) merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk memantau penggunaan spektrum

frekuensi pada pita subservice tertentu di wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan sarana perangkat monitor stasiun slave melalui pengamatan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam dan menggunakan perangkat portable selama 2 (dua) jam untuk subservice 1 s.d. 9 dan untuk subservice 10 s.d. 15 waktu pengamatan 30 (tiga puluh) menit untuk stasiun tetap dan 10 (sepuluh) menit untuk stasiun jinjing/ bergerak dengan merekam kanal, level serta waktu pendudukannya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kepadatan pengguna spektrum frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio dapat dipergunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari gangguan yang merugikan.

Wilayah kerja Balai Monitor kelas I Makassar terdiri dari 24 Kabupaten/Kota. Data pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) pada Tahun 2024 yang didapatkan dari data SIMS adalah sebanyak



dengan wilayah terpadat ada di Kota Makassar. Grafis pengguna frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Direktorat Pengendalian DJID melalui [Nota Dinas No. 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024](#) tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024 menyampaikan 15 subservice/pita frekuensi yang harus dimonitor selama tahun 2024 oleh setiap UPT Ditjen Infrastruktur Digital melalui kegiatan Observasi Monitoring (pengamatan okupansi) dan pengukuran parameter teknis di Kabupaten/Kota dan 5 pita frekuensi marabahaya yang harus dimonitor setiap hari. Adapun subservice/pita frekuensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS00, Marabahaya *INS36	300 - 430
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 - 880
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400

No	Service	Pita Frekuensi (MHz)	Stepwidth			Durasi
			R&S	TCI	LS Telcom	
1	Radionavigasi Penerbangan	108 - 117.975	6.25 kHz	6.25 kHz	4.88 kHz	Menyesuaikan Karakteristik Pancaran
2	Bergerak Penerbangan	117.975 - 137	6.25 kHz	6.25 kHz	4.88 kHz	
3	Bergerak Maritim (Panggilan & DSC Marabahaya)	156.4875 - 156.8125	500 Hz	5 kHz	0.31 kHz	
4	Tetap, Bergerak	235 - 267	6.25 kHz	6.25 kHz	4.88 kHz	
5	Satelit-Bergerak (Bumi ke Angkasa)	406 - 406.1	500 Hz	5 kHz	0.31 kHz	

Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melaksanakan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio melalui kegiatan monitoring penggunaan SFR, mengidentifikasi serta melakukan pemantauan penggunaan SFR oleh berbagai layanan telekomunikasi, perangkat nirkabel, dan sistem komunikasi lainnya.



Capaian Kinerja

Indikator kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja untuk monitoring pita frekuensi radio di Kab/Kota tercapai 100%, sebanyak 24 kab/kota di wilayah kerja Sulawesi Selatan telah termonitor.

Adapun komponen target kinerja untuk indikator persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota adalah Monitoring Pita frekuensi Radio di Kabupaten/kota (70%) dan Monitoring Pita Marabahaya (30%).

KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

TARGET

100%

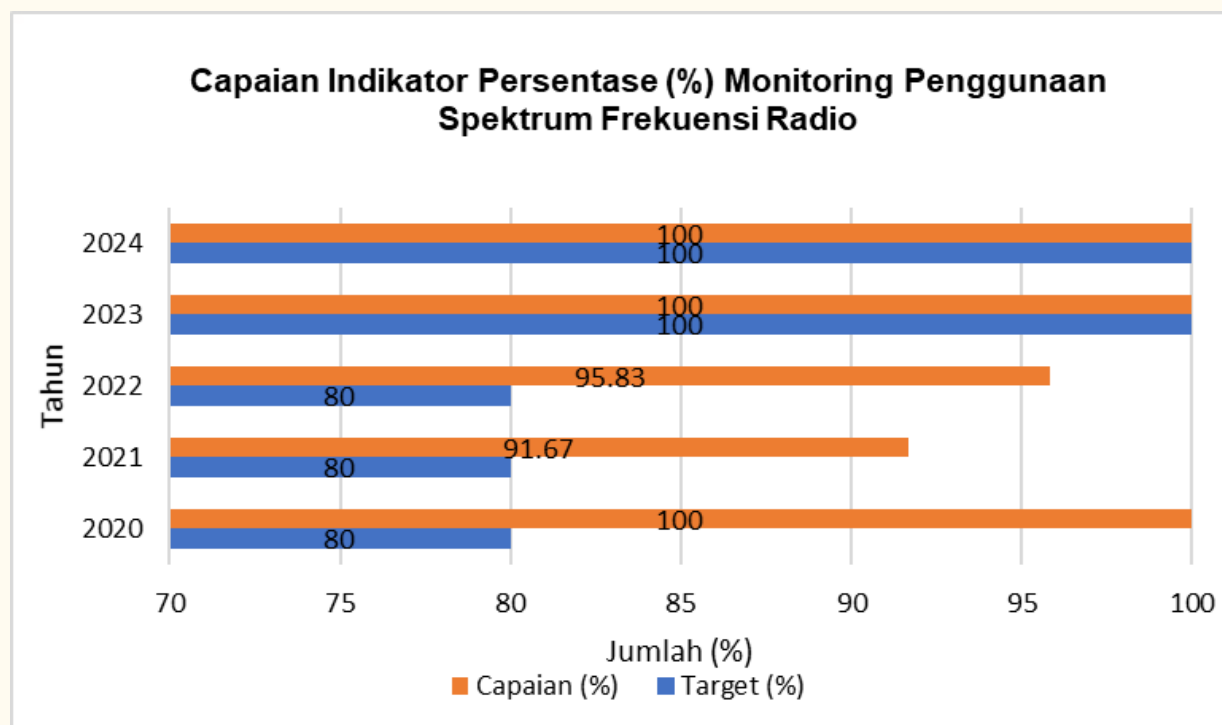
CAPAIAN

100%

PERSENTASE

100%

Capaian Indikator Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio





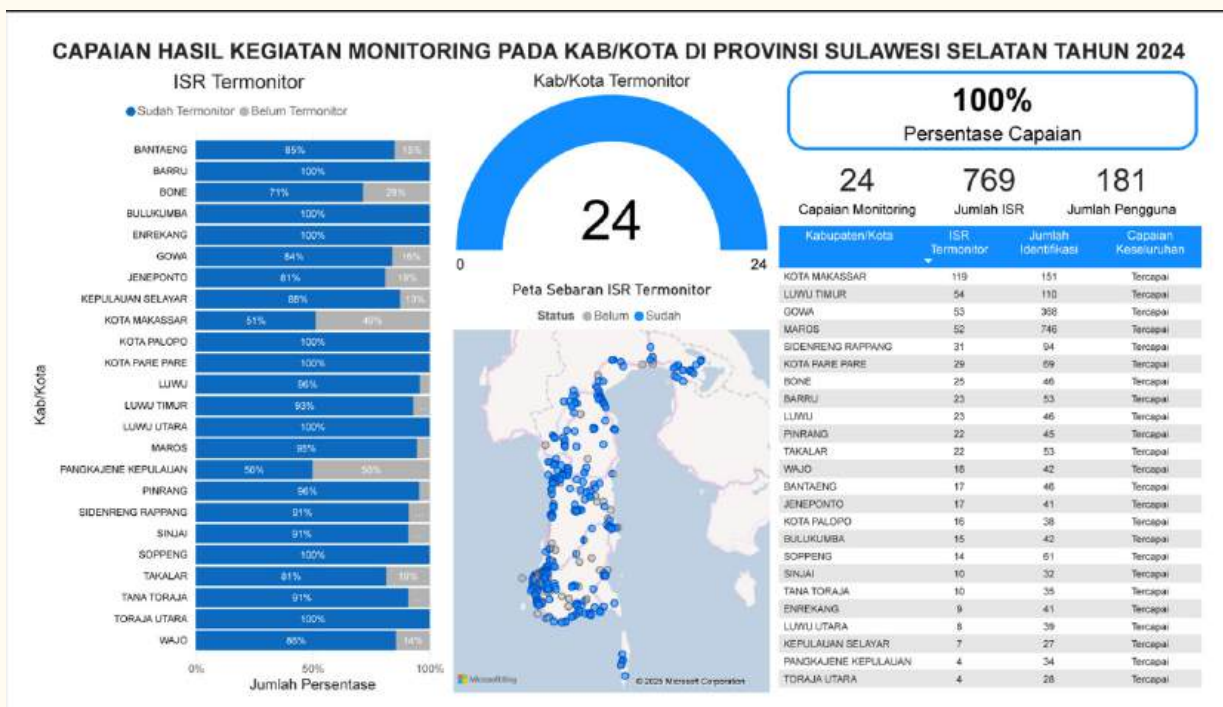
Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/Kota

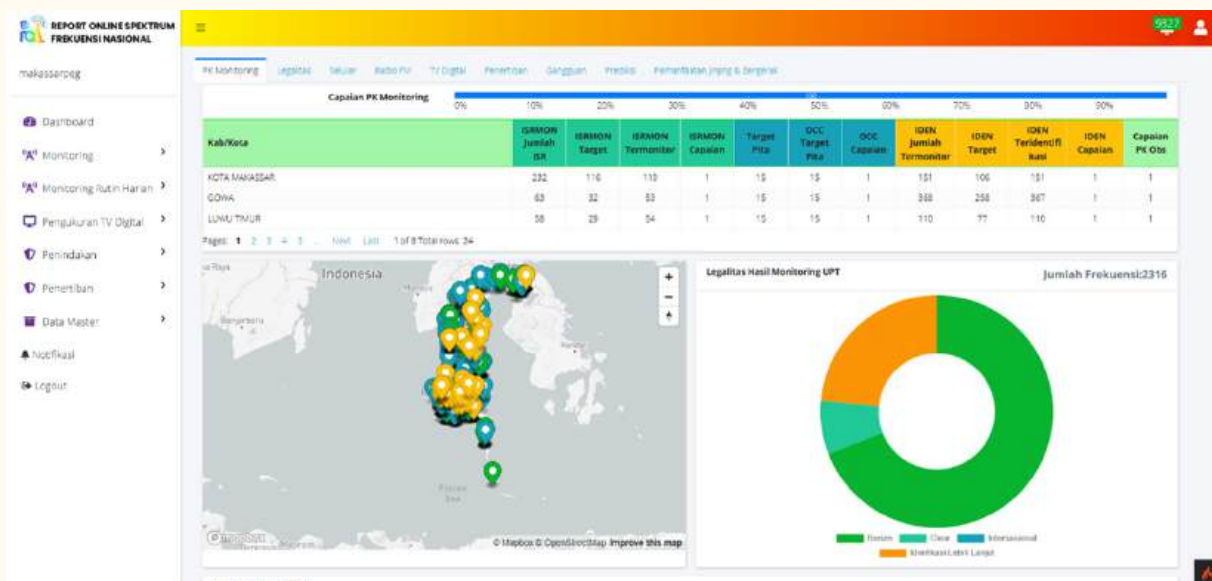
Monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio dengan menggunakan Stasiun Tetap/Transportable dan/atau Stasiun Jinjing/Bergerak. Observasi frekuensi radio dilakukan minimal pada 15 pita frekuensi radio. Target Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota. Detail dan metode pengambilan data terhadap masing-masing pita frekuensi radio dari berbagai macam perangkat SMFR yang digunakan.

Adapun perhitungan capaian monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/Kota mengacu pada parameter perhitungan:

- 15 pita frekuensi radio dilakukan observasi dan identifikasi mengacu kepada data SIMS dan data referensi lainnya;
- Memonitor 50% dari ISR yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Aplikasi Report Online (ROL); dan
- 70% Hasil Monitor SFR harus teridentifikasi.

Monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi) dilakukan di 24 Kabupaten/Kota dengan 15 subservice/pita frekuensi telah termonitor pendudukannya.





Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya

Monitoring rutin pita frekuensi marabahaya dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio menggunakan Stasiun Tetap/Transportable pada setiap hari kerja terhadap 5 (lima) pita frekuensi marabahaya dan dilaporkan melalui Aplikasi Report Online (ROL). Adapun perhitungan capaian monitoring rutin pita frekuensi marabahaya mengacu pada parameter perhitungan:

- 60% dari total hari kerja setiap SMFR Tetap/Transportable di Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan observasi dan identifikasi;
- Total hari kerja dalam setahun yaitu 240 hari kerja;
- Dalam 1 (satu) bulan, setiap SMFR Tetap/Transportable minimal melaporkan hasil monitor pita frekuensi marabahaya sebanyak 14x untuk mencapai total target 60% dalam setahun; dan
- Apabila perangkat SMFR Tetap/Transportable tidak dapat digunakan untuk kegiatan monitoring, maka dapat diinformasikan pada Aplikasi Report Online (ROL).

PK Monitoring Rutin Harian										
Capaian PK Monitoring Rutin Harian										
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%										
B10			B11			B12			Total Capaian Harian	
Ops	%B10	%UPT	Ops	Non Ops	%B11	%UPT	Ops	Non Ops	%B12	%UPT
1	100%		16	0	100%		17	0	100%	
2	100%		19	0	100%		15	0	100%	
3	100%		0	30	100%		0	31	100%	
4	100%		19	0	100%		15	4	100%	
5	100%		14	0	100%		15	7	100%	
6	100%		15	0	100%		15	6	100%	
		100%				100%				100%



ANALISIS & DAMPAK

Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota merupakan suatu kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Kegiatan ini mendukung optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, sehingga penggunaannya menjadi lebih tertib, efisien, dan sesuai peruntukannya. Pengguna frekuensi radio terdorong untuk mematuhi perizinan ISR dan spesifikasi teknis penggunaan. Layanan publik khususnya untuk sektor vital seperti penerbangan, maritim, pertahanan, serta layanan darurat, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang tak kalah penting, data okupansi yang diperoleh menjadi dasar dalam perencanaan penataan spektrum ke depannya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio antara lain:

Peralatan monitoring yang digunakan telah memadai dan mampu untuk melakukan monitoring pada 15 pita frekuensi radio yang di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, selain itu peralatan monitoring yang digunakan juga telah memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup memadai dalam hal pemantauan dan analisis spektrum frekuensi radio.

Strategi sangat penting dalam melaksanakan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio dengan efektif. Adapun strategi yang disusun meliputi: perencanaan kegiatan, pembagian personal, penentuan perangkat monitoring, teknik identifikasi, dan penentuan lokasi monitoring.

Sosialisasi terkait pentingnya tertib dalam menggunakan spektrum frekuensi radio dan penerapan sanksi administratif sesuai PP Nomor 43 Tahun 2023 juga dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di Kab/Kota.



TINDAK LANJUT

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota antara lain:

Telah dilakukan evaluasi terhadap peralatan monitoring yang digunakan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut memenuhi standar dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan frekuensi radio. Peralatan yang tidak memadai telah diganti dengan yang lebih baik.

Pelatihan/diklat teknis personel secara rutin untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam melakukan kegiatan monitoring frekuensi radio. Hal ini dapat membantu personel memahami peralatan monitoring dengan lebih baik, memperbaiki kemampuan analisis, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan monitoring.

Peningkatan akses dan pemahaman data tentang penggunaan frekuensi radio dapat membantu dalam memperbaiki indikator monitoring frekuensi radio. Data dan informasi yang akurat dan terbaru sangat penting untuk melakukan pemantauan yang efektif.

Perkembangan teknologi yang cepat telah diikuti untuk memperbaiki kegiatan monitoring frekuensi radio. Peralatan monitoring yang lebih baru dan lebih canggih untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan monitoring.

Koordinasi yang lebih baik dengan pengguna frekuensi radio untuk memahami kebutuhan dan penggunaan frekuensi radio dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu dalam menentukan jenis frekuensi radio yang harus dipantau dan cara terbaik untuk melakukan pemantauan.

Sosialisasi terkait pentingnya tertib dalam menggunakan spektrum frekuensi radio dan penerapan sanksi administratif sesuai PP Nomor 43 Tahun 2023 dalam pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di Kab/Kota sehingga masyarakat lebih aman dan tertib dalam menggunakan spektrum frekuensi radio.





EFISIENSI

Untuk mencapai efisiensi sisi sumber daya manusia dan efisiensi waktu pelaksanaan dalam kegiatan monitoring frekuensi radio, dapat dilakukan beberapa cara berikut:

Pegawai yang terlibat dalam kegiatan monitoring frekuensi radio telah diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Pelatihan juga dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas.

Sistem pemantauan jarak jauh (remote system) pada peralatan stasiun monitor transportable dan/atau slave station dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio untuk melakukan okupansi pada 15 pita frekuensi radio maupun 5 pita frekuensi marabahaya merupakan cara yang lebih efisien dibandingkan pemantauan langsung oleh pengendali frekuensi radio. Pemantauan jarak jauh juga dapat membantu mengidentifikasi sinyal radio yang ilegal atau interferensi dengan cepat dan akurat.

Koordinasi dengan stakeholder terkait seperti regulator, operator dan penyelenggara telekomunikasi dapat membantu memastikan kegiatan monitoring frekuensi radio dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir overlapping dan mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan monitoring.

INDIKATOR KINERJA

MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI KAB/KOTA



BERORIENTASI PELAYANAN

Tim monitoring frekuensi radio berkomitmen memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif



AKUNTABEL

Pegawai Balmon Makassar menerapkan akuntabilitas melalui laporan transparan dan kerja sesuai standar



KOMPETEN

Kompetensi tim monitoring terus ditingkatkan lewat pelatihan dan pengembangan, sehingga monitoring frekuensi radio berjalan efektif dan efisien



HARMONIS

Pegawai Balmon Makassar menjalin hubungan harmonis dengan pengguna frekuensi dan rekan kerja, guna mendukung monitoring yang berkualitas



LOYAL

Pegawai Balmon Makassar loyal pada organisasi, mematuhi etika dan kode etik, sehingga monitoring frekuensi radio berjalan jujur dan adil



ADAPTIF

Pegawai Balmon Makassar adaptif terhadap perubahan lingkungan dan teknologi, sehingga monitoring frekuensi radio berjalan efektif dan efisien



KOLABORATIF

Pegawai Balmon Makassar berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal guna meningkatkan kualitas dan memastikan monitoring frekuensi yang komprehensif





Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Latar Belakang : Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio maka perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi). Pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) pada tahun 2024 terdiri dari kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link, Pengukuran Stasiun Radio Siaran (Radio siaran FM dan TV Digital) dan Monitoring Perangkat. Kegiatan pemeriksaan stasiun radio MW Link terbagi atas kegiatan pemeriksaan microwave link secara remote site dan pemeriksaan secara on site / open shelter.

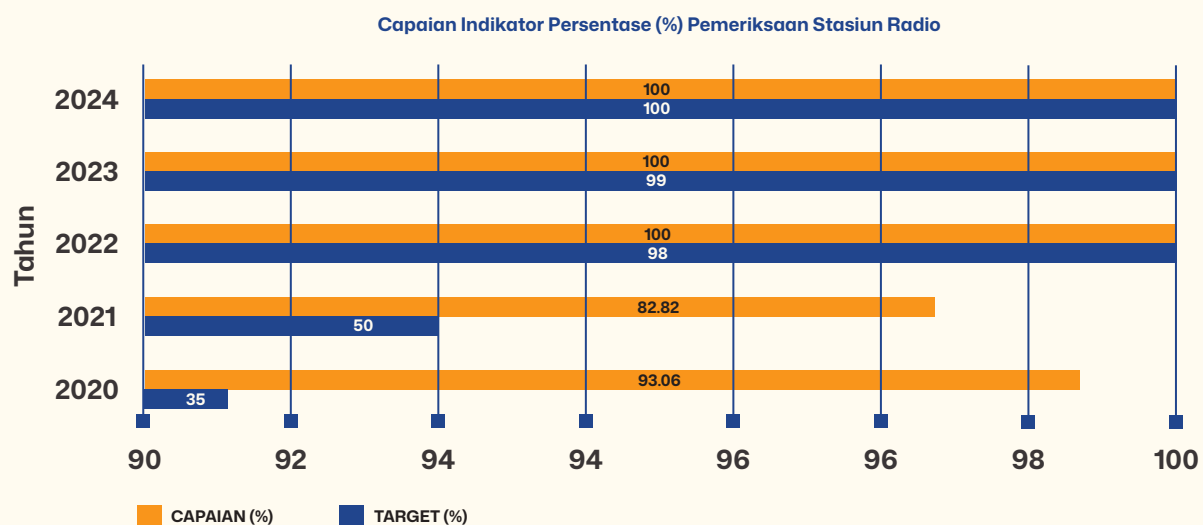
Target pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) yang telah ditentukan oleh Direktorat pengendalian pada tahun 2024 adalah 3.582 ISR target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site dan 922 ISR target data yang dilakukan inspeksi open shelter. Pada layanan siaran, khususnya subservice radio siaran FM dan TV Siaran target pemeriksaan adalah seluruh stasiun telah terukur dengan rincian 68 radio siaran FM dan 8 TV siaran digital. Sedangkan untuk monitoring alat/perangkat telekomunikasi ditetapkan target sebanyak 8 kali pelaksanaan kegiatan dengan minimal 3 jenis perangkat prioritas dimonitor setiap kegiatan kegiatan.

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna frekuensi radio. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengguna frekuensi radio telah mempunyai Izin Stasiun Radio (ISR), telah sesuai dengan ISR baik frekuensi yang digunakan, perangkat yang digunakan maupun parameter teknisnya sehingga tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efektif, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari gangguan yang merugikan.



Capaian Kerja : Mengacu pada Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2024 dan Nota Dinas Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024, bahwa perhitungan persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio terdiri dengan komposisi 80% Pemeriksaan Stasiun Radio (Pemeriksaan Stasiun Radio MW Link dan Pengukuran Parameter Teknis Pemancar Siaran) dan 20% Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi.

Indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.



KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

TARGET

100%

CAPAIAN

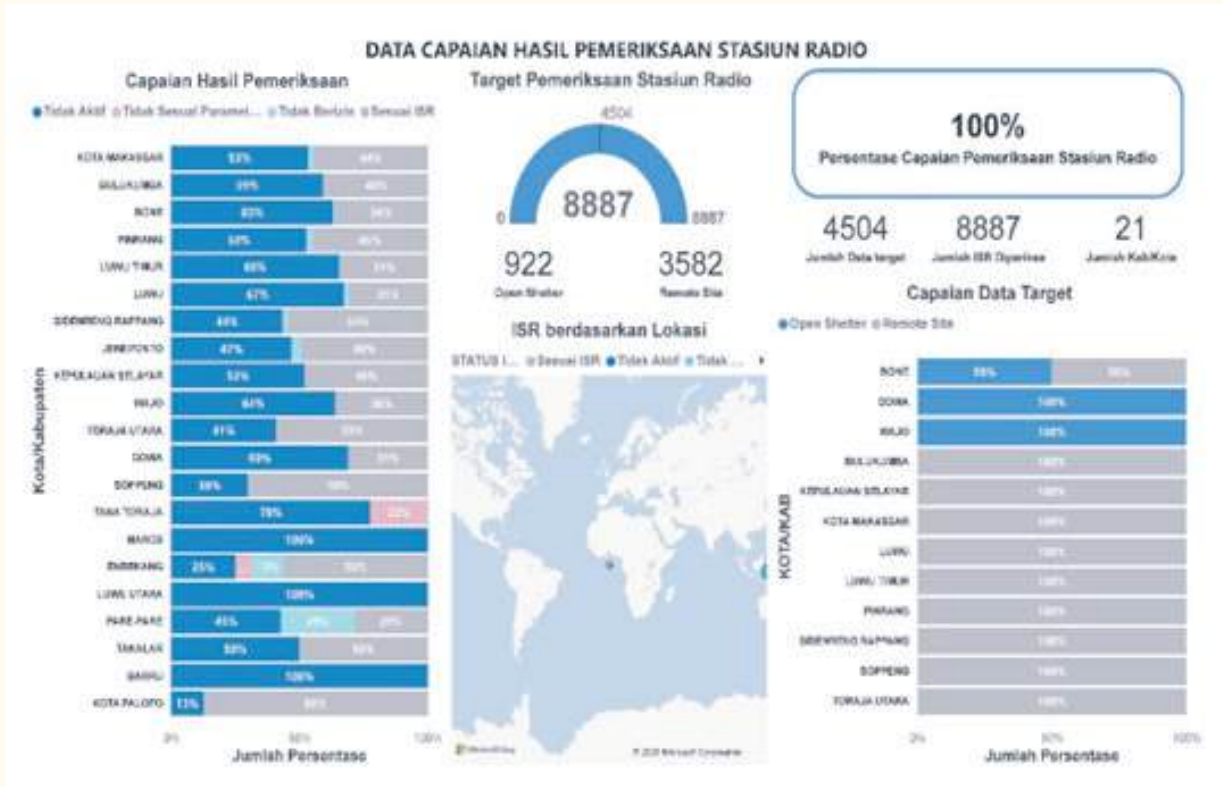
100%

PERSENTASE

100%

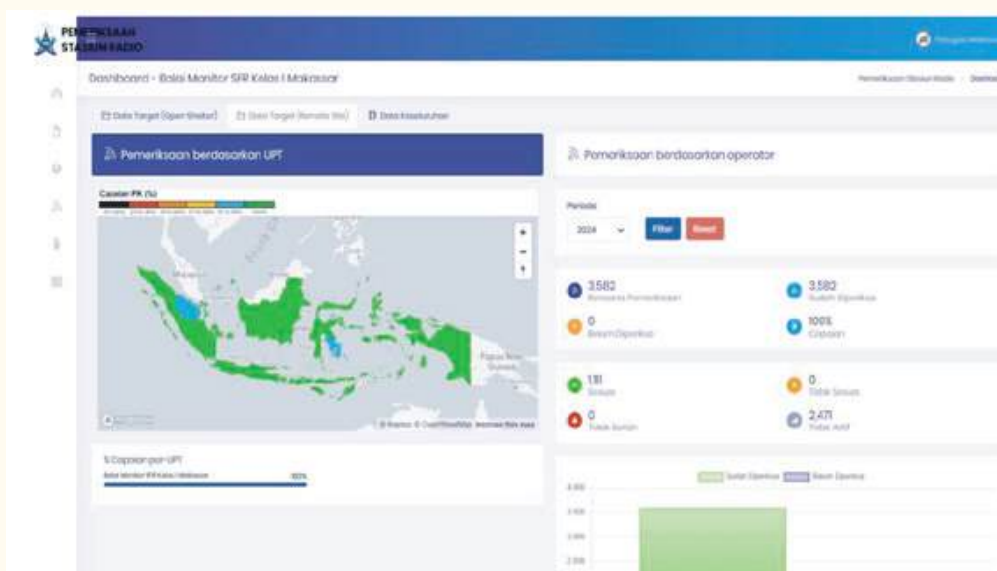


Balai Monitor SFR Kelas I Makassar mampu menyelesaikan seluruh target pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) di tahun 2024, sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Makassar mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan perincian sebagai berikut:



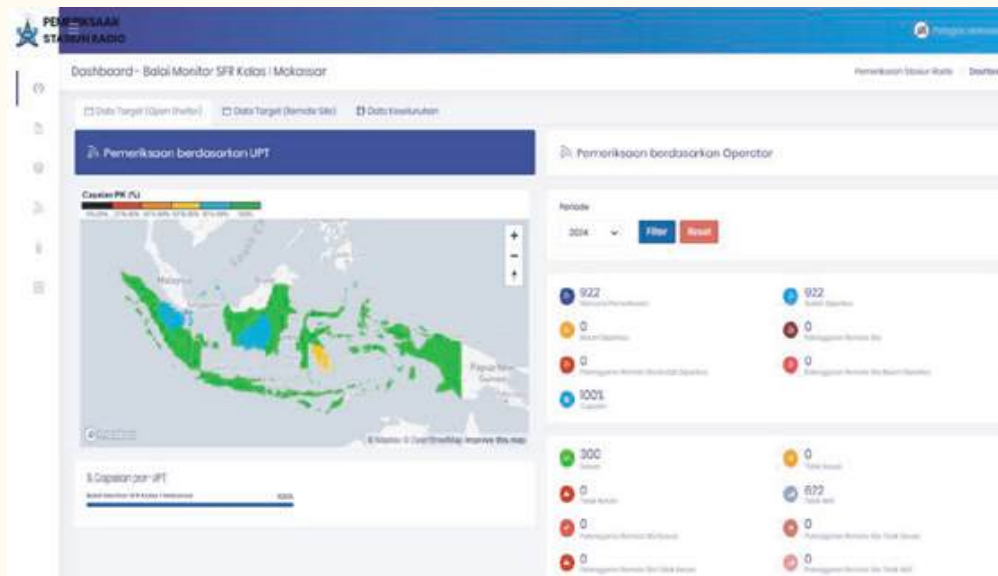
Berikut sasaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) di Balai Monitor SFR Kelas I Makassar selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% (merujuk pada Nota Dinas Direktur Pengendalian DJID Nomor: 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024:

A Melaksanakan pemeriksaan Microwave Link sebanyak 3.582 target data ISR melalui kegiatan remote site.

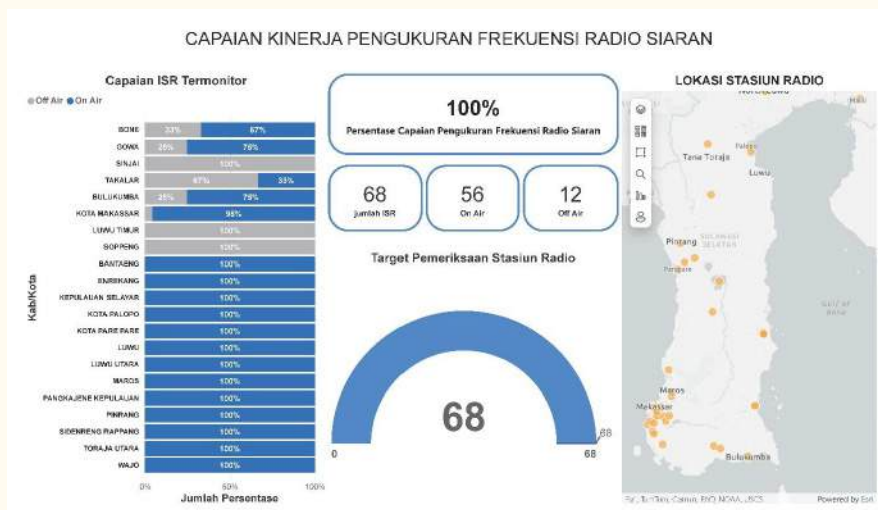
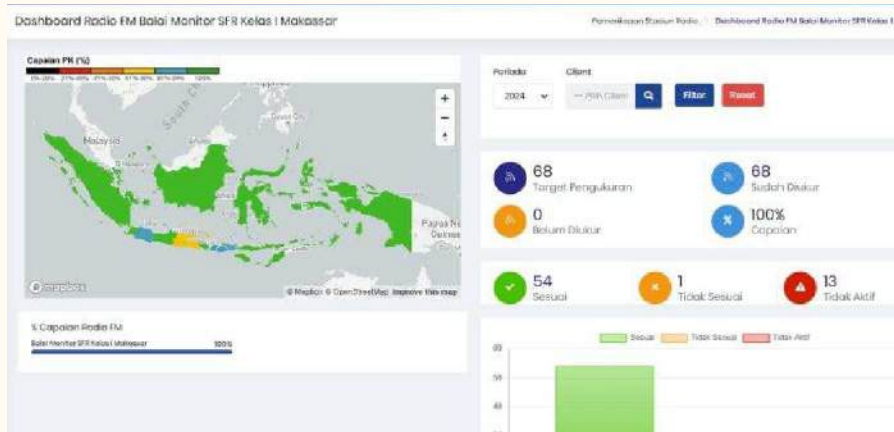


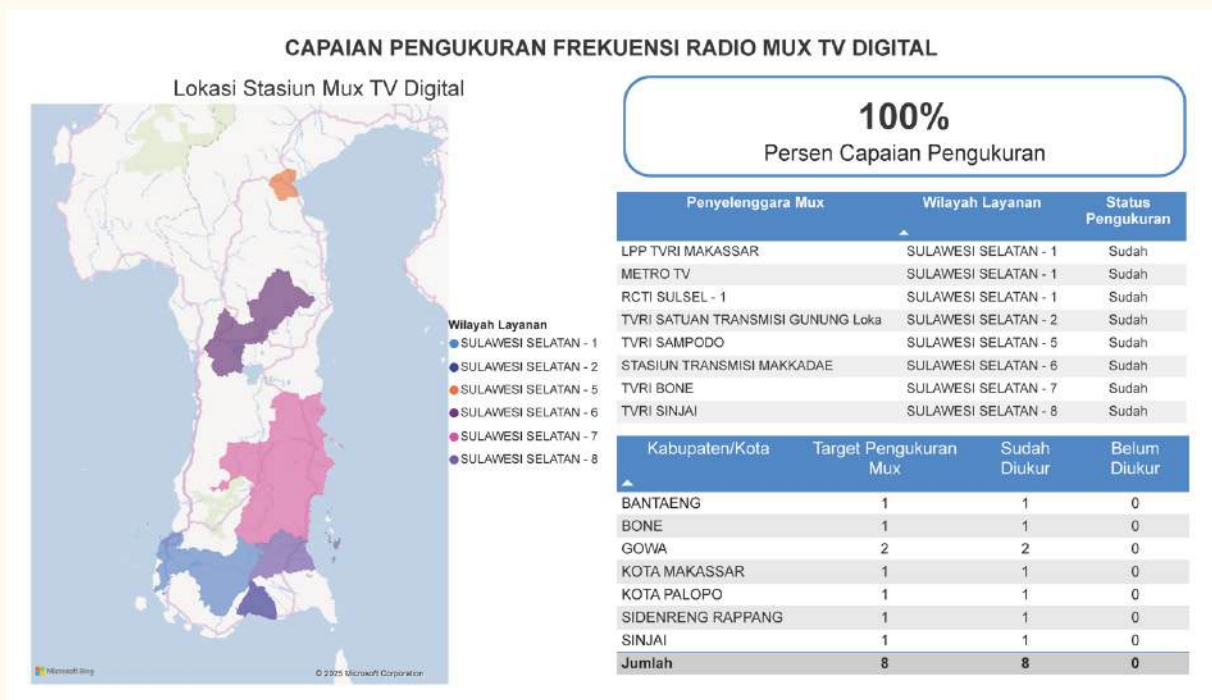


B Melaksanakan pemeriksaan Microwave Link sebanyak 922 target data ISR melalui kegiatan inspeksi open shelter.



C Mengukur parameter teknis subservice radio siaran FM dan TV Siaran Digital sebanyak 76 penyelenggara yang ber-ISR dengan perincian 68 ISR penyelenggara radio siaran FM di Provinsi Sulawesi Selatan dan 8 ISR penyelenggara televisi siaran digital.





Dashboard / Monitoring Digital

Pengukuran TV Digital

2024 Filter

Tambah Pengukuran TV Digital Download Template Pengukuran TV Digital Upload Excel Pengukuran TV Digital

UPT	Latitude	Longitude	No. SPT	Tgl Pelaksanaan	Wilayah Layanan	Nama Penyelenggara Layanan Multi-Pengguna
Balai Monitor Kelas I Makassar	-3.900374	119.077545	94/Balmon-73/KP.01.06/03/2024	2024-03-06	Sulawesi Selatan 2	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Balai Monitor Kelas I Makassar	-5.161536	119.415828	119/Balmon-73/KP.01.06/04/2024	2024-03-28	Sulawesi Selatan 1	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Balai Monitor Kelas I Makassar	-5.242817	119.517439	93/Balmon-73/KP.01.06/03/2024	2024-03-14	Sulawesi Selatan 1	MEDIA TELEVISI INDONESIA PT.
Balai Monitor Kelas I Makassar	-5.275889	119.570833	92/Balmon-73/KP.01.06/03/2024	2024-03-14	Sulawesi Selatan 1	RAJAWALI OTRA TELEVISI INDONESIA PT.
Balai Monitor Kelas I Makassar	-5.415627	119.016874	101/Balmon-73/KP.01.06/03/2024	2024-03-21	Sulawesi Selatan 2	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Balai Monitor Kelas I Makassar	-3.049711	120.225804	209/Balmon-73/KP.01.06/07/2024	2024-01-19	Sulawesi Selatan 5	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Balai Monitor Kelas I Makassar	-4.543788	120.804755	019/Balmon-73/KP.01.06/07/2024	2024-01-24	Sulawesi Selatan 7	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Balai Monitor Kelas I Makassar	-5.121135	120.236897	009/Balmon-73/KP.01.06/07/2024	2024-01-18	Sulawesi Selatan 8	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

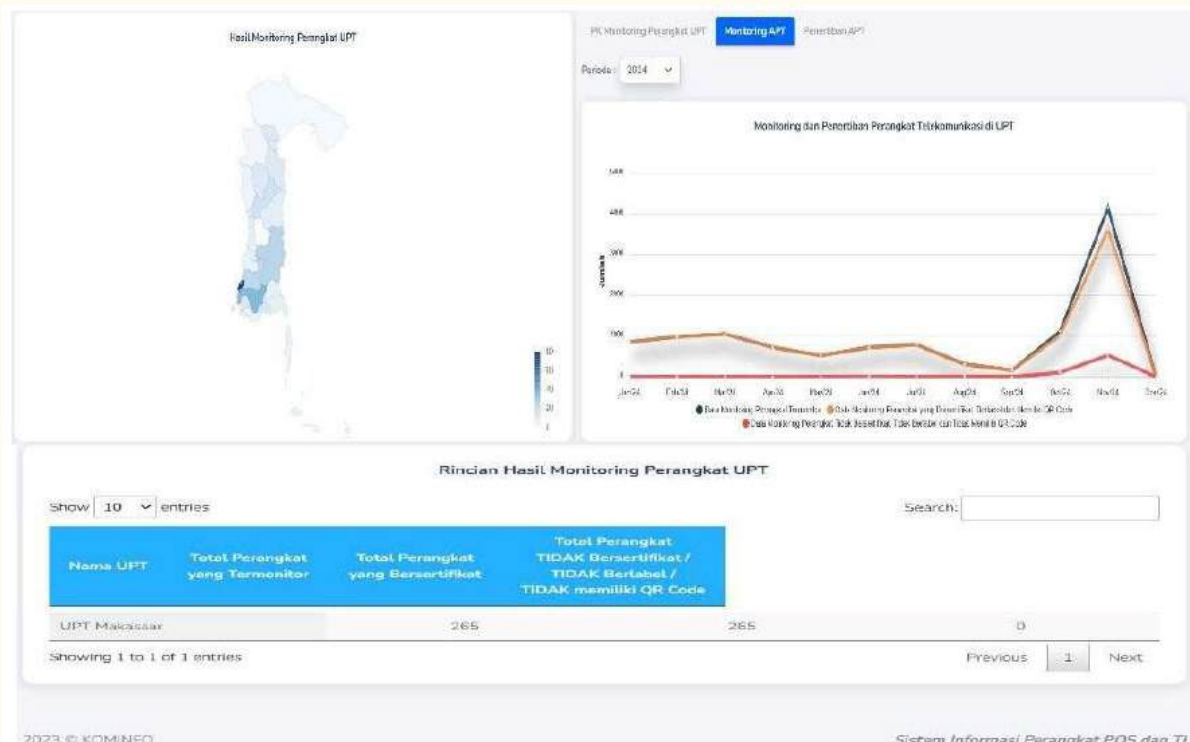
Page: 1 1 of 1

D Melaksanakan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi sebanyak 8 kali dalam setahun dengan minimal 3 jenis perangkat prioritas dimonitor per kegiatan

Berdasarkan hasil kegiatan Monitoring Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar terhadap Pengguna dan/atau Pedagang Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang beredar di Masyarakat dengan menggunakan metode observasi dan evaluasi terhadap Label atau QR Code yang tertera di kemasan barang dan Merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tersebut dengan daftar Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sudah tersertifikasi pada web www.sertifikasi.postel.go.id dan aplikasi SIRANI yang kemudian dilaporkan oleh UPT ke dalam aplikasi Sistem Monitoring Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (SMART) dengan target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian DJID.



Berdasarkan hasil pemeriksaan monitoring Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang disampaikan UPT terhadap 16 Jenis Perangkat (HF All Band Transceiver, Wireless Acces Point, Pemancar FM, Simbox, Repeater GSM, Radio RIG, GPS Tracker, Microwave Link (IDU/ODU) Handy Talkie, Set Top Box, Perangkat Low Power, Optical Line Terminal, Radio POC, Jammer, Fake BTS dan APT Rakitan) dengan jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring maksimal 8 kali sesuai dengan Perjanjian Kinerja UPT tahun 2024 dengan pelaksanaan pelaporannya melalui aplikasi SMART.



ANALISIS & DAMPAK

Pemeriksaan stasiun radio memastikan bahwa pengguna spektrum memiliki izin resmi (ISR) serta mematuhi ketentuan teknis penggunaan frekuensi. Dengan begitu dapat dilakukan pendeteksian dini terhadap pelanggaran izin, penggunaan perangkat ilegal, atau parameter teknis yang tidak sesuai, sehingga mencegah potensi gangguan interferensi. Pemeriksaan stasiun radio ini memastikan kualitas layanan telekomunikasi stabil dan sesuai standar, menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan yang layak, serta memberikan kepastian hukum dan teknis bagi pelaku industri penyiaran, mendorong iklim industri media yang tertib dan profesional.





Beberapa faktor keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio antara lain:

SDM yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio telah memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai. Personel telah dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup, serta memahami standar dan regulasi yang berlaku.

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio sering kali melibatkan beberapa pihak terkait seperti operator, regulator, atau pemilik stasiun radio. Kolaborasi yang baik dengan pihak terkait dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan.

Data dan informasi yang lengkap dapat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio yang meliputi: database SIMS/ISR, data parameter teknis stasiun radio dan data spesifikasi teknis perangkat pemancar.

Strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio meliputi: perencanaan kegiatan yang matang, persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio, pembagian personel, penentuan lokasi pemeriksaan dan pengukuran, dan evaluasi kegiatan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan stasiun radio, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasional dan peraturan yang berlaku. Beberapa kendala umum yang sering dihadapi dalam kegiatan tersebut adalah:

Kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan, seperti data perizinan atau akses ke data frekuensi radio pengguna atau penyelenggara.

Birokrasi yang panjang dalam melakukan koordinasi dengan pengguna atau penyelenggara.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait, seperti operator stasiun radio dan regulator, akan membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang berkaitan dengan data dan perizinan, agar dapat dicapai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang muncul.



TINDAK LANJUT

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator Pemeriksaan Stasiun Radio antara lain:

- 1 Melakukan evaluasi kinerja pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio sudah efektif.
- 2 Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada proses pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio. Kemudian melakukan langkah-langkah mitigasi dalam menyelesaikan dan mencegah permasalahan agar kejadiannya tidak berulang.
- 3 Melaksanakan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Tindakan perbaikan berupa perubahan proses bisnis pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio serta penyesuaian jumlah personel dan peralatan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio.

EFISIENSI

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio, dilakukan beberapa cara berikut:

- 1 Personel yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio telah diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Pelatihan juga dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas.
- 2 Sistem remote site pada Network Monitoring System (NMS) operator dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) lebih efisien daripada pemeriksaan langsung oleh personel di lapangan. Sistem remote site pada Network Monitoring System (NMS) juga dapat membantu mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dan/atau tidak memiliki ISR.
- 3 Koordinasi dengan stakeholder terkait seperti regulator, operator dan penyelenggara telekomunikasi dapat membantu memastikan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisasi overlapping dan mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan inspeksi.

Dengan menerapkan beberapa cara di atas, maka efisiensi sisi sumber daya manusia dan efisiensi waktu pelaksanaan dalam pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio telah tercapai.

INDIKATOR KINERJA

PEMERIKSAAN STASIUN RADIO



BERORIENTASI PELAYANAN

Personil mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik dan solusi atas permasalahan frekuensi radio



AKUNTABEL

Personil terampil dalam pemeriksaan dan pengukuran frekuensi, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dengan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan



KOMPETEN

Kompetensi tim monitoring terus ditingkatkan lewat pelatihan dan pengembangan, sehingga monitoring frekuensi radio berjalan efektif dan efisien



HARMONIS

Pegawai Balmon Makassar menjalin hubungan harmonis dengan pengguna frekuensi dan rekan kerja, guna mendukung pencapaian tujuan bersama



LOYAL

Pegawai Balmon Makassar loyal pada organisasi, mematuhi etika dan kode etik, sehingga monitoring frekuensi radio berjalan jujur dan adil



ADAPTIF

Pegawai Balmon Makassar adaptif terhadap perubahan lingkungan dan teknologi, sehingga monitoring frekuensi radio berjalan efektif dan efisien



KOLABORATIF

Pegawai Balmon Makassar berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal guna meningkatkan kualitas dan memastikan monitoring frekuensi yang komprehensif



Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Latar Belakang : Penggunaan frekuensi radio yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi mengakibatkan permasalahan dikarenakan penggunaan frekuensi radio sangat beragam. Peningkatan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut seharusnya diikuti dengan kesadaran untuk melakukan pengurusan izin, menggunakan frekuensi radio secara tertib, aman, tidak saling mengganggu, dan sesuai ketentuan teknis, serta menggunakan perangkat yang telah disertifikasi/distandardisasi oleh DJID Komdigi. Dampak dari ketidaksadaran dan penyalahgunaan pemakaian frekuensi radio maupun perangkat telekomunikasi tersebut sering kali menimbulkan gangguan frekuensi radio antar pengguna frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas dan pengendali terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio serta senantiasa harus siap sedia dalam melakukan penanganan gangguan frekuensi radio terhadap pengguna frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya yang berada di wilayah kerjanya.

Penanganan gangguan frekuensi radio merupakan salah satu bentuk nyata pelayanan yang dilakukan Balai Monitor SFR Kelas I

Makassar terhadap pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), maupun pengguna Non Pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) dalam mengatasi gangguan akibat interferensi frekuensi radio. Kegiatan yang dilakukan berupa penerimaan dan penyelesaian laporan aduan gangguan frekuensi radio dari pengguna dan penyelenggara telekomunikasi serta stakeholder terkait di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar.

Penanganan gangguan dimaksudkan untuk menemukan dan mendeteksi stasiun radio dan pengguna frekuensi radio yang mengganggu dan menginterferensi pada frekuensi radio yang digunakan oleh pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), maupun pengguna Non Pemegang Izin Stasiun Radio (ISR). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang teratur, tertib, efektif, efisien, dan optimal, melakukan aktivitas pancaran frekuensi radio setelah memiliki ISR, menggunakan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari potensi interferensi dan saling mengganggu.



Capaian Kinerja : Sasaran kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di Balai Monitor SFR Kelas I Makassar selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% (merujuk pada Nota Dinas No. 1083/DJ-SDP-PI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024):

a

Menangani 100% aduan gangguan frekuensi radio yang dilaporkan melalui aplikasi Trouble Ticket.

b

Melaporkan hasil penanganan gangguan melalui aplikasi Trouble Ticket.

Capaian kinerja indikator Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio selama Tahun 2024 sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Ditjen DJID.

KINERJA

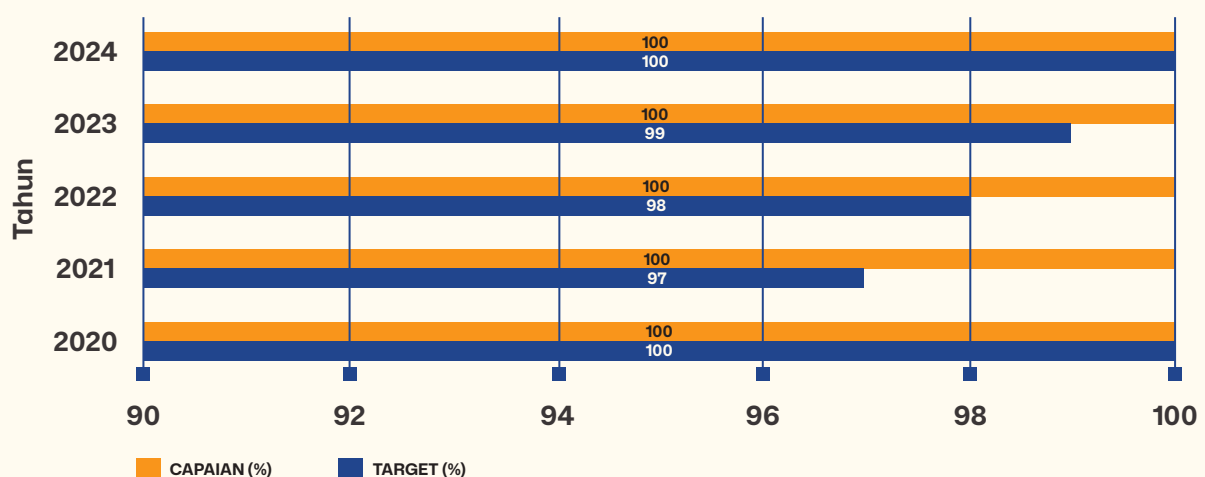
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

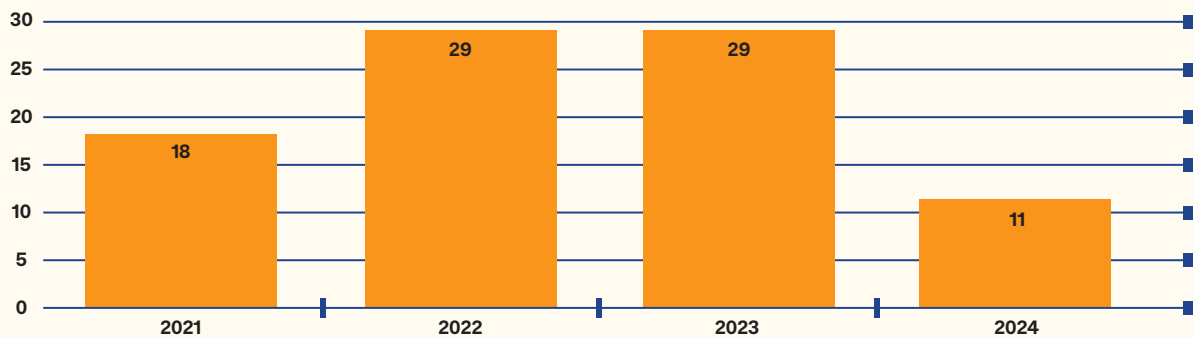
TARGET**100%****CAPAIAN****100%****PERSENTASE****100%**

Capaian Indikator Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024

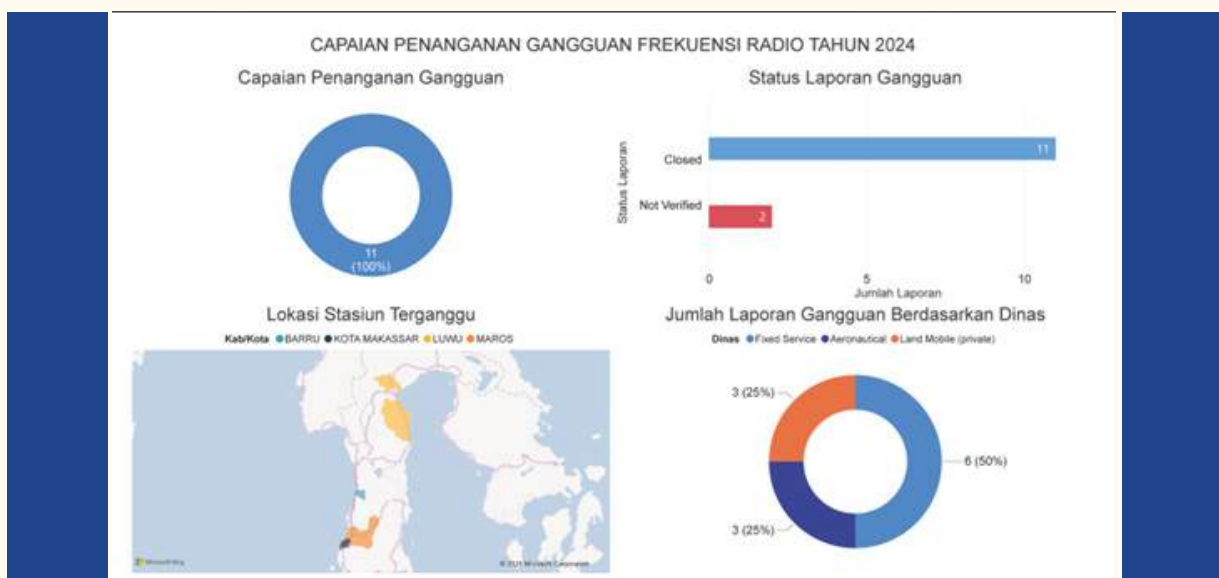
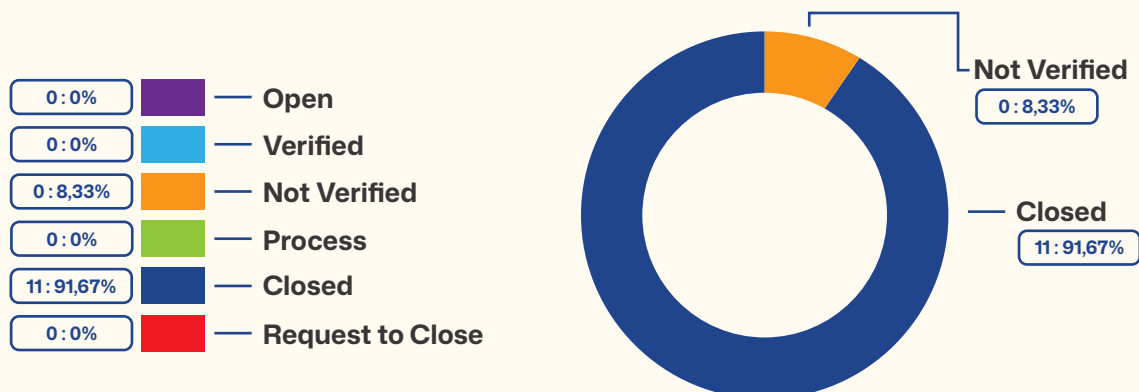




TOTAL JUMLAH LAPORAN PER-TAHUN



Balai Monitor SFR Kelas I Makassar menangani seluruh laporan gangguan yang dilaporkan melalui aplikasi Trouble Ticket pada tahun 2024 sebanyak 12 pengaduan gangguan, dengan status 1 tidak terverifikasi dan 11 tertangani. 1 aduan tidak terverifikasi karena ketidaksesuaian antara data pengaduan dan data ISR. Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan perincian sebagai berikut:

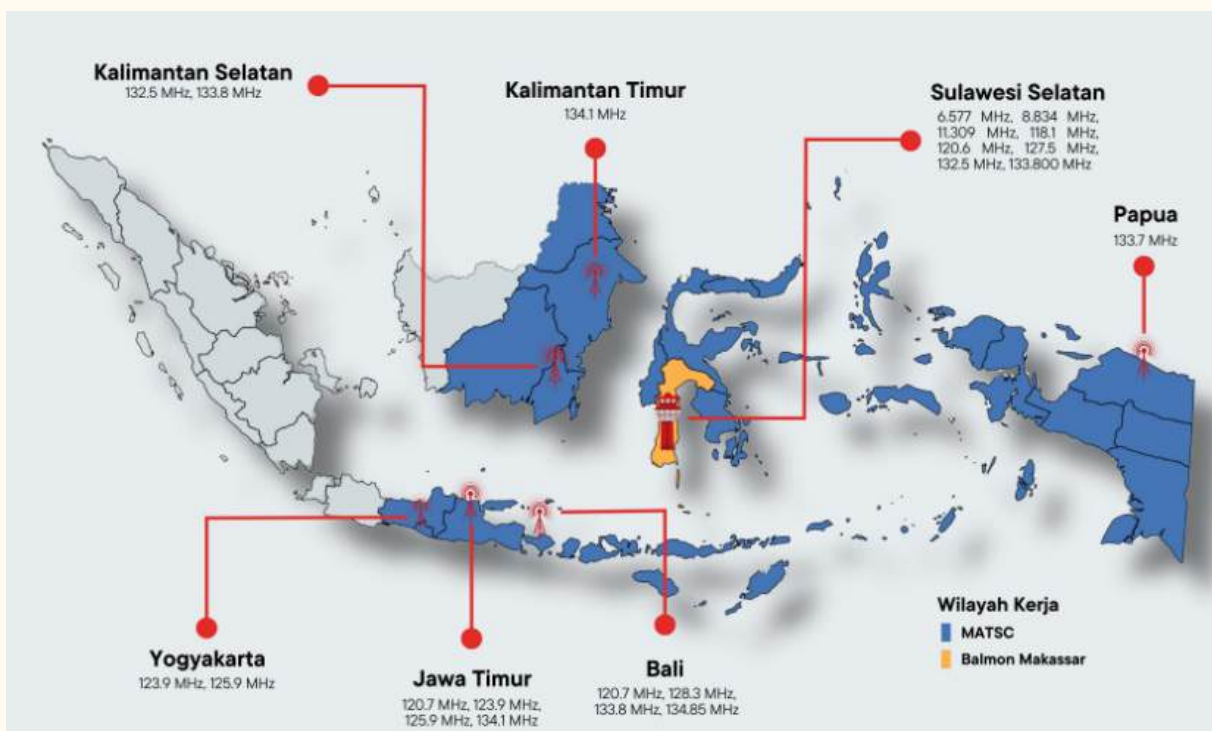
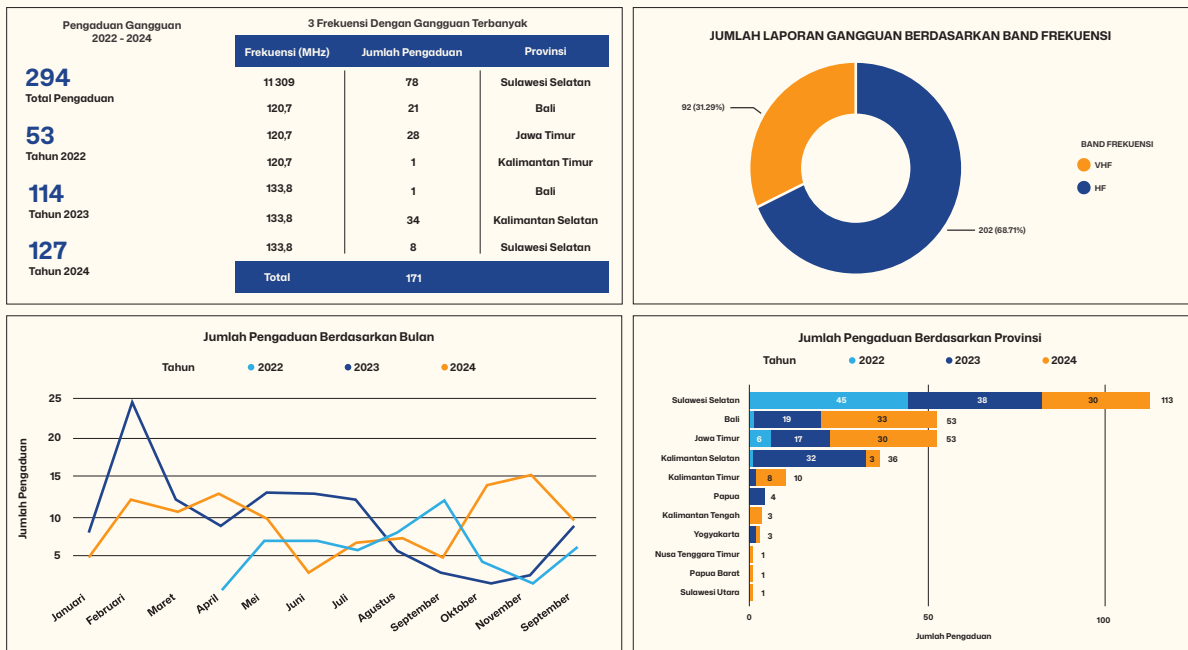




Aduan gangguan yang paling banyak ditangani pada Tahun 2024 adalah gangguan pada frekuensi MW Link milik operator seluler sebanyak 6 (enam) pengaduan gangguan atau sejumlah 50% dari total seluruh gangguan.

Selain itu, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar juga banyak menerima aduan gangguan oleh MATSC (Makassar Air Traffic Service Centre) yang berkedudukan di Kota Makassar dan memiliki wilayah kerja 2/3 dari wilayah udara Republik Indonesia sehingga setiap aduan yang masuk diteruskan oleh Balai Monitor Makassar Ke UPT terkait.

DATA LAPORAN PENGADUAN GANGGUAN FREKUENSI PENERBANGAN OLEH MATSC PERIODE 2022 - 2024





ANALISIS & DAMPAK

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ini mewujudkan lingkungan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan bebas interferensi, sehingga memperkuat keandalan layanan telekomunikasi publik yang sangat bergantung pada kestabilan frekuensi. Khususnya, dalam memastikan kelancaran komunikasi vital dan keselamatan penerbangan, yang menjadi bagian dari infrastruktur strategis negara. Penanganan gangguan juga tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga diiringi dengan upaya preventif seperti identifikasi perangkat tidak bersertifikat, analisis lokasi gangguan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini pula dapat memperkuat pengendalian jangka panjang terhadap potensi gangguan di masa depan serta menekan risiko gangguan yang berulang.

Tahun 2024, capaian indikator penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sebesar 100%, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target pada indikator ini, antara lain:

- A. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah merespons dengan cepat dalam menangani pengaduan gangguan frekuensi radio. Hal ini dapat diukur dari waktu antara pengaduan gangguan dan waktu penanganan gangguan oleh tim.
- B. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyelesaikan gangguan frekuensi radio. Karena semakin tinggi tingkat penyelesaian gangguan, semakin efektif penanganan gangguan tersebut.
- C. Ketersediaan sumber daya seperti personel, peralatan monitoring dalam menunjang kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio telah optimal.
- D. Strategi dalam penanganan gangguan spektrum radio yang dilakukan, antara lain sebagai berikut: menetapkan prioritas penanganan gangguan, dengan melaksanakan terlebih dahulu gangguan terkait keselamatan, pemantauan dalam rangka mendeteksi sumber gangguan spektrum frekuensi radio untuk mengidentifikasi sumber gangguan (suspect), analisis penyebab gangguan berupa pemeriksaan perangkat terganggu maupun pemantauan di sekitar lingkungan yang terganggu dan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi yang harus memiliki ISR dan sertifikat perangkat untuk mencegah timbulnya gangguan spektrum frekuensi radio.
- E. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah membuat task force bersama MATSC dan Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dan Perjanjian Kerja Sama dengan MATSC dalam hal melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang spektrum frekuensi radio utamanya frekuensi penerbangan.



Seiring pelaksanaan penanganan gangguan, ditemukan beberapa kendala di lapangan, antara lain:

- A. Penggunaan frekuensi radio yang padat terutama di daerah perkotaan dimana terdapat banyak peralatan telekomunikasi yang beroperasi di berbagai frekuensi dan power pancaran yang dapat menyulitkan identifikasi. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan menggunakan peralatan monitoring seperti Spectrum Analyzer, Receiver, dan Direction Finder.
- B. Keterbatasan akses lokasi sumber gangguan yang sulit dijangkau dengan menggunakan mobil DF. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan perangkat handheld DF.
- C. Kurangnya sifat kooperatif dari pihak yang diduga menjadi pengganggu (suspect) penggunaan frekuensi radio sehingga menyebabkan kondisi penanganan gangguan menjadi kurang kondusif di lapangan. Upaya yang telah dilakukan adalah bersikap humanis dan persuasif.
- D. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat dalam menggunakan frekuensi radio secara tertib dan efisien, sehingga lebih dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh terkait hal tersebut.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio antara lain:

- A. Telah dilakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar secara terus-menerus.
- B. Meningkatkan koordinasi antara pengguna spektrum frekuensi radio dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisasi gangguan spektrum frekuensi radio.
- C. Memberikan Pendidikan dan kesadaran publik terkait tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi melalui kegiatan sosialisasi.
- D. Penerapan sanksi administrasi terhadap setiap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi.





EFISIENSI

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, dilakukan beberapa cara berikut:

- A. Meningkatkan pemantauan frekuensi radio secara terus-menerus menggunakan teknologi pemantauan otomatis dan jaringan pemantauan yang luas seperti stasiun fixed (transportable & slave) untuk mencegah terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio.
- B. Meningkatkan akurasi dalam kegiatan inspeksi, pengukuran parameter teknis dan Verifikasi Koordinat site agar ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan zero gangguan dapat tercapai.
- C. Meningkatkan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib menggunakan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi sebagai Langkah pencegahan terjadinya gangguan Spektrum frekuensi radio.
- D. Penggunaan sistem pelaporan gangguan frekuensi radio melalui aplikasi Trouble Ticket telah membantu meningkatkan efisiensi penanganan gangguan. Sistem Trouble Ticket memungkinkan pelaporan gangguan yang mudah dan cepat, serta memungkinkan penggunaan informasi yang dikumpulkan untuk mempercepat penanganan gangguan.
- E. Penerapan sanksi administrasi, dalam hal ini denda administrasi sebagai upaya agar efek jera dapat lebih meningkatkan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga zero gangguan dapat tercapai.

INDIKATOR KINERJA

PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



BERORIENTASI PELAYANAN

Mengutamakan kebutuhan client dalam penanganan gangguan frekuensi dengan informasi jelas, akses mudah, dan umpan balik melalui aplikasi Trouble Ticket



AKUNTABEL

Menangani gangguan frekuensi secara transparan dan akuntabel, melalui pelaporan terbuka serta penegakan sanksi yang sesuai aturan



KOMPETEN

Personil yang menangani gangguan frekuensi memiliki keahlian memadai dan didukung pelatihan berkelanjutan dan akses sumber daya yang diperlukan



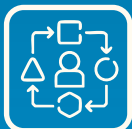
HARMONIS

Menangani gangguan frekuensi dengan koordinasi yang baik antar pihak serta menjaga agar tindakan tidak mengganggu pengguna legal



LOYAL

Menunjukkan loyalitas pada aturan dengan layanan sepenuh hati, menjaga integritas, dan mengambil tindakan tegas untuk melindungi pengguna legal



ADAPTIF

Menangani gangguan frekuensi dengan fleksibilitas, mengembangkan strategi sesuai situasi, dan memperbarui prosedur mengikuti perubahan



KOLABORATIF

Membangun kolaborasi lintas instansi dalam penanganan gangguan frekuensi melalui Task Force Pengamanan Frekuensi Penerbangan





Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Latar Belakang : Pemanfaatan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peraturan berisiko terhadap munculnya gangguan/interferensi. Gangguan ini dapat merugikan penyelenggara lain seperti operator telekomunikasi, jasa penerbangan, radio siaran, televisi siaran, maupun komponen masyarakat. Guna menghindari timbulnya risiko tersebut, diperlukan penertiban secara berkala terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar turut mendukung upaya peningkatan kepatuhan penggunaan frekuensi radio dengan melakukan monitoring terhadap kemungkinan adanya pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Sesuai dengan hasil pantauan pada kegiatan monitoring yang dilaksanakan, ditemukan berbagai pelanggaran yaitu adanya penggunaan frekuensi tanpa Izin Stasiun Radio (ISR), penggunaan frekuensi tidak sesuai parameter teknis dan stasiun radio yang tidak melakukan kegiatan pemancaran frekuensi.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring, dilakukan kegiatan penertiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang melibatkan stakeholder terkait serta dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian Kinerja : Berikut sasaran kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi di Balai Monitor SFR Kelas I Makassar selama Tahun 2024 dengan target capaian 93% (merujuk pada Nota Dinas No. 1083/DJ-SDP-PI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024):

1. Terlaksananya 93% penertiban SFR dan APT;
2. Melaksanakan penertiban pada temuan SFR dan APT dengan status ilegal pada penertiban nasional (TIBNAS) maupun penertiban skala regional UPT;
3. Melaksanakan penghentian pancaran (Off Air) ilegal pada setiap kegiatan penertiban;
4. Jumlah ilegal menjadi Off Air dibuktikan dengan surat teguran;
5. Melaksanakan penertiban alat telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi yang dibuktikan dengan surat teguran, surat pernyataan dan berita acara pengamanan/penyegelan; dan
6. Target penertiban SFR dan APT serta bobot penghitungan capaian berdasarkan pada huruf a di atas berdasarkan

TARGET	SFR	TARGET	APT
CAPAIAN TARGET	91%	CAPAIAN TARGET	96%
BOBOT PENILAIAN	60%	BOBOT PENILAIAN	40%



Indikator kinerja penertiban spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat terlaksana sebesar 100% dari target sebesar 93% dengan persentase capaian sebesar 107,52%.

Capaian Indikator Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2024

KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

TARGET

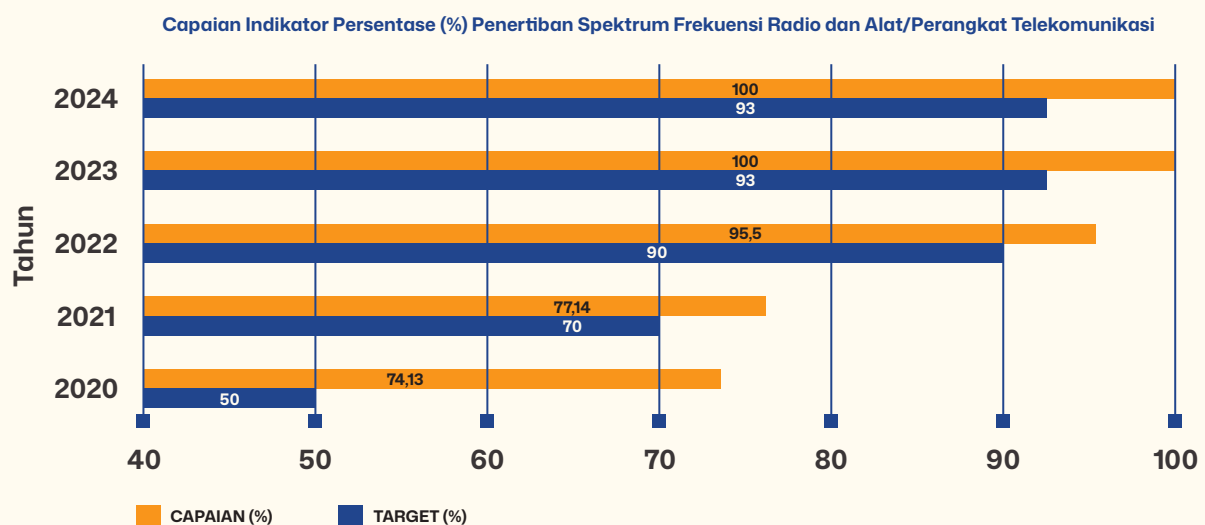
93%

CAPAIAN

100%

PERSENTASE

107,52%



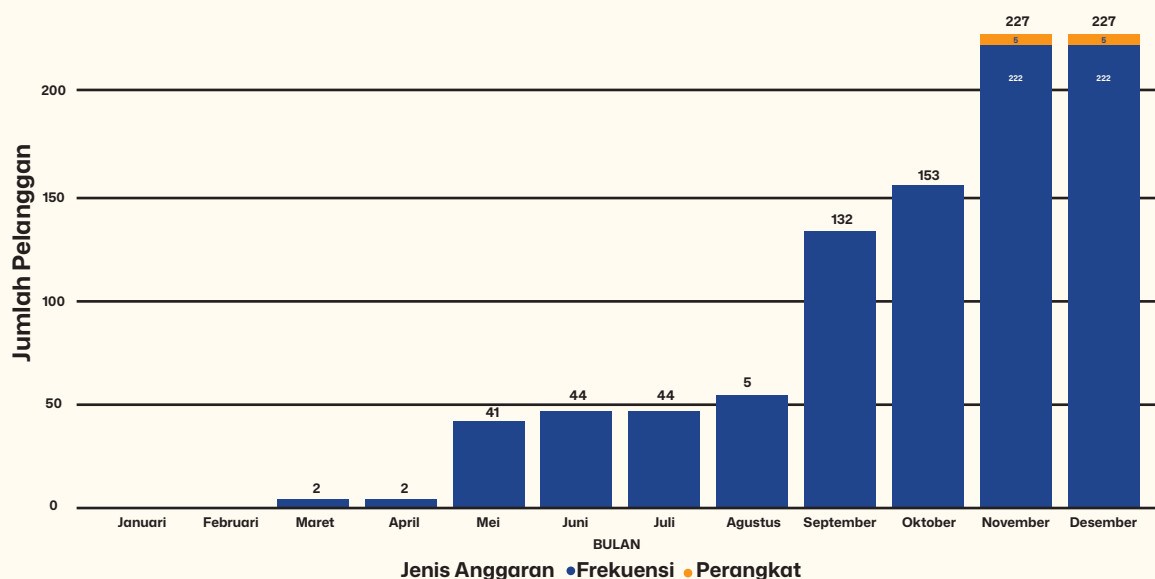
Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatan rutin pemantauan, pengukuran, inspeksi stasiun radio serta penertiban nasional (TIBNAS) yang dilakukan secara serentak oleh seluruh UPT secara Nasional.



Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan TIBNAS dengan target pemeriksaan pada pengguna frekuensi dan alat/perangkat telekomunikasi sebagai berikut:

- Penertiban Tahap I dilaksanakan pada tanggal 27–31 Mei 2024 dengan target penertiban pada pengguna frekuensi radio Microwave Link (MW Link) di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Penertiban Tahap II dilaksanakan pada tanggal 2–6 September 2024 dengan target penertiban pada pengguna frekuensi radio Microwave Link (MW Link) di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar;
- Penertiban Tahap III dilaksanakan pada tanggal 14–18 Oktober 2024 dengan target penertiban pada pengguna frekuensi radio Internet Service Provider (ISP) di Kota Makassar; dan
- Penertiban Tahap IV dilaksanakan pada tanggal 18–22 November 2024 dengan target penertiban pada pengguna frekuensi radio Dinas Bergerak Darat di Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar

REKAPITULASI HASIL PENERTIBAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TAHUN 2024



Berdasarkan hasil kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar tahun 2024 telah dilaksanakan penertiban terhadap 222 (dua ratus dua puluh dua) pengguna frekuensi radio dan 5 (lima) alat/perangkat telekomunikasi yang melakukan pelanggaran dan telah dilakukan tindak lanjut secara keseluruhan berupa penerbitan berkas administrasi sehingga capaian dari penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi sebesar 100%.



ANALISIS & DAMPAK

Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi secara langsung mencegah potensi gangguan spektrum, terutama yang disebabkan oleh frekuensi ilegal atau perangkat tidak bersertifikat, hingga mencegah risiko interferensi khususnya yang berdampak pada layanan publik seperti komunikasi seluler, penyiaran, hingga instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini menciptakan efek jera dan pencegahan jangka panjang terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

Penertiban ini juga didukung oleh pemberkasan administrasi yang lengkap (teguran, penyegehan, dll.), mencerminkan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sanksi. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/perangkat Telekomunikasi ini ditentukan oleh beberapa faktor:

- Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melakukan pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan melaksanakan kegiatan monitoring, pengukuran atau inspeksi dan validasi data stasiun radio sebelumnya yang memudahkan dalam mengidentifikasi pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi;
- Sebelum pelaksanaan kegiatan penertiban telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Tertib Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen dan semua koridor aturan yang berlaku di dalamnya kepada stakeholder terkait untuk dapat mengurangi terjadinya pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi;
- Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan koordinasi pada stakeholder terkait seperti Kasie Korwas PPNS Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Operator Seluler, POM XIV/Hasanuddin, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan stakeholder pengguna spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan;
- Personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di Balai Monitor SFR Kelas I Makassar berperan aktif dalam koridor koordinasi dan pengawasan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/perangkat Telekomunikasi juga terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Masih terdapat adanya pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang berulang dikarenakan kurangnya kesadaran para pengguna spektrum frekuensi radio sehingga hal ini dikenakan sanksi administrasi pelanggaran berulang;



- Kurangnya pemahaman masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio khususnya pada Dinas Bergerak Darat seperti Handy Talky, Base Station dan repeater untuk melakukan pengurusan izin sebelum menggunakan perangkat komunikasi radio yang dimiliki;
- Terdapat perubahan regulasi terhadap pelanggaran pengguna spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang mengedepankan pengenaan sanksi administrasi berupa sanksi denda dan;
- Seiring dengan meningkatnya pengguna spektrum frekuensi radio diperlukan peningkatan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi agar tidak terjadi pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio antara lain:

- A. Melakukan sosialisasi terkait aturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi serta pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap stakeholder secara berkala;
- B. Memperkuat peran pengawasan dan pengendalian untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi; dan
- C. Memperkuat koordinasi internal serta instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

EFISIENSI

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, dilakukan beberapa cara berikut:

- A. Melakukan penindakan secara langsung terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengukuran dan inspeksi stasiun radio.
- B. Melibatkan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- C. Melakukan briefing atau koordinasi kepada seluruh personel kegiatan sebelum pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi untuk keseragaman dalam pengambilan keputusan dan prosedur yang dilakukan.
- D. Menggunakan media pelaporan pada masing-masing aplikasi pelaporan yang tersedia sehingga laporan pelaksanaan kegiatan dapat dilaporkan sesuai dengan waktu dan prosedur yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA

PENERTIBAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI



BERORIENTASI PELAYANAN

Mengutamakan kebutuhan pengguna dengan informasi jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan, prosedur, dan tindakan penertiban frekuensi serta perangkat telekomunikasi



AKUNTABEL

Menjamin penertiban frekuensi dan perangkat dilakukan transparan, dengan pelaporan terbuka serta sanksi tegas bagi pelanggar aturan



KOMPETEN

Personil melaksanakan penertiban frekuensi dan perangkat sesuai aturan, dengan pemahaman tugas dan kompetensi yang dibutuhkan



HARMONIS

Menerapkan koordinasi yang baik antar instansi dalam penertiban frekuensi dan perangkat, serta memastikan tindakan tidak mengganggu kepentingan masyarakat



LOYAL

Menunjukkan loyalitas melalui penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi sesuai aturan dan menjaga kepentingan masyarakat dengan layanan tulus dan tindakan tegas



ADAPTIF

Penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi dilakukan adaptif melalui fleksibilitas, strategi tepat, dan pembaruan kebijakan sesuai perubahan



KOLABORATIF

Membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi





Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Latar Belakang : Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis bagi berbagai sektor, mulai dari komunikasi publik, pertahanan dan keamanan, hingga pelayanan masyarakat dan penyiaran. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan spektrum frekuensi radio menjadi hal yang sangat krusial guna menjamin penggunaannya secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan regulasi penggunaan spektrum di wilayah kerjanya. Salah satu instrumen vital dalam menjalankan tugas ini adalah Stasiun Monitor Frekuensi Radio.

Namun demikian, untuk menjamin efektivitas dan keberlangsungan fungsi pengawasan tersebut, diperlukan upaya pemeliharaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan operasional dari stasiun monitor agar dapat terus mendeteksi gangguan, pelanggaran, dan penyalahgunaan spektrum secara akurat dan tepat waktu. Terjaganya operasional stasiun monitor bukan hanya soal teknis, melainkan juga menyangkut keberlanjutan pengelolaan spektrum nasional secara menyeluruh.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa operasional dan fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat berjalan optimal dan sesuai standar operasional prosedur, mendukung pengawasan spektrum yang akurat, cepat, dan efisien serta menjadi bagian integral dari sistem monitoring nasional dalam mendeteksi dan menangani gangguan atau pelanggaran spektrum frekuensi radio.

Tujuan dari terjaganya operasional dan fungsi monitoring ini antara lain untuk memastikan kesiapan perangkat SMFR khususnya stasiun monitor tetap dan transportable dalam melaksanakan tugas observasi dan monitoring frekuensi radio serta sebagai wujud nyata pemanfaatan sumber daya perangkat SMFR oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.



Capaian Kinerja : Berikut sasaran kegiatan Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT Balai Monitor SFR Kelas I Makassar selama Tahun 2024 dengan target capaian 95% (merujuk pada Nota Dinas No. 1083/DJ-SDPPI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024):

- Menangani 100% target capaian PK Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT.
- Melaksanakan kegiatan Inspeksi perangkat SMFR pada 5 (lima) stasiun monitor tetap/transportable yaitu 2 Stasiun Tetap (Slave Bontomarannu, dan Slave Marusu) serta 3 Stasiun Transportable (Luwu, Bone dan Selayar) untuk menjaga operasional dan fungsi monitoring pada stasiun monitor frekuensi radio.
- Hasil Observasi dan Monitoring frekuensi radio pada stasiun monitor tetap dan transportable telah disampaikan ke aplikasi New Report Online (ROL).
- Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 95%. Tahun 2024 Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dapat merealisasikan target tersebut dengan melebihi capaian target yakni sebesar 100% melebihi target yang telah ditentukan sebesar 95% sehingga Capaian indikator ini adalah sebesar 105,26%.

Capaian Indikator Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Tahun 2024

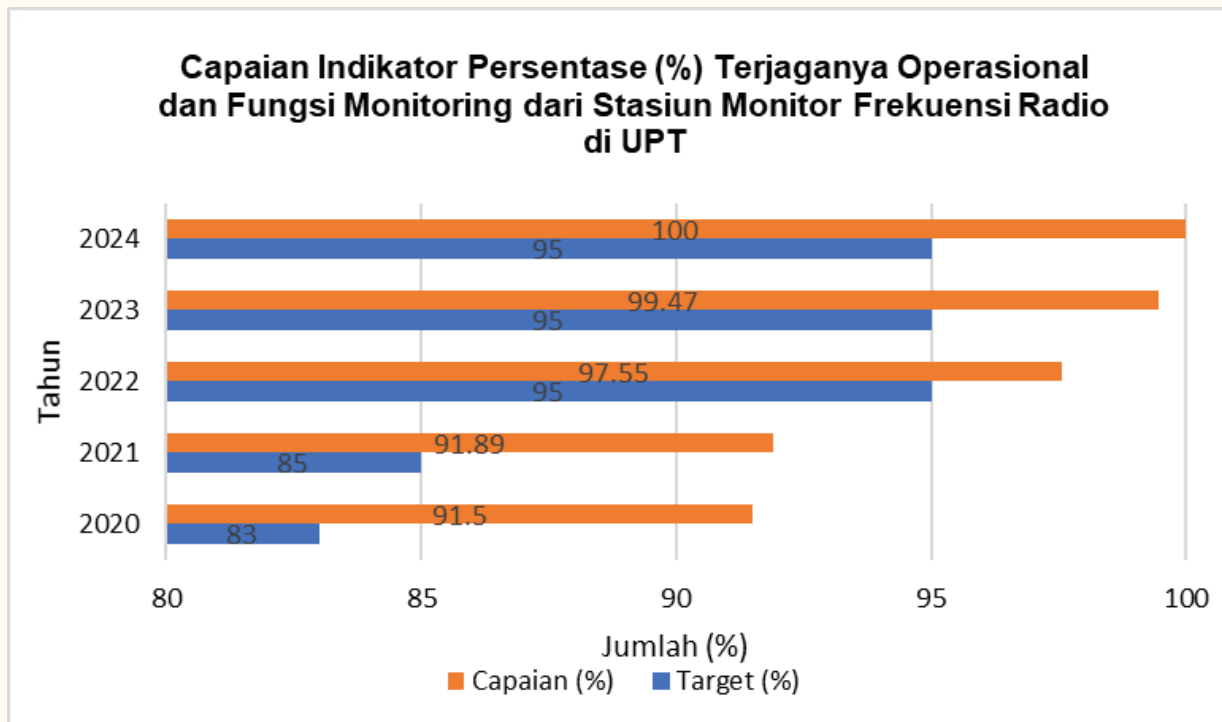
KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

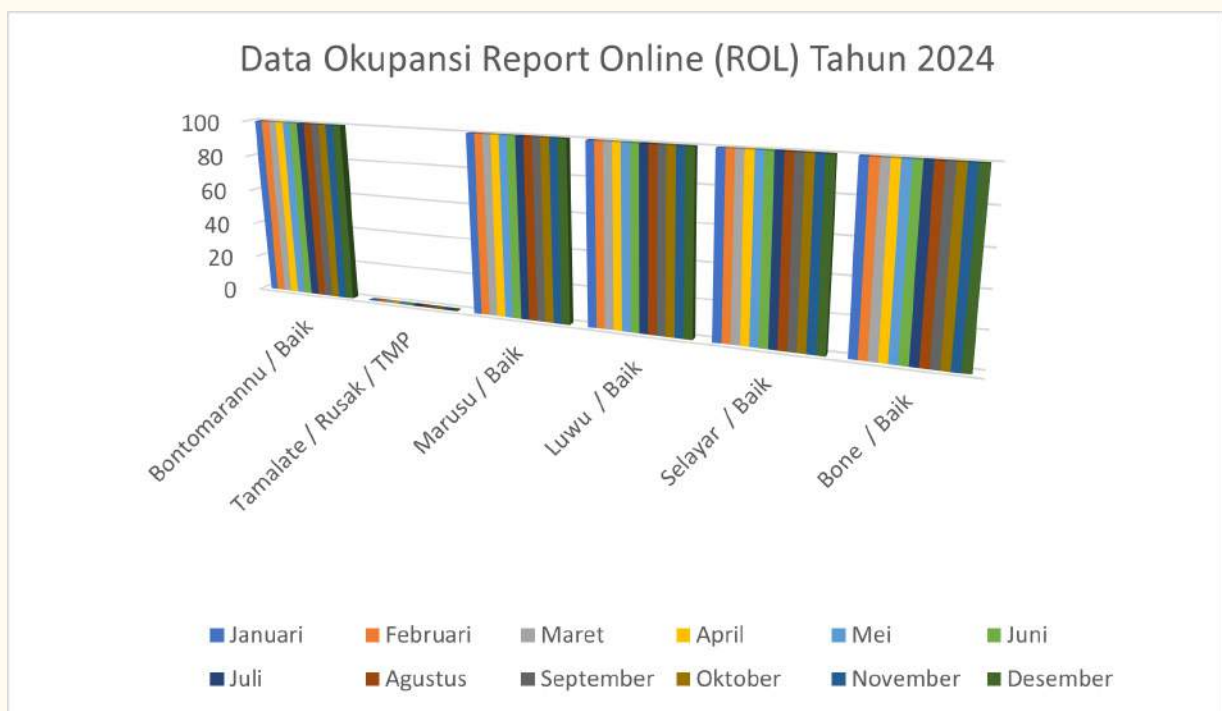
INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi

TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
95%	100%	105,26%



Stasiun monitor dengan kondisi baik dan jumlah data ROL (operasional) ≥ 5 hari maka stasiun tersebut termasuk stasiun monitor siap operasional sedangkan bila kondisi baik dan jumlah data ROL (operasional) < 5 hari maka tidak termasuk stasiun siap operasional.



Dari Total 6 (enam) stasiun monitor SMFR Tetap dan Transportable, terdapat 5 (lima) stasiun monitor dengan kondisi baik yaitu 2 Stasiun Tetap (Slave Bontomarannu, dan Slave Marusu) serta 3 Stasiun Transportable (Luwu, Bone dan Selayar) siap operasional dan data pemanfaatan telah disampaikan ke aplikasi New Report Online (ROL).



Dari Total 6 (enam) stasiun monitor SMFR Tetap dan Transportable, terdapat 5 (lima) stasiun monitor dengan kondisi baik yaitu 2 Stasiun Tetap (Slave Bontomarannu, dan Slave Marusu) serta 3 Stasiun Transportable (Luwu, Bone dan Selayar) siap operasional dan data pemanfaatan telah disampaikan ke aplikasi New Report Online (ROL).

Terdapat 1 unit stasiun monitor tetap yaitu Slave Tamalate dalam kondisi rusak dan telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Nomor 78/Balmon.73/SP.03.01/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 perihal Laporan Kerusakan Perangkat SMFR Stasiun Tetap TCI. Oleh karena itu site Slave Tamalate tidak dimasukkan ke perhitungan PK (TMP).

STATUS DAN KONDISI OPERASIONAL MONITOR BALMON MAKASSAR

NAMA STASIUN MONITOR	DATA ROL (OPS)	KONDISI	SIAP OPERASIONAL	TOTAL STASIUN MONITOR (BAIK)	STASIUN SIAP OPERASIONAL	CAPAIAN PK (%)
BONTOMARANNU	204	BAIK	YA	5	5	100%
MARUSU	207	BAIK	YA			
TAMALATE	0	RUSAK	TMP			
LUWU	197	BAIK	YA			
KEPSELAYAR	187	BAIK	YA			
BONE	192	BAIK	YA			

Analisis dan Dampak

Capaian kinerja terjaganya operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio sebesar 105,26% pada tahun 2024 menunjukkan kesiapan perangkat dan efektivitas pengawasan yang optimal. Perangkat yang berfungsi optimal memungkinkan pemantauan spektrum frekuensi yang lebih akurat, real-time, dan menyeluruh, sehingga deteksi penggunaan frekuensi ilegal dan interferensi dapat dilakukan dengan cepat. Dengan berfungsinya stasiun monitor tetap maupun transportable secara penuh, pengawasan spektrum dapat dilakukan secara akurat dan efisien, mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya strategis dan terbatas.



Realisasi ketercapaian berhasil dilaksanakan karena adanya beberapa faktor pendukung, antara lain:

- A. Sumber daya manusia yang kompeten dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sehingga dapat dengan akurat menemukan jika ada perangkat yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- B. Sinergi dan kerja sama yang baik antar anggota tim kerja yang dilakukan secara efektif sehingga seluruh rangkaian kegiatan dalam mengupayakan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT.

Beberapa kendala yang dihadapi di sepanjang tahun 2024, antara lain:

- A. Kerusakan pada beberapa modul perangkat utama dan pendukung yang menghambat kinerja dari stasiun monitor tetap maupun transportable.
- B. Masalah koneksitas penggunaan fitur remote site pada stasiun monitor tetap dan transportable.





TINDAK LANJUT

Dengan terlaksananya serangkaian kegiatan untuk menjaga operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT, mulai dari Inspeksi perangkat SMFR secara berkala serta mengolah data hasil monitoring perangkat SMFR pada aplikasi ROL sebagai bukti nyata dalam pemanfaatan perangkat SMFR khususnya pada stasiun monitor tetap dan transportable. Serangkaian kegiatan yang dilakukan ini juga dapat menjadi evaluasi dan acuan dalam menjaga operasional dan fungsi monitor frekuensi radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar untuk tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan, Balmon Makassar melakukan beberapa hal, antara lain:

- A. Melaporkan setiap kerusakan yang terjadi kepada pimpinan agar kerusakan yang terjadi dapat segera terselesaikan.
- B. Melaksanakan kegiatan pengecekan kondisi perangkat secara berkala guna memastikan seluruh perangkat berfungsi secara optimal.
- C. Untuk permasalahan koneksitas, senantiasa petugas pemeliharaan dan stakeholder/vendor penyedia jasa koneksitas/internet untuk memeriksa kualitas jaringan internet yang tersedia pada setiap stasiun monitor tetap, transportable dan koneksitas internet pada ruang monitor control centre.



EFISIENSI

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT, dilakukan beberapa cara berikut:

- A. Penugasan teknisi dan operator monitoring dilakukan secara proporsional sesuai kompetensi dan beban kerja.
- B. Respon terhadap gangguan perangkat SMFR dilakukan melalui sistem pelaporan real-time, sehingga waktu penanganan menjadi lebih cepat.
- C. Pengadaan perangkat dan suku cadang untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat SMFR dilakukan secara terencana berdasarkan kebutuhan teknis riil, sehingga menghindari pemborosan atau pengeluaran yang tidak efektif.

INDIKATOR KINERJA

TERJAGA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN
MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT



BERORIENTASI PELAYANAN

Petugas pemeliharaan siap memberikan layanan terbaik dengan memastikan perangkat SMFR selalu tersedia, responsif, dan siap digunakan dalam mendukung kelancaran monitoring frekuensi radio



AKUNTABEL

Petugas pemeliharaan melaksanakan inspeksi dan perbaikan perangkat dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil secara transparan untuk menjaga aset



KOMPETEN

Petugas pemeliharaan terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengalaman untuk memperbaiki sistem dan perangkat monitoring



HARMONIS

Petugas pemeliharaan dan stakeholder bekerja sama serta saling berbagi ilmu dan pengalaman di Balai Monitor SFR Makassar



LOYAL

Petugas menunjukkan kesetiaan dalam menjalankan SOP pemeliharaan, rutin melaporkan hasil dan anomali, serta selalu siap tanggap menjaga operasional



ADAPTIF

Petugas mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, termasuk penggunaan perangkat SMFR digital dan remote sensing



KOLABORATIF

Bekerjasama dan berkoordinasi dengan tim internal dan pihak terkait dalam pemeliharaan dan pemeriksaan perangkat SMFR





Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

Latar Belakang : Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) merupakan sarana resmi untuk menilai dan memastikan kompetensi calon amatir radio dalam hal pengetahuan teknis, etika komunikasi, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku di bidang komunikasi radio. Kegiatan ini menjadi tahapan penting sebelum seseorang memperoleh izin sebagai amatir radio yang sah dan terdaftar. Dalam praktiknya, amatir radio memiliki peran vital tidak hanya sebagai hobi atau kegiatan komunikasi pribadi, tetapi juga sebagai cadangan komunikasi dalam kondisi darurat, sarana pendidikan, serta bagian dari jaringan komunikasi nasional yang mendukung kedaulatan dan keselamatan informasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan ujian ini harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio dimaksudkan untuk menyaring dan melahirkan individu yang tidak hanya tertarik pada bidang komunikasi radio, tetapi juga memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam mengoperasikan perangkat radio secara benar sesuai regulasi. Kegiatan ini juga menjadi bentuk pembinaan yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan etika komunitas amatir radio di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan ini, penyelenggaraan ujian secara nasional juga menjadi momentum konsolidasi antarwilayah agar standar kompetensi dapat diterapkan secara merata dan adil.





Untuk mendukung proses ujian yang lebih efisien, transparan, dan akurat, metode pelaksanaan kini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini memungkinkan peserta mengikuti ujian secara digital dengan hasil yang cepat dan objektif, tanpa mengurangi bobot materi dan tingkat kesulitan soal. Penggunaan CAT merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam dunia komunikasi, serta mendukung prinsip pelayanan publik yang modern, efektif, dan bebas dari penyimpangan administratif.

Melalui penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio secara berkala dan terstandar, diharapkan akan lahir lebih banyak amatir radio yang andal, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Kegiatan ini tidak hanya menjadi media seleksi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan komunitas komunikasi radio yang aktif, bertanggung jawab, dan siap berperan dalam berbagai situasi, termasuk kondisi darurat nasional.



Capaian Kinerja : Berikut sasaran kegiatan Ujian Negara Amatir Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% sebesar 200 peserta (merujuk pada Nota Dinas No. 303/Balmon.73/SP.02.05/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan Nota Dinas No. 660/Balmon.73/SP.02.05/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Laporan Kegiatan UNAR Semester I dan II tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024):

1. Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2024 dengan target capaian sebesar 200 (dua ratus) peserta selama satu tahun pelaksanaan.
2. Meningkatkan jumlah operator radio amatir yang bersertifikat melalui pelaksanaan Ujian Amatir Radio secara terencana dan berkala.
3. Mendukung tertib administrasi dan legalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio oleh amatir radio melalui penyelenggaraan ujian yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
4. Memperluas jangkauan layanan publik di bidang komunikasi radio dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam ujian amatir radio di berbagai wilayah



Indikator Kinerja Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT memiliki target realisasi sebesar 100%. Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar pada tahun 2024 mencapai 254% sehingga Capaian indikator ini sebesar 254%, melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT Tahun 2024

KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

TARGET

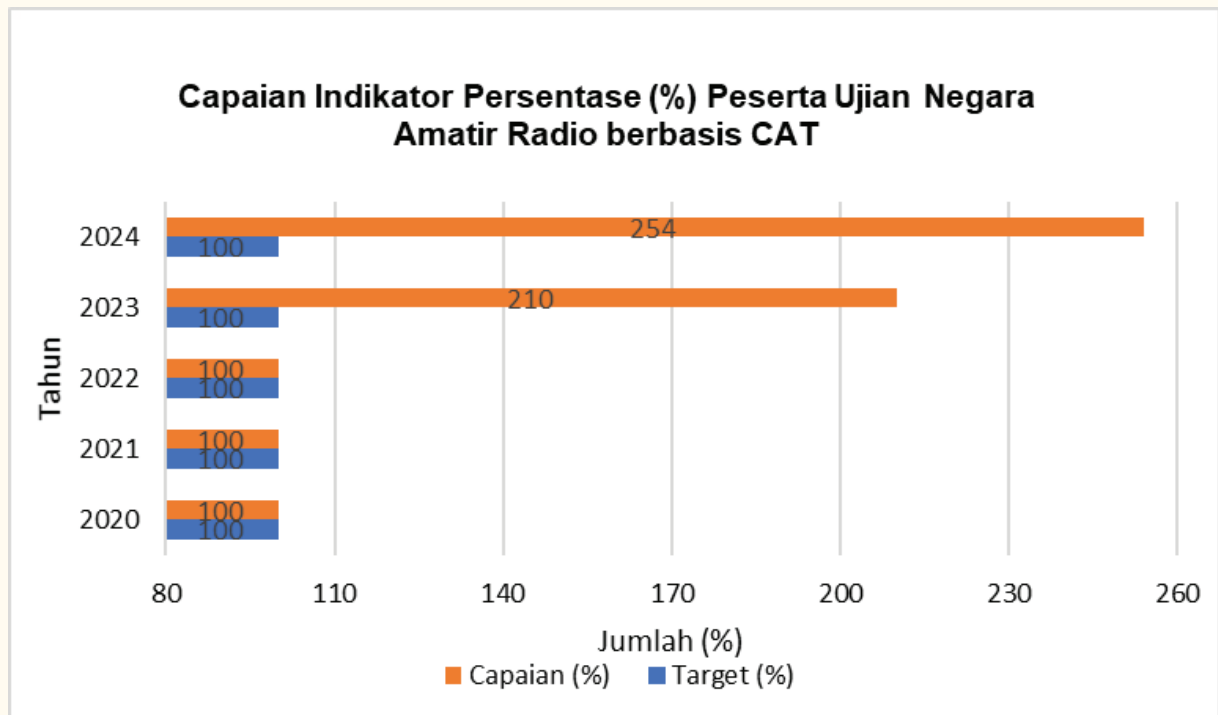
100%

CAPAIAN

254%

PERSENTASE

254%



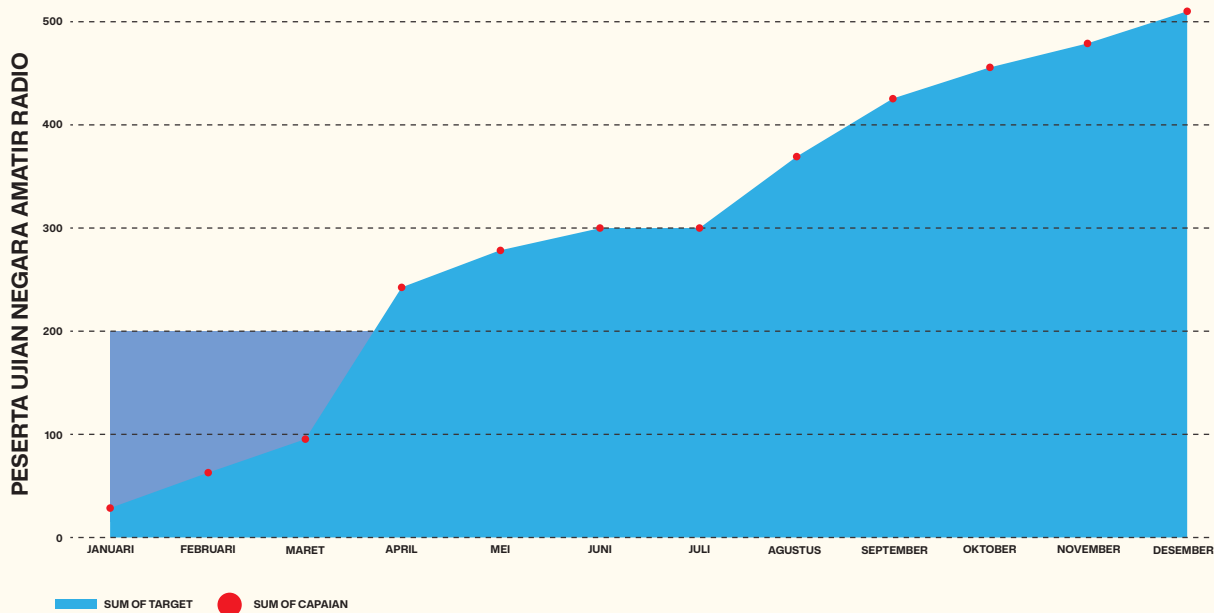
Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar pada tahun 2024 berlangsung sebanyak 11 kali pelaksanaan, yang terdiri dari 10 UNAR reguler di aula kantor dan 1 UNAR non-reguler di Kabupaten Enrekang.



Periode	Target Peserta	Capaian Jumlah Peserta			% Capaian	Lulus	Tidak Lulus
2024	200	Siaga	Penggalang	Penegak	254%	427	81
		387	87	34			
		Total		508			

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2024 jumlah peserta sebanyak 508 (lima ratus delapan) peserta yang terdiri dari 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) peserta Siaga, 87 (delapan puluh tujuh) peserta Penggalang dan 34 (tiga puluh empat) peserta Penegak.

CAPAIAN PESERTA UJIAN NEGARA AMATIR RADIO Berbasi Computer Assisted (CAT)



Dari hasil tersebut maka hasil Persentase Ujian Negara Amatir Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2024 sebesar 254% dari target. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menarik minat masyarakat untuk mengikuti Ujian Negara Amatir Radio. Hal ini berdampak positif pada peningkatan jumlah operator radio amatir bersertifikasi dan kepatuhan terhadap regulasi radio amatir.



ANALISIS & DAMPAK

Pada tahun 2024, pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Dari target awal sebanyak 200 peserta, realisasi jumlah peserta mencapai 508 peserta, atau setara dengan 254% dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Dengan adanya proses pengujian berbasis Computer Assisted Test (CAT), yang menjamin objektivitas dan transparansi hasil. Sistem CAT mempercepat proses ujian dan hasil, menunjukkan modernisasi layanan publik dan adaptasi teknologi informasi. Pelaksanaan ujian ini menjadi langkah preventif terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi, karena hanya operator bersertifikat yang dapat mengakses layanan radio amatir secara legal.

Capaian UNAR 2024 tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek kuantitatif (254%), tetapi juga berdampak strategis dalam mendukung kedaulatan komunikasi, edukasi masyarakat, penataan spektrum frekuensi, dan reputasi pelayanan publik yang unggul.

Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) antara lain:

- Sosialisasi yang Efektif dan Berkelanjutan, promosi UNAR dilakukan secara aktif melalui media sosial, kerja sama dengan komunitas amatir radio (ORARI), serta dukungan dari instansi daerah. Hal ini meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengikuti ujian.
- Pelayanan Ujian yang Terjadwal dan Terbuka, pelaksanaan ujian dilakukan secara berkala dan menjangkau wilayah yang lebih luas, baik melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) maupun Mobile (UNAR Non reguler). Jadwal yang fleksibel memudahkan masyarakat untuk ikut serta.
- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait, kerja sama dengan ORARI Daerah dan Lokal serta Dinas Kominfo di wilayah kerja mendukung pelaksanaan UNAR yang tertib dan masif.
- Kemudahan Akses dan Pendaftaran Digital, sistem pendaftaran online melalui website DJID-IAR IKRAP (<https://iar-ikrap.postel.go.id/>) yang mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi calon peserta.





Dampak dari keberhasilan pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) antara lain:

- Peningkatan Jumlah Operator Radio Amatir Resmi, yang memperkuat ekosistem komunikasi darurat dan komunitas komunikasi publik.
- Kontribusi terhadap Penertiban Frekuensi, karena semakin banyak pengguna radio yang memiliki legalitas dan teredukasi.
- Citra Positif Balai Monitor, sebagai penyelenggara layanan publik yang responsif, transparan, dan inovatif.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) antara lain:

Laporan Capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini telah dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan penguatan strategi pelaksanaan UNAR tahun 2024, melalui beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

- Penguatan Pola Sosialisasi dan Kolaborasi, melihat tren peningkatan signifikan peserta pada bulan Juni hingga Desember 2024, maka strategi sosialisasi yang diterapkan pada periode tersebut (seperti kerja sama dengan komunitas ORARI, pemanfaatan media sosial, dan pendekatan langsung ke wilayah) diteruskan dan diperluas cakupannya di tahun 2024.
- Digitalisasi dan Pelayanan Ramah Pengguna, penggunaan platform digital dalam pendaftaran dan penyampaian informasi UNAR ditingkatkan, dengan menyesuaikan umpan balik dari peserta tahun sebelumnya agar proses lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
- Pemantapan Monitoring dan Evaluasi (Monev), hasil kinerja bulanan tahun 2023 dimanfaatkan sebagai dasar pengukuran indikator capaian 2024 secara lebih real-time. Hal ini mendukung proses penyesuaian cepat terhadap kebijakan dan kebutuhan peserta.
- Dengan memanfaatkan data dan capaian tahun sebelumnya secara sistematis, pelaksanaan UNAR tahun 2024 telah diarahkan untuk lebih inklusif, menjangkau lebih banyak wilayah, serta mampu mempertahankan bahkan melampaui capaian sebelumnya terbukti dengan realisasi 254% dari target di tahun 2024.



EFISIENSI

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar pada tahun 2024 berlangsung secara efisien dengan total 11 kali pelaksanaan, yang terdiri dari 10 UNAR reguler di aula kantor dan 1 UNAR non-reguler di Kabupaten Enrekang. Pemanfaatan aula kantor sebagai lokasi utama UNAR membantu menekan biaya operasional seperti sewa tempat dan logistik tambahan, sementara pelaksanaan UNAR non-reguler dilakukan secara strategis untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, sehingga pelayanan menjadi lebih tepat sasaran. Seluruh proses ujian telah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan pendaftaran online, yang mempercepat alur pelaksanaan serta mengurangi penggunaan kertas dan kesalahan data. Efisiensi ini berdampak langsung terhadap hasil, dimana capaian peserta meningkat signifikan menjadi 508 orang atau setara dengan 254% dari target awal, tanpa perlu peningkatan sumber daya secara besar-besaran.



INDIKATOR KINERJA

PESERTA UJIAN NEGARA AMATIR RADIO BERBASIS CAT



BERORIENTASI PELAYANAN

Petugas UNAR mengutamakan kemudahan dan kepuasan peserta melalui layanan informasi cepat, pendaftaran online, pendampingan di lokasi, serta sikap ramah, solutif, dan profesional.



AKUNTABEL

Setiap kegiatan UNAR dilaksanakan dengan tanggung jawab, sesuai prosedur, dan didukung dokumentasi serta laporan yang tertib dan transparan.



KOMPETEN

Personel UNAR memiliki kemampuan teknis dan pemahaman regulasi yang memadai, menjelaskan aturan ujian, menangani situasi teknis, dan terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan.



HARMONIS

UNAR dijalankan dengan kerja sama yang baik, koordinasi terbuka antar tim, dan hubungan harmonis dengan mitra eksternal.



LOYAL

Seluruh kegiatan UNAR dijalankan setia pada kebijakan Kementerian dan menjaga integritas serta reputasi instansi.



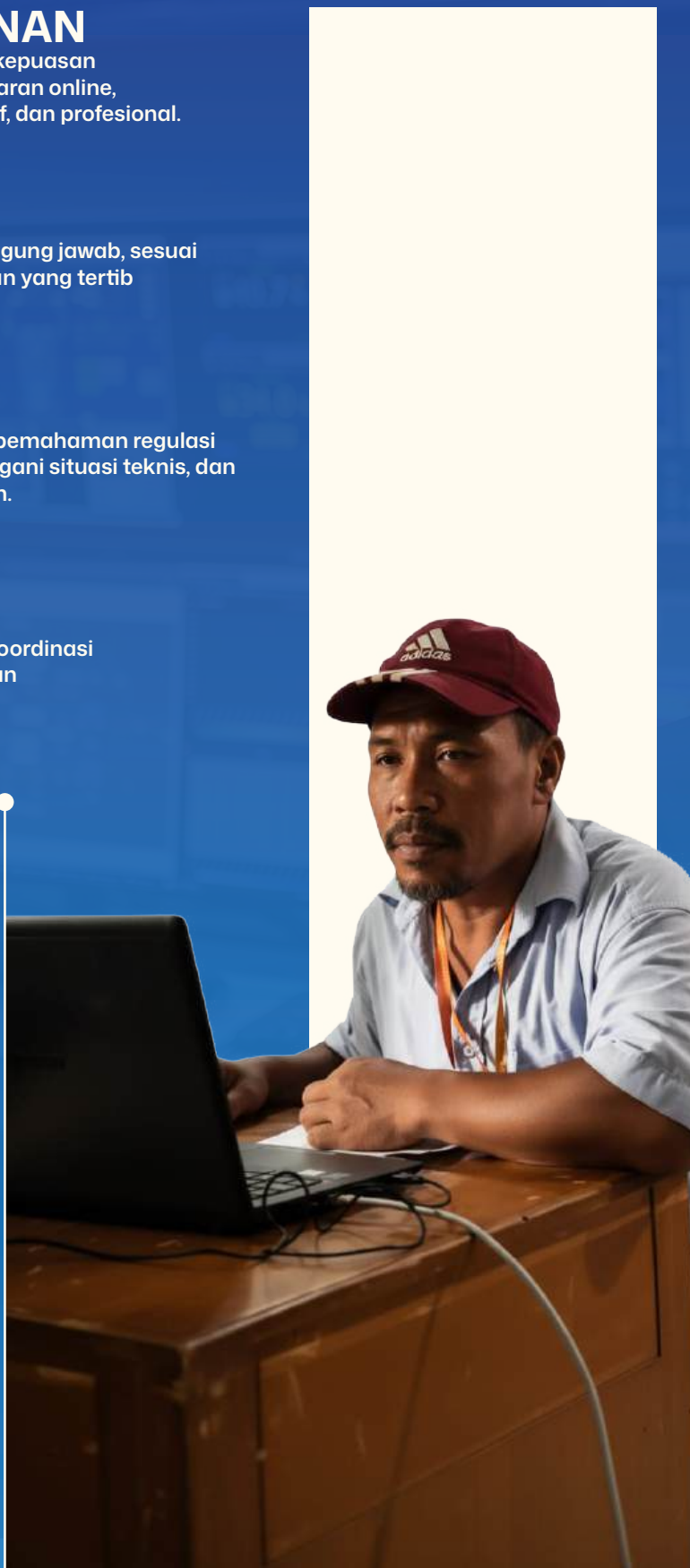
ADAPTIF

Pelaksanaan UNAR menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan, menjangkau wilayah terpencil, dan memanfaatkan teknologi digital secara fleksibel.



KOLABORATIF

Keberhasilan UNAR tercapai melalui kerja sama aktif Balai Monitor dengan ORARI, Dinas Kominfo, dan komunitas radio amatir, mengedepankan semangat gotong royong lintas sektor.





Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Latar Belakang : Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memerlukan pengelolaan secara tertib, efektif, dan efisien. Dalam praktiknya, sering terjadi keterlambatan pembayaran oleh Wajib Bayar yang dapat menimbulkan piutang negara dan berdampak pada arus kas serta stabilitas keuangan negara.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan kegiatan pelayanan penanganan tagihan dan pencegahan piutang BHP frekuensi radio, yang dilaksanakan melalui pemantauan status pembayaran pada sistem informasi perizinan (SIMS), serta klarifikasi langsung kepada Wajib Bayar melalui komunikasi atau kunjungan lapangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan kepatuhan pembayaran, verifikasi kesesuaian data, dan penyelesaian kewajiban yang telah jatuh tempo. Penanganan piutang dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, piutang dengan nilai di bawah Rp 8.000.000 dan tanpa jaminan tidak dapat dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan harus diselesaikan oleh instansi yang bersangkutan. Sementara itu, untuk piutang di atas nilai tersebut, dapat dilimpahkan pengurusannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan pendampingan dalam proses penyampaian Surat Paksa.

Selain itu, tagihan BHP juga dapat timbul dari pemanfaatan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercatat dalam sistem Integrated Service Request (ISR), yang memerlukan pengelolaan piutang secara profesional dan terkoordinasi agar tidak mengganggu keberlangsungan layanan dan keuangan negara.

Setiap penggunaan frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) yang nilainya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID). Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan program kegiatan pendampingan piutang yang terdiri dari penanganan piutang wajib bayar yang dihubungi dan pendampingan pelimpahan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk wajib bayar yang tidak dapat melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan.



Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta tertib administrasi pembayaran BHP, penggunaan frekuensi sesuai izin, serta peningkatan kepatuhan Wajib Bayar dalam memenuhi kewajibannya kepada negara.

Capaian Kinerja : Pada tahun 2024, Ditjen DJID menargetkan 100% Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL untuk tahun anggaran 2024. Pada akhir tahun anggaran 2024 realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL Tahun 2024

KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%)Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

TARGET

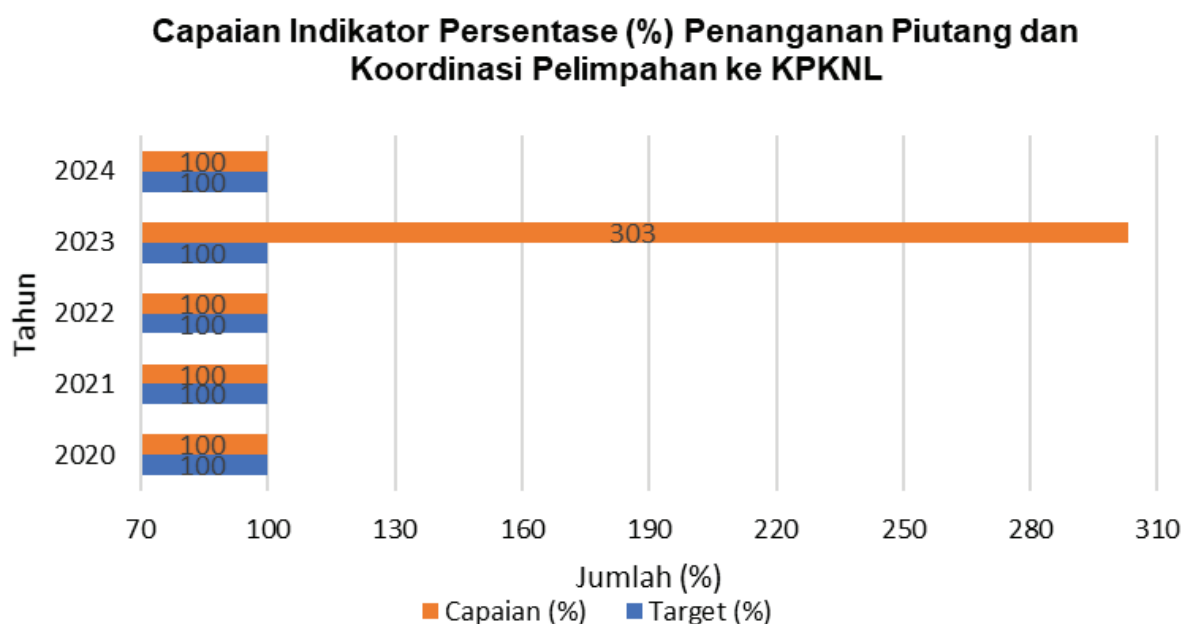
100%

CAPAIAN

100%

PERSENTASE

100%





Jumlah Penerbitan Tagihan BHP Tahun 2024

NO	Bulan	Jumlah Penerbitan Tagihan BHP						Jumlah Penanganan Piutang Dihubungi			Capaian (%) (Total Piutang dihubungi / Total Penerbitan Tagihan BHP)	Triwulan	Pelimpahan ke KPKNL		Capaian (%) (Pelaksanaan Pelimpahan KPKNL / Target)
		SPP	ST-1	ST-2	ST-3	ST-T	Total	Lewat Media	Datang Langsung	Total			Pelaksanaan	Target	
1	Januari	11	4	3	1	3	22	19	3	22	100%	1	1	4	25%
2	Februari	14	0	1	0	3	18	0	18	18	100%				
3	Maret	10	3	0	1	3	17	15	2	17	100%				
4	April	9	2	0	0	2	13	13	0	13	100%	2	1	4	25%
5	Mei	15	3	0	0	2	20	18	2	20	100%				
6	Juni	9	0	1	0	1	11	10	1	11	100%				
7	Juli	21	0	0	0	1	22	20	2	22	100%	3	0	4	0%
8	Agustus	29	4	0	0	1	34	17	17	34	100%				
9	September	12	6	4	0	1	23	23	0	23	100%				
10	Oktober	16	5	3	2	1	27	25	2	27	100%	4	2	4	50%
11	November	8	4	1	3	2	18	15	3	18	100%				
12	Desember	15	2	0	0	3	20	19	1	20	100%				
	Jumlah	169	33	13	7	23	245	194	51	245	100%		4	4	100%

Kegiatan penanganan Tagihan BHP Frekuensi Radio telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai target penanganan piutang yang dihubungi tahun 2024 yaitu sebesar 245 invoice/tagihan (100%) dan sudah terlaksana sebanyak 245 invoice/tagihan sehingga sudah terealisasi sebesar 100%. Dimana capaian pelaksanaan pada triwulan pertama adalah 25%, triwulan kedua sebesar 25%, triwulan ketiga sebesar 0% dan triwulan keempat sebesar 50%..

ANALISIS & DAMPAK

Penanganan piutang mendukung pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tertib sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2020 dan PMK 150/PMK.06/2022. Piutang dengan nilai di bawah Rp. 8 juta ditangani internal, sedangkan di atas itu dilimpahkan ke KPKNL, sehingga tidak ada celah administratif yang menyebabkan potensi kebocoran pendapatan negara, menurunkan risiko akumulasi piutang negara yang sulit ditagih, serta menjaga kelangsungan pendapatan sektor frekuensi radio.

Capaian 100% penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL di tahun 2024 juga mencerminkan kinerja unggul Balmon Makassar dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi, pelayanan publik, dan kontribusi terhadap penerimaan negara, sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Penanganan tagihan BHP pada tahun 2024 menunjukkan disiplin administrasi yang optimal dan efektivitas intervensi dalam mencegah piutang menumpuk serta berkontribusi langsung terhadap pencegahan tunggakan piutang baru.



Capaian indikator ini konsisten 100% selama 5 tahun terakhir, menunjukkan komitmen berkelanjutan Balmon Makassar terhadap transparansi keuangan dan pelayanan yang akuntabel dan yang tak kalah penting, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan lembaga dalam mengelola kewajiban finansial negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Balmon Makassar dalam mencapai target indikator Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL selama tahun 2024, antara lain:

1. Melakukan monitor status tagihan pembayaran BHP melalui Aplikasi Billing-ISR (<https://billing-isr.kominfo.go.id>), dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Menghubungi klien melalui nomor telepon dan atau email yang terdaftar khususnya untuk tagihan pembayaran BHP yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran.
3. Melakukan kunjungan dan klarifikasi terhadap wajib bayar ke lokasi alamat terdaftar khususnya untuk status tagihan keterlambatan.
4. Membantu klien yang mengalami kendala dalam akun MySpectra untuk mengunduh tagihan pembayaran (invoice) maupun cara menggunakan fitur menu aplikasi secara langsung pada saat kegiatan di lokasi alamat.
5. Mengarahkan klien untuk menghubungi loket pelayanan terpadu Ditjen DJID melalui telepon atau surat terkait perubahan data akun.
6. Balmon Makassar secara aktif mendistribusikan SPP BHP dan berkoordinasi dengan klien sehingga dapat mencegah peningkatan tunggakan piutang. Kegiatan ini mendorong klien untuk melakukan pembayaran BHP secara tepat waktu.

TINDAK LANJUT

Balmon Makassar secara aktif melakukan evaluasi dari seluruh kegiatan penanganan tagihan dan pencegahan piutang BHP Frekuensi Radio untuk terus melakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.

EFISIENSI

Implementasi pelayanan perizinan secara online khususnya terkait pendistribusian perincian tagihan tidak lagi dikirimkan melalui jasa pengiriman sehingga menghemat biaya anggaran pengiriman surat SPP BHP Frekuensi Radio.

INDIKATOR KINERJA

PENANGANAN PIUTANG DAN KOORDINASI PELIMPAHAN KE KPKNL



BERORIENTASI PELAYANAN

Balmon Makassar membantu klien mengakses invoice, melayani dengan ramah dan solutif, serta berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi pengguna frekuensi radio.



AKUNTABEL

Petugas melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab serta menjaga integritas tanpa menyalahgunakan kewenangan.



KOMPETEN

Petugas terus meningkatkan kemampuan teknis, administrasi, dan komunikasi, serta berbagi pengetahuan antar pegawai.



HARMONIS

Petugas melayani dengan ramah, tenang, dan komunikatif tanpa membedakan latar belakang pemohon.



LOYAL

Petugas taat SOP, tertib melaksanakan perizinan, dan rutin melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.



ADAPTIF

Petugas sigap mengikuti perubahan aturan, menyesuaikan proses perizinan, dan menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat.



KOLABORATIF

Petugas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib bayar sebelum jatuh tempo.



Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik & Survei Kepuasan Masyarakat

Latar Belakang : Sosialisasi merupakan salah satu sarana diseminasi informasi kepada masyarakat khususnya pengguna frekuensi radio, stakeholder atau pihak terkait lainnya mengenai regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.

Layanan publik menjadi salah satu penilaian instansi pemerintah yang terukur melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan tingkat kualitas layanan.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dilakukan menggunakan aplikasi survei yang disediakan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya dengan minimal yang ditargetkan sebanyak 30 orang responden sebagai penerima layanan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.

Metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang digunakan adalah metode survei kepada masyarakat khususnya pengguna layanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Responden secara langsung menggunakan aplikasi survei sebagai tolak ukur kinerja dan bahan untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.

Capaian Kinerja : Sasaran kegiatan adalah meningkatnya layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi dengan salah satu indikator kinerja sasaran kegiatan adalah Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dapat tercipta sebuah wadah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengetahuan terkait peraturan dan tata cara dan alur proses perizinan penggunaan frekuensi radio, prinsip penggunaan dan pemanfaatan frekuensi radio yang baik dan benar serta mengenal dan memahami tugas fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Berikut adalah pengukuran sasaran kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% (merujuk pada Nota Dinas No. 636 /Balmon.73/SP.02.07/12/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024).

- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (3,2 skala 4) dan survei integritas pelayanan publik (3,6 skala 4).
- Sosialisasi dilaksanakan dengan target minimal 50% dari wilayah layanan dan tidak berulang dengan tahun yang sebelumnya untuk dinas yang sama (kecuali telah 100% di tahun sebelumnya).



Capaian Indikator Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

TARGET

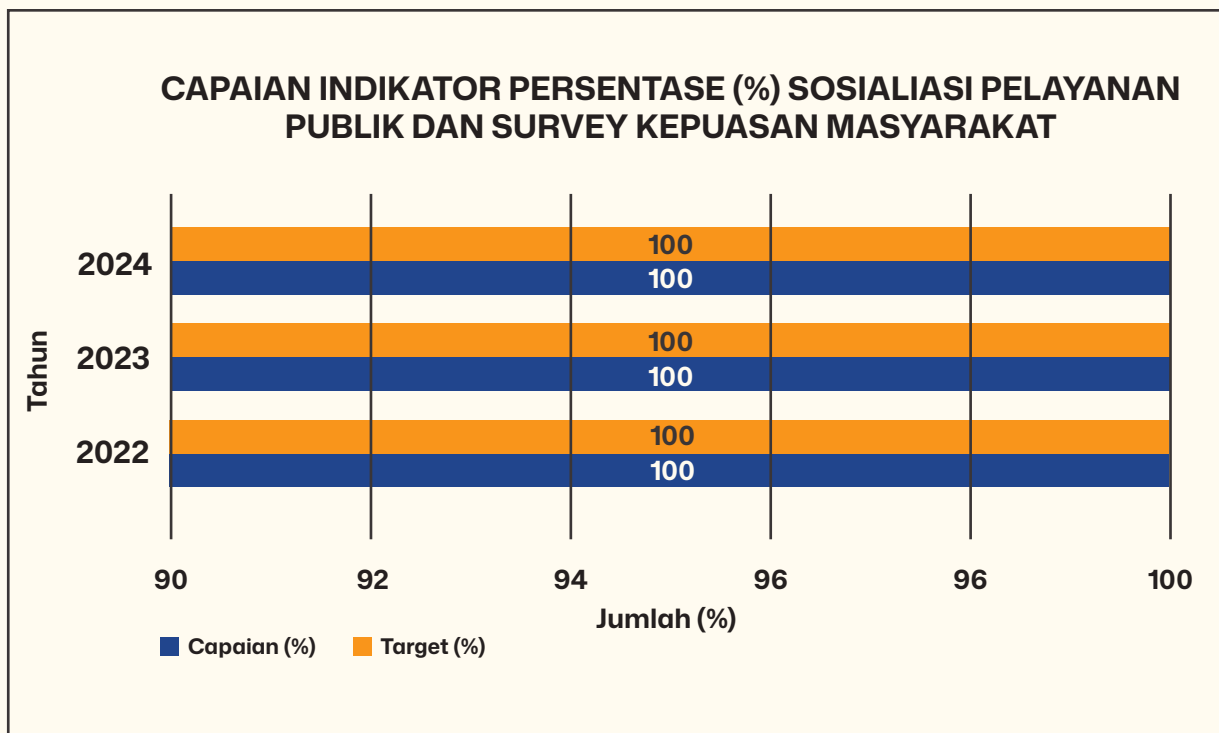
100%

CAPAIAN

100%

PERSENTASE

100%





Sosialisasi Pelayanan Publik

Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik secara tatap muka antara lain sebagai berikut:

- Sosialisasi pertama pada tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 dengan mengangkat tema “Sosialisasi PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika”. Sosialisasi ini dihadiri operator seluler, TV siaran, radio siaran, dan penyedia layanan internet di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sosialisasi kedua pada tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan mengangkat tema “Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum sebagai Sosialisasi PP Nomor 43 Tahun 2023”. Sosialisasi ini dihadiri oleh pengguna radio konvensional di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sosialisasi ketiga pada tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 dengan mengangkat tema “Ayo Tertib Frekuensi Radio” sebagai Sosialisasi Tertib Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Sosialisasi ini dihadiri pengguna frekuensi radio di kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan Kawasan Industri Makassar.

Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

Semester	Target Wilayah Sosialisasi		Jumlah Kehadiran		Persentase Capaian (%) (merujuk ke PK)	Nilai Sosialisasi (merujuk ke PK)
	Kabupaten / Kota	50% Wilayah	Peserta (Min. 30 Peserta)	Wilayah (Kabupaten / Kota)		
1	24	12	155	13	108%	100%

Survei Kepuasan Masyarakat - Pelaksanaan Survei IKM dan IIPP

No	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Responden (minimal 30 responden)			Hasil Survei		Nilai Capaian (%) (merujuk ke PK)
	Bulan	Sampai	ISR	SOR	Total	IKM (skala 4)	IIPP (skala 4)	
1	Januari	Juni	71	99	170	3.66	3.61	100%
2	Juli	Desember	56	127	183	3.71	3.69	100%



Berikut adalah hasil penilaian berdasarkan survei kepuasan masyarakat selama tahun 2024:

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 3,69 dalam skala 4 dengan target 3,2 dalam skala 4.
- Nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) tercapai 3,65 dalam skala 4 dengan target 3,6 dalam skala 4.
- Pada Gambar 3.17 di bawah diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) berdasarkan hasil survei dari kedua semester pada tahun 2024 beserta nilai masing-masing kategori.



Capaian responden untuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tahun 2024 dengan total 353 (tiga ratus lima puluh tiga) responden yang terdiri dari Penerima Layanan ISR, Penerima Layanan SOR, dan Mitra Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.

Pada gambar di bawah capaian responden survei kepuasan masyarakat berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir responden, serta jenis layanan yang diterima oleh responden.





Berdasarkan nilai IKM dan IIPP yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa capaian target kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terpenuhi 100%.

Berdasarkan capaian target kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik terpenuhi 100% dan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terpenuhi 100%, dapat disimpulkan capaian target kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat terpenuhi 100%.

ANALISIS & DAMPAK

Tahun 2024 Balmon Makassar memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,69 (skala 4), hal ini menunjukkan bahwa Balmon Makassar telah memberikan pelayanan dengan mutu yang sangat baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang dibuktikan dengan nilai IKM yang sangat baik.

Sedangkan untuk Nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik, Balmon Makassar memperoleh nilai sebesar 3,65 (skala 4), indikator tertinggi pada penilaian ini ada pada 3 kategori yaitu, penerimaan imbalan, percaloan/perantara tidak resmi, dan pungutan liar (pungli), dengan nilai masing-masing sebesar 3,66. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Balmon Makassar kepada masyarakat dinilai bersih dan jauh dari hal-hal yang menyimpang. Ini juga memperkuat budaya kerja yang jujur dan beretika serta meningkatkan legitimasi publik terhadap hasil pelayanan.

Adapun data dari IKM dan IIPP menjadi bahan umpan balik dalam perbaikan keberlanjutan terhadap mutu pelayanan publik Balmon Makassar, memungkinkan penyusunan program kerja tahun berikutnya yang lebih terarah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sosialisasi dilakukan di wilayah yang strategis dan berbeda dengan tahun sebelumnya, menjangkau pengguna layanan dari berbagai sektor antara lain operator seluler, penyiaran, radio konvensional, hingga bandara dan kawasan industri.

Dampak dari capaian ini terlihat pada meningkatnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait terhadap regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio, yang berujung pada kepatuhan lebih tinggi terhadap perizinan dan spesifikasi teknis. Kepercayaan publik terhadap kinerja Balmon Makassar juga semakin kuat berkat pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas praktik menyimpang. Kondisi ini turut memastikan kelancaran layanan pada sektor vital seperti penerbangan, maritim, pertahanan, dan layanan darurat, sehingga operasional komunikasi di wilayah kerja tetap aman dan bebas dari gangguan.



Keberhasilan capaian kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat sepanjang tahun 2024 yang mencapai target 100% didukung oleh faktor-faktor yang di antaranya sebagai berikut

- Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 3 (tiga) kali dengan merencanakan kegiatan berdasar pada tema kegiatan yang telah ditentukan dengan penyusunan yang baik.
- Penentuan lokasi wilayah layanan yang tepat dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga informasi terkait peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio diterima masyarakat, instansi dan stakeholder secara merata di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pendataan calon peserta undangan sosialisasi secara selektif sehingga tidak terjadi pengulangan peserta sosialisasi yang sama dan sesuai target.
- Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan yang memadai dan inklusif

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk peningkatan indikator Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, antara lain:

- Meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan tahun lalu.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan inklusif.
- Secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan.
- Memberikan informasi terkait layanan yang diberikan oleh Balmon Makassar secara rutin, baik melalui platform media sosial maupun melalui sosialisasi atau bimbingan teknis.

EFISIENSI

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik melalui aplikasi survei disediakan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya dengan mengakses barcode. Pelaksanaan survei dengan sistem online dapat menghemat biaya, data survei dapat langsung diakses dengan mudah, dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengisian survei.

Implementasi sosialisasi pelayanan publik yang efisien mencakup pendataan calon peserta undangan sosialisasi secara selektif sehingga tidak terjadi pengulangan peserta sosialisasi yang sama.

INDIKATOR KINERJA

SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT



BERORIENTASI PELAYANAN

Personil Balmon Makassar melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dengan pelayanan ramah, cepat, responsif, sesuai standar yang berlaku



AKUNTABEL

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) disusun, dilaporkan, dan dipublikasikan secara transparan tanpa intervensi



KOMPETEN

Tim kerja kompeten melaksanakan sosialisasi dan survei secara efektif, menyajikan informasi akurat dan lengkap berdasarkan data dan regulasi yang berlaku



HARMONIS

Personil menjaga hubungan harmonis dengan pengguna frekuensi, pemohon layanan, dan rekan kerja di lingkungan Balmon Makassar



LOYAL

Setiap personil mematuhi etika dan kode etik organisasi, serta melaksanakan pelayanan publik secara jujur, adil, dan konsisten



ADAPTIF

Personil sigap menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan, serta menindaklanjuti hasil survei untuk meningkatkan kualitas layanan



KOLABORATIF

Balmon Makassar berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk narasumber dan instansi terkait, dalam kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat



Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC

Latar Belakang : Komunikasi radio merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keselamatan dan kelancaran pelayaran, terkhusus untuk para nelayan. Penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat menyebabkan gangguan komunikasi dan menurunkan efektivitas sistem keselamatan pelayaran.

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) menjadi acuan standar komunikasi keselamatan maritim. Sistem ini memungkinkan kapal untuk melakukan komunikasi darurat dan koordinasi keselamatan dengan lebih andal. Namun, masih banyak nelayan dan operator radio maritim yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penggunaan perangkat komunikasi radio laut secara benar dan sesuai regulasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC untuk Sertifikasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) non Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang mencakup Short Range Certificate (SRC) dan Long Range Certificate (LRC).

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC, diharapkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tepat, tertib, dan sesuai dengan standar keselamatan serta regulasi yang telah ditetapkan, sehingga tercipta komunikasi maritim yang efektif dan aman.

Capaian Kinerja : Sasaran dari kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC adalah nelayan, nakhoda, atau awak kapal yang belum memiliki Sertifikasi Operator Radio (SOR) untuk mengoperasikan alat komunikasi radio antar kapal maupun antar stasiun radio pantai.

Capaian Indikator Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC Tahun 2024

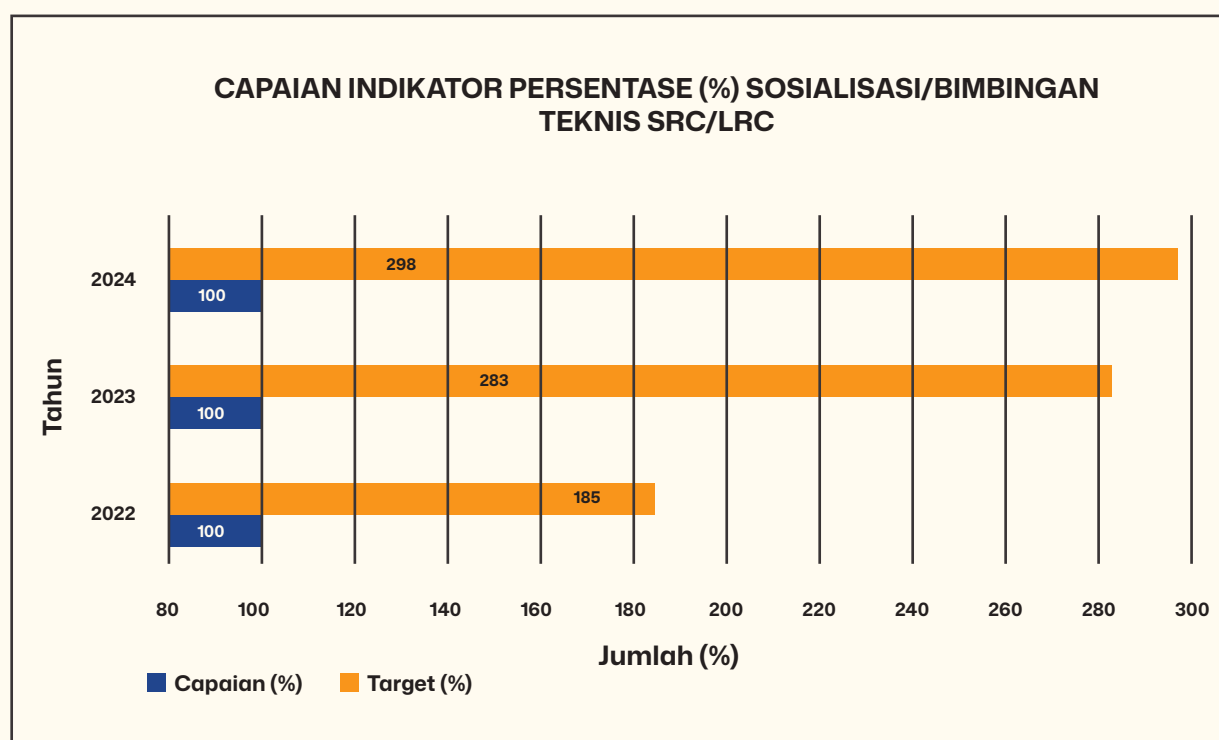
KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC

TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
100%	298%	298%



Kegiatan Bimbingan Teknis SOR SRC/LRC pada tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dengan rincian sebagai berikut:

Semester	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta Bimtek	Penerbitan Sertifikasi SRC-LRC	Target	Persentase Capaian (%)
	Dari	Sampai				
1	Januari	Juni	200	200	100	200%
2	Juli	Desember	98	98		98%
Jumlah			298	298		298%

Sepanjang tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah menyelenggarakan tiga kali kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) untuk SRC/LRC yang dilaksanakan di tiga lokasi berbeda, yaitu sebagai berikut:

- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SOR Non SOLAS tahap I, dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 di Terminal Pembekalan Angkutan TNI AD Kota Makassar; dengan sertifikat yang diterbitkan dan dicetak untuk peserta adalah Long Range Certificate (LRC) sebanyak 100 sertifikat.
- Sosialisasi/Bimbingan Teknis SOR Non SOLAS tahap II, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 di PPI Lero Kabupaten Pinrang; dengan sertifikat yang diterbitkan dan dicetak untuk peserta adalah Long Range Certificate (LRC) sebanyak 100 sertifikat.
- Sosialisasi/Bimbingan Teknis SOR Non SOLAS tahap III, dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 di PPI Kajang Kabupaten Bulukumba; dengan sertifikat yang diterbitkan dan dicetak untuk peserta adalah Long Range Certificate (LRC) sebanyak 68 sertifikat dan Short Range Certificate (SRC) sebanyak 30 sertifikat.



ANALISIS & DAMPAK

Tahun 2024, Balmon Makassar mampu mencapai nilai kinerja di atas target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 298% dari target 100% yang ditetapkan.

Pelaksanaan bimbingan teknis di 3 lokasi yang berbeda menunjukkan strategi penyebaran kegiatan secara terdesentralisasi dan inklusif. Pendekatan ini memperluas jangkauan layanan hingga ke nelayan dan awak kapal di wilayah pesisir dan pelabuhan kecil.

Sertifikasi SOR SRC/LRC menandai bahwa peserta telah mengikuti pelatihan resmi sesuai ketentuan, terutama untuk kapal non-SOLAS. Sertifikasi yang diberikan meningkatkan kompetensi teknis pengguna radio maritim, kesesuaian penggunaan perangkat dengan standar GMDSS, dan yang tak kalah penting yaitu kesiapan menghadapi kondisi darurat di laut. Ini jelas berdampak pada komunikasi antar kapal dan antar kapal dengan stasiun pantai menjadi lebih andal, tertib, dan aman, sehingga menurunkan risiko kecelakaan laut akibat kesalahan komunikasi.

Dengan penerbitan sertifikat ini mendukung upaya pemerintah dalam memastikan bahwa operator radio telah memahami batasan, kode etik, dan tata cara penggunaan frekuensi maritim, serta tidak menggunakan frekuensi secara sembarangan atau mengganggu saluran darurat. Dengan begitu dapat melahirkan SDM maritim yang lebih profesional, disiplin, dan siap siaga, sejalan dengan tujuan peningkatan mutu pelayaran nasional.

Keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC didukung oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi secara berkala: Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali bimbingan teknis dan sertifikasi yang mempermudah akses bagi calon operator radio.
- Kesadaran dan kebutuhan meningkat: Seiring dengan peraturan dan persyaratan keselamatan pelayaran, banyak pelaut dan awak kapal yang semakin sadar akan pentingnya memiliki sertifikat operator radio.
- Sosialisasi yang efektif: Kampanye edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi frekuensi radio telah berjalan dengan baik.
- Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah: Adanya kebijakan yang mendorong kewajiban sertifikasi bagi operator radio di sektor pelayaran.



TINDAK LANJUT

Setelah pelaksanaan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC, Balmon Makassar rutin melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Balmon Makassar juga rutin melakukan kunjungan ke pelabuhan-pelabuhan untuk melakukan komunikasi dengan para nelayan serta operator kapal dan para instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Balmon Makassar juga bekerja sama dengan lembaga maritim internasional, agar standar sertifikasi tetap sesuai dengan regulasi global serta mengembangkan sistem sertifikasi digital, sehingga proses administrasi dan verifikasi sertifikat lebih cepat dan transparan.

EFISIENSI

Dalam upaya mencapai target indikator Bimbingan Teknis SRC/LRC, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah berhasil menerapkan berbagai strategi efisiensi sumber daya, khususnya pada sumber daya manusia dan biaya pelaksanaan.

Untuk memastikan bahwa seluruh materi tersampaikan secara maksimal, Balmon Makassar menyiapkan pemateri yang berkompeten dan memiliki sertifikat ToT yang berasal dari internal Balmon Makassar.

INDIKATOR KINERJA

SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS SRC/LRC



BERORIENTASI PELAYANAN

Balmon Makassar memberikan pelayanan ramah dan responsif kepada nelayan serta pengurus izin kapal, termasuk bimbingan teknis SRC/LRC dan evaluasi berkelanjutan



AKUNTABEL

Petugas melaksanakan Bimtek SRC/LRC dengan disiplin, jujur, dan transparan, serta memastikan penggunaan sarana prasarana secara efisien dan bertanggung jawab



KOMPETEN

Petugas terus meningkatkan kemampuan teknis, administrasi, dan komunikasi untuk mendukung kelancaran Bimtek SRC/LRC



HARMONIS

Pelayanan Bimtek diberikan dengan ramah, jelas, dan mudah dipahami tanpa membedakan latar belakang peserta



LOYAL

Petugas menunjukkan loyalitas dengan menjaga nama baik instansi melalui pelaksanaan Bimtek SRC/LRC yang konsisten, terjadwal rapi, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan



ADAPTIF

Petugas tanggap terhadap perubahan dan siap menjawab kebutuhan nelayan terkait penggunaan perangkat komunikasi radio



KOLABORATIF

Balmon Makassar bekerja sama dengan instansi pelabuhan dan pihak terkait untuk mendorong nelayan mengikuti Bimtek SRC/LRC serta tertib menggunakan frekuensi maritim



Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

Latar Belakang : Kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) diselenggarakan sebagai bentuk upaya konkret untuk meminimalisasi terjadinya gangguan atau interferensi pada frekuensi dinas penerbangan, khususnya di pita HF (High Frequency). Gangguan tersebut diketahui berasal dari penggunaan perangkat komunikasi ilegal oleh sejumlah nelayan yang tidak sesuai peruntukannya. Fenomena ini tidak hanya membahayakan keselamatan penerbangan, namun juga mengindikasikan rendahnya kesadaran penggunaan spektrum frekuensi secara tertib dan sesuai regulasi.

Melalui kegiatan MOTS-IKRAN, diharapkan para nelayan dapat diarahkan untuk menggunakan perangkat komunikasi yang sesuai standar maritim. Penggunaan perangkat maritim standar tidak hanya mendukung tertib frekuensi, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional nelayan saat melaut. Salah satu frekuensi yang diperkenalkan dalam kegiatan ini adalah frekuensi IKRAN (Ikatan Komunikasi Radio Nelayan), yang ditujukan khusus untuk komunikasi antar nelayan di laut.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi solusi teknis terhadap interferensi, tetapi juga merupakan bentuk edukasi dan pembinaan kepada komunitas nelayan agar lebih memahami pentingnya penggunaan alat komunikasi yang sah dan aman. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tertib spektrum frekuensi radio serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Capaian Kinerja : Sasaran utama dari kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) adalah para nelayan yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) untuk perangkat radio komunikasi maritim standar yang mereka gunakan. Selain itu, kegiatan ini juga menargetkan nelayan yang masih menggunakan perangkat radio jenis All Band, yaitu perangkat yang dapat menjangkau berbagai frekuensi tanpa batasan, termasuk frekuensi yang bukan untuk keperluan maritim. Penggunaan perangkat semacam ini berpotensi besar menimbulkan gangguan pada layanan radio lain yang bersifat vital, seperti frekuensi penerbangan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penertiban. Tak hanya terbatas pada kapal nelayan, kegiatan MOTS juga menyasar kapal-kapal non-perikanan yang belum memiliki izin resmi atau sedang dalam proses pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) maritim. Dengan pendekatan langsung di lapangan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran pemilik kapal akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan frekuensi radio, serta mendorong percepatan legalisasi perangkat komunikasi yang digunakan di laut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban spektrum frekuensi serta meningkatkan keselamatan pelayaran secara menyeluruh.



Capaian Indikator Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN Tahun 2024

KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

TARGET

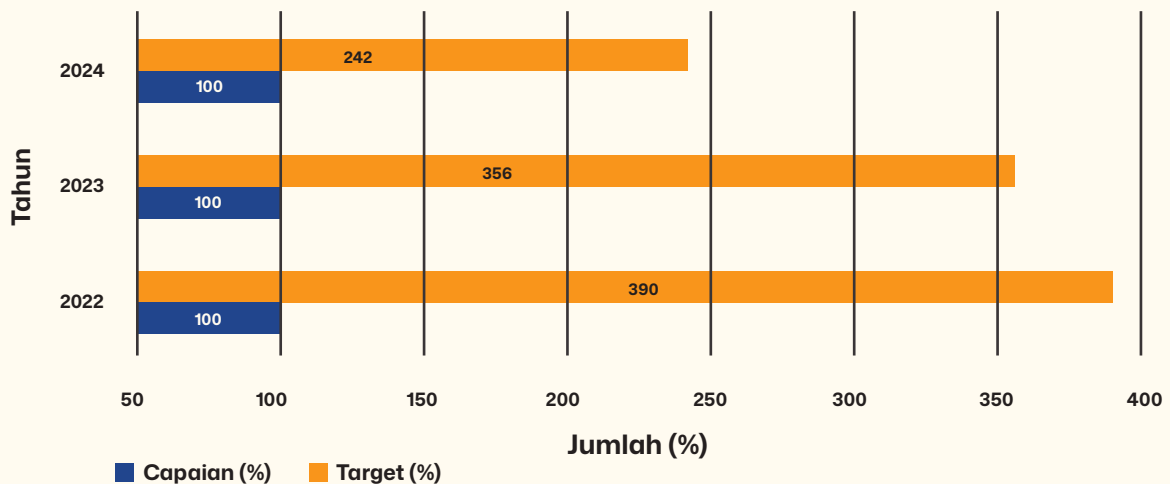
100%

CAPAIAN

242%

PERSENTASE

242%

CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE (%) ISR MARITIM NELAYAN
PROGRAM MOTS-IKRAN

Capaian ISR Maritim Nelayan dan IKRAN Program MOTS Tahun 2024

TW	Waktu Pelaksanaan		ISR dan IKRAN			% Capaian	
						(ISR+IKRAN)/Target	
	Dari	Sampai	ISR	IKRAN	Total	Target	
1	Januari	Maret	5	0	5	100	5%
2	April	Juni	11	88	99		99%
3	Juli	September	8	100	108		108%
4	Oktober	Desember	14	16	30		30%
Jumlah			38	204	242		242%



Tahun 2024 Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melakukan pembukaan Loker MOTS di Pelabuhan Rakyat Paotere Kota Makassar yang dibuka selama 12 bulan, mulai dari bulan Januari s.d. bulan Desember 2024. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Maritime On The Spot (MOTS) pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Tahun 2024 meliputi ISR Maritim dan/atau IKRAN, maka diperoleh hasil capaian 38 ISR Maritim dan 204 IKRAN.

ANALISIS & DAMPAK

Balmon Makassar berhasil mencapai indikator kinerja ISR Maritim Nelayan dan IKRAN Program MOTS melebihi target yang diberikan.

Penempatan layanan langsung di pusat aktivitas nelayan mempercepat akses dan meningkatkan partisipasi pengguna. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis SRC/LRC yang dilaksanakan oleh Balmon Makassar terutama pada triwulan 3 dan 4 mendorong pengguna untuk memanfaatkan layanan ISR dan IKRAN secara aktif, serta Kemampuan tim pelaksana untuk menyesuaikan jadwal kegiatan dengan kondisi lapangan (cuaca, musim nelayan, dan mobilitas) mendorong optimalisasi layanan di waktu-waktu tertentu. Balmon Makassar juga menerapkan sistem jemput bola dengan konsep Maritime On The Spot terbukti efektif mendekatkan layanan kepada masyarakat pengguna frekuensi di sektor maritim. Melalui kegiatan ini, berdampak langsung terhadap ketertiban spektrum frekuensi radio dengan menurunkan risiko interferensi terhadap frekuensi kritis seperti pita HF yang digunakan penerbangan, dan dalam keselamatan pelayaran karena penggunaan perangkat komunikasi sesuai standar maritim (ISR dan IKRAN) mendukung koordinasi lebih cepat dan tepat di laut.

TINDAK LANJUT

Balmon Makassar rutin melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dan pengembangan fitur tambahan untuk mendukung keselamatan nelayan

EFISIENSI

Program MOTS-IKRAN berhasil meningkatkan efisiensi layanan melalui beberapa hal berikut:

- Pendekatan Jemput Bola (on the spot), Pelayanan langsung di pelabuhan nelayan meminimalisasi waktu tempuh dan biaya bagi pengguna untuk mengakses layanan ISR dan IKRAN.
- Pemanfaatan Loker Strategis, Lokasi layanan ditempatkan di pusat aktivitas maritim (seperti Pelabuhan Paotere), sehingga mendekatkan layanan dengan sasaran dan meningkatkan volume layanan secara optimal.
- Integrasi Kegiatan ISR dan IKRAN, Penggabungan kedua jenis layanan dalam satu kegiatan lapangan mempercepat proses pelayanan dan menekan kebutuhan sumber daya tambahan.

INDIKATOR KINERJA

ISR MARITIM NELAYAN PROGRAM MOTS-IKRAN



BERORIENTASI PELAYANAN

Balmon Makassar menghadirkan layanan langsung di lapangan melalui loket MOTS memastikan nelayan dan pengguna layanan memperoleh kemudahan akses serta solusi sesuai kebutuhan.



AKUNTABEL

Petugas MOTS memastikan setiap proses pelayanan terdokumentasi rapi dan akurat sebagai wujud integritas.



KOMPETEN

Balmon Makassar menyelenggarakan pelatihan dan Bimtek bagi nelayan dan operator kapal tentang penggunaan frekuensi maritim yang sah dan bersertifikasi.



HARMONIS

Layanan dibangun melalui koordinasi aktif dengan masyarakat nelayan dan pihak pelabuhan dalam suasana saling menghargai.



LOYAL

Petugas tetap memberikan pelayanan terbaik meski di lokasi terpencil dengan kondisi lapangan yang menantang.



ADAPTIF

Pelayanan MOTS menyesuaikan waktu dan tempat sesuai kebutuhan, termasuk langsung di pelabuhan rakyat.



KOLABORATIF

Program MOTS terlaksana berkat dukungan pemerintah daerah, pelabuhan, dan kelompok nelayan.



Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR

Latar Belakang : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Direktorat Operasi Sumber Daya telah menambahkan indikator kinerja UPT Tahun 2024 terkait verifikasi data koordinat site ISR yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data koordinat stasiun radio yang tercantum dalam ISR dengan kondisi riil di lapangan. Output dari kegiatan ini selain pemutakhiran data koordinat pada SIMS juga tersedianya referensi site koordinat yang akan dijadikan acuan dalam permohonan ISR di lokasi existing. Kegiatan verifikasi data koordinat site ISR ini merupakan bagian dari program Prima Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) sebagai solusi perizinan melalui pembenahan data dan bisnis proses ISR yang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Program Prima Aksi pada tahun 2024 ini akan dilakukan dengan konsep baru, dimana data yang dihasilkan dari kegiatan verifikasi data koordinat site oleh UPT akan menjadi salah satu data input dalam konsep baru tersebut.

Untuk tahun 2024, kegiatan verifikasi data koordinat site ISR mencakup ISR Microwave Link dan Penyiaran secara nasional. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi data koordinat site ISR mengacu pada Keputusan Dirjen DJID No. 108 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembenahan Data Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Komunikasi Radio Dari Titik Ke Titik (Point to Point) Dan Penyiaran.

Capaian Kinerja : Target verifikasi data koordinat Tahun 2024 adalah 40% Kab/kota atau n Kab/Kota dari 40% populasi ISR. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Prima Aksi terhadap 8 Kab/ Kota (42.75% ISR) dan untuk tahun 2024 target pelaksanaan kegiatan Prima Aksi di 11 Kab/Kota (44.98% ISR) dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

JUMLAH KAB/KOTA	POPULASI ISR (%)	NAMA KAB/KOTA	WAKTU
11	44.98	GOWA	JAN - MAR 2024
		TAKALAR	
		BANTAENG	
		SINJAI	APRIL - JUNI 2024
		BONE	
		SELAYAR	
		BARRU	
		PANGKEP	JULI - SEPT 2024
		WAJO	
		LUWU TIMUR	OKT - DES 2024



Capaian Indikator Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Tahun 2024

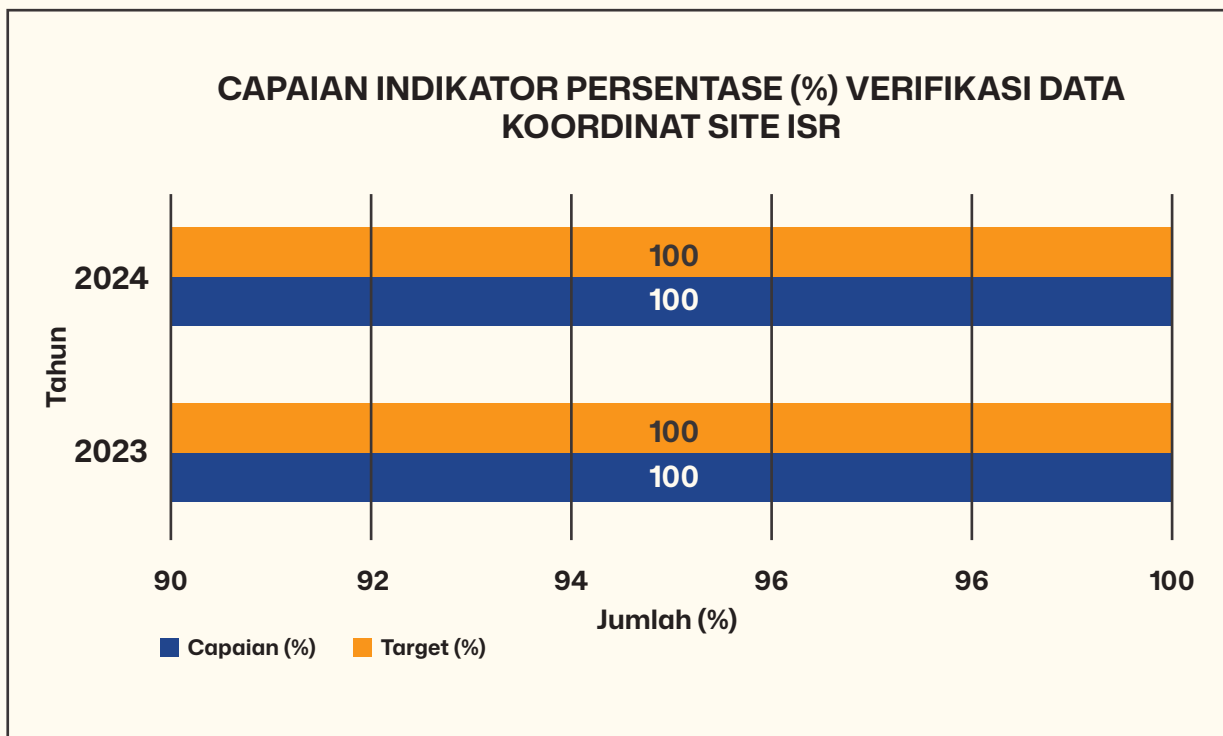
KINERJA

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR

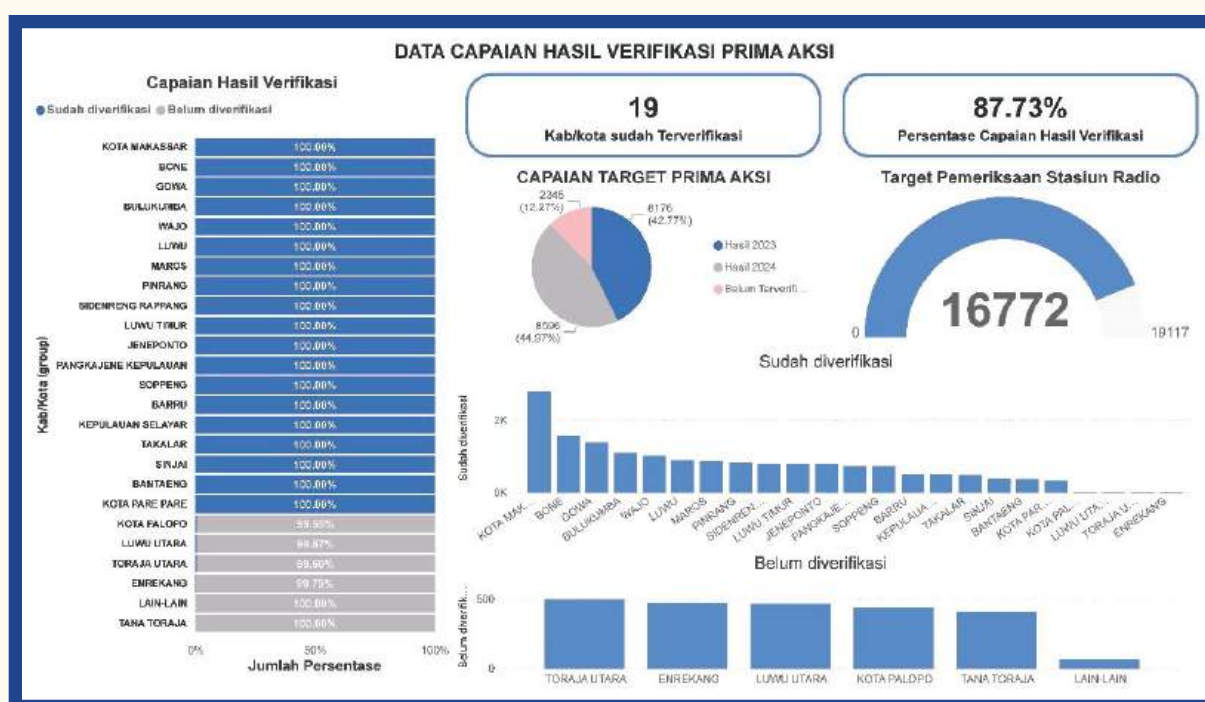
TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
100%	100%	100%





Balai Monitor SFR Kelas I Makassar mampu mencapai target kinerja pada triwulan 3 dengan perincian Capaian Kinerja sebagai berikut:

Jumlah Kab/Kota	Populasi ISR	Nama Kab/Kota	Persentase Capaian
3	11,7% (100% Kab/Kota)	Gowa	27,27%
		Takalar	
		Bantaeng	
3	12,82% (100% Kab/Kota)	Sinjai	27,27%
		Bone	
		Selayar	
5	20,46% (100% Kab/Kota)	Barru	45,45%
		Pangkep	
		Wajo	
		Luwu Timur	
		Luwu	
Total Capaian			100%



Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar memiliki 19.117 ISR pada dinas tetap (MW Link) dan penyiaran yang menjadi target dalam kegiatan verifikasi koordinat (Prima Aksi). Selama 2 tahun pelaksanaan kegiatan ini, telah diverifikasi 16.772 ISR (87.73%) dengan jumlah kabupaten sebanyak 19 Kabupaten/Kota. Masih terdapat 5 Kab/kota yang belum dilakukan verifikasi koordinat.



ANALISIS & DAMPAK

Capaian kinerja verifikasi data koordinat site ISR tahun 2024 yang berhasil memenuhi target 100% memberikan kontribusi signifikan terhadap ketertiban administrasi dan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Makassar. Validasi data koordinat aktual memperkuat integritas data ISR dan membantu menghindari tumpang tindih spektrum frekuensi antar pengguna, meningkatkan kemampuan sistem untuk mendeteksi interferensi atau pelanggaran secara lebih akurat dan berbasis spasial, serta menurunkan risiko kesalahan teknis dalam proses perizinan karena posisi site sudah tervalidasi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Akurasi data koordinat yang terverifikasi pada ISR MW Link dan penyiaran memastikan kesesuaian antara perizinan dan kondisi lapangan, sehingga meminimalkan potensi gangguan layanan. Data yang telah dimutakhirkan menjadi acuan valid bagi proses perizinan di lokasi existing, mempercepat layanan, dan mengurangi risiko kesalahan teknis. Dampaknya, operator dan penyelenggara penyiaran dapat mengoptimalkan infrastruktur komunikasi secara tepat lokasi, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari layanan komunikasi dan penyiaran yang lebih andal, tertib, dan sesuai ketentuan.

Beberapa faktor keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio antara lain:

- Personel yang terlibat dalam kegiatan verifikasi data koordinat MW Link dan Penyiaran (QR code site) telah memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai. Personel telah dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup, serta memahami standar dan regulasi yang berlaku.
- Kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran sering kali melibatkan beberapa pihak terkait seperti operator, regulator, atau pemilik stasiun radio. Kolaborasi yang baik dengan pihak terkait dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan.
- Data dan informasi yang lengkap dapat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran yang meliputi: database SIMS/ISR, data koordinat site operator seluler dan penyelenggara penyiaran serta aplikasi peta pendukung (google earth / Gmaps).
- Strategi dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran meliputi: perencanaan kegiatan yang matang, persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran, pembagian personel, penentuan lokasi verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran, dan evaluasi kegiatan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa depan.



Kendala yang dihadapi dalam kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasional dan peraturan yang berlaku. Beberapa kendala umum yang sering dihadapi dalam kegiatan tersebut adalah:

- Kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan, seperti data perizinan atau akses ke data frekuensi radio pengguna atau penyelenggara.
- Birokrasi yang panjang dalam melakukan koordinasi dengan pengguna atau penyelenggara.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait, seperti operator stasiun radio dan regulator, akan membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang berkaitan dengan data dan perizinan, agar dapat dicapai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang muncul.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran:

- A. Melakukan evaluasi kinerja verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran telah efektif dilaksanakan.
- B. Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada proses verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran, kemudian melakukan langkah-langkah mitigasi dalam menyelesaikan dan mencegah permasalahan agar kejadiannya tidak berulang.
- C. Melaksanakan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Tindakan perbaikan berupa perubahan proses bisnis pelaksanaan kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran serta penyesuaian jumlah personel dan peralatan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio.

EFISIENSI

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran, dilakukan beberapa cara berikut:

- Personel yang terlibat dalam kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran telah diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Pelatihan juga dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas.



- Sistem analysis on desk/deskwork analysis dalam kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran lebih efisien daripada pemeriksaan langsung oleh personel di lapangan. Sistem analysis on desk/deskwork analysis juga dapat membantu mengidentifikasi kesesuaian titik koordinat stasiun radio secara lebih akurat.
- Koordinasi dengan stakeholder terkait seperti regulator, operator dan penyelenggara telekomunikasi dapat membantu memastikan kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisasi overlapping dan mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran.

Dengan menerapkan beberapa cara di atas, maka efisiensi dari sisi sumber daya manusia dan efisiensi waktu pelaksanaan dalam pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio telah tercapai.



INDIKATOR KINERJA

VERIFIKASI DATA KOORDINAT SITE ISR



BERORIENTASI PELAYANAN

Personel mengutamakan kepentingan masyarakat dalam verifikasi koordinat site MW Link dan Penyiaran, dengan memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi pengguna layanan.



AKUNTABEL

Setiap hasil verifikasi dilaksanakan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud integritas.



KOMPETEN

Personel menguasai teknologi dan metode verifikasi terbaru, serta mampu menyelesaikan permasalahan koordinat MW Link dan Penyiaran dengan tepat.



HARMONIS

Personel menjaga hubungan baik dengan masyarakat, pemilik stasiun radio, dan rekan kerja, sehingga tercipta kerja sama yang sehat dan saling menghargai.



LOYAL

Personel patuh pada aturan dan kode etik profesi, serta menghindari konflik kepentingan dalam setiap pelaksanaan verifikasi.



ADAPTIF

Personel cepat menyesuaikan diri dengan situasi lapangan dan siap mengubah strategi kerja sesuai kebutuhan dan dinamika yang ada.



KOLABORATIF

Personel membangun kerja sama positif dengan tim, masyarakat, dan pemilik stasiun radio untuk mendukung kelancaran proses verifikasi.



Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien Nilai Kinerja Anggaran UPT Makassar Tahun 2024

Latar Belakang : Pelaksanaan layanan administrasi yang efektif sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Balmon Makassar mengelola layanan administrasi yang terbagi dalam beberapa bagian, antara lain:

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Pengelolaan Anggaran
- Pengelolaan Barang Milik Negara
- Pengelolaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Persuratan

Capaian Kinerja : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA yang saat ini telah terintegrasi pada Aplikasi OM-SPAN dan digunakan oleh satker K/L diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dari sisi teknis administratif pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran mengukur kinerja pelaksanaan anggaran, yang mencakup berbagai aspek seperti penyerapan anggaran, capaian output, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai Kinerja anggaran juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu unit kerja atau instansi berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Perhitungan capaian NKA pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dihitung dengan mengombinasikan dua komponen utama, yaitu Nilai Capaian IKPA dan Nilai SMART DJA masing-masing dengan bobot 50% yang mengacu pada standar Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah (Kemenkeu-Wide) tahun 2024. Untuk mencapai nilai capaian yang sesuai dengan target, maka perlu adanya perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi anggaran yang efektif.



Capaian Kinerja Indikator Nilai Anggaran UPT Tahun 2024

KINERJA

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

INDIKATOR KINERJA

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI

TARGET

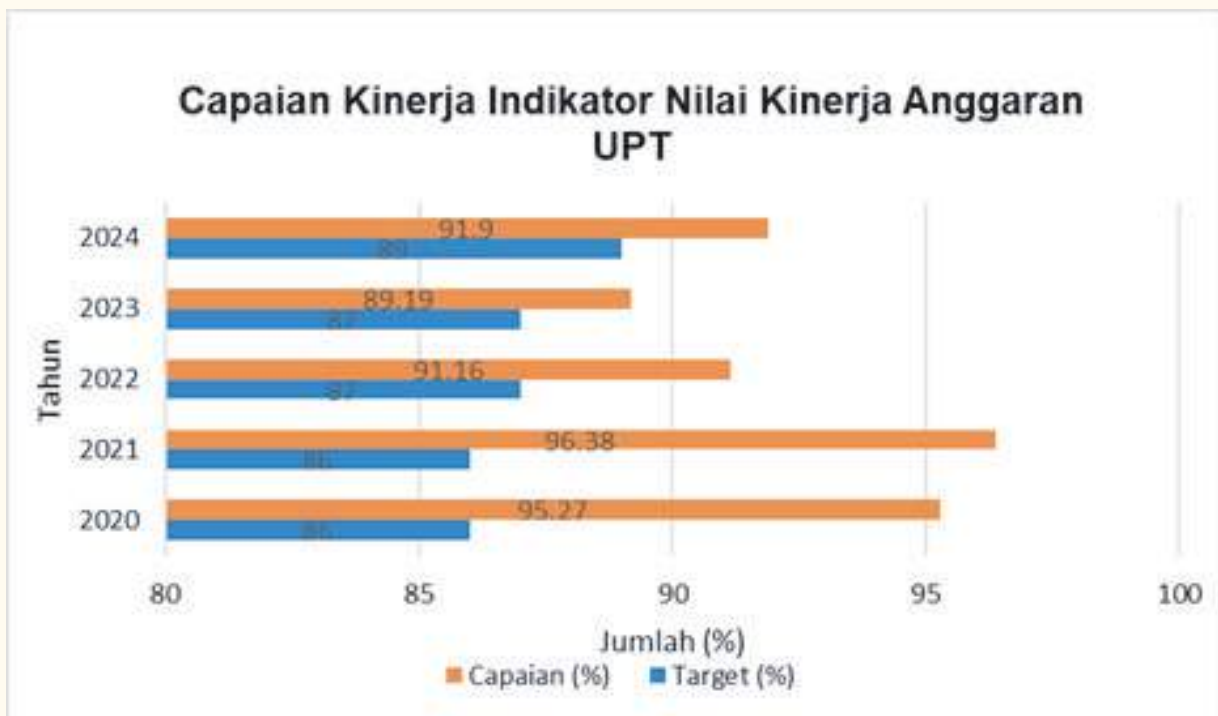
89%

CAPAIAN

91.90%

PERSENTASE

103,26%



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Role: Pilih TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 20 entri

Cari:

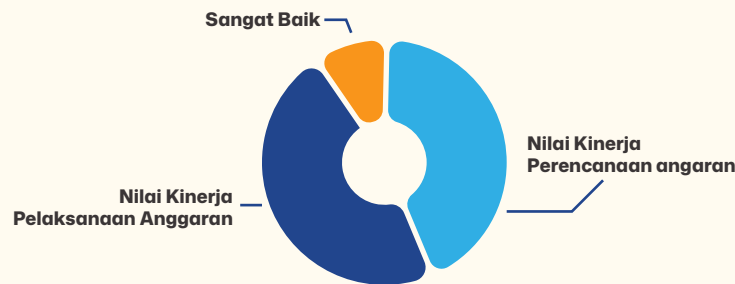
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	613626	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR	88,78	95,02	91,90

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



NILAI KINERJA ANGGARAN



Pada tahun 2024 target Nilai Kinerja Anggaran DJID ditetapkan sebesar 89. Nilai kinerja anggaran DJID diperoleh dari nilai capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 91,90 pada akhir tahun anggaran 2024 atau sebesar 103,25% dari target yang telah ditetapkan oleh Ditjen DJID yaitu sebesar 89. Pembobotan IKPA berdasarkan Kementerian Keuangan antara lain kualitas pelaksanaan anggaran yang meliputi revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, kualitas pelaksanaan anggaran yang meliputi penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang meliputi capaian output. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA yang saat ini telah terintegrasi pada Aplikasi OM-SPAN dan digunakan oleh satker K/L diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dari sisi teknis administratif pelaksanaan anggaran.

Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mencapai nilai kinerja anggaran Ditjen DJID akhir sebesar 91,90 atau sebesar 103,25% di atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan pengelolaan anggaran pada tahun 2024 dengan cukup baik, baik dari sisi perencanaan anggaran maupun efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai kinerja anggaran Ditjen DJID diperoleh dari perhitungan 50% capaian nilai IKPA Desember 2024 yaitu 95,02 sebesar 47,51 dan 50% capaian kinerja SMART DJA Desember 2024 yaitu 88,78 sebesar 44,39 sehingga diperoleh nilai kinerja anggaran UPT Balmon Makassar sebesar 91,90.



Nilai Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

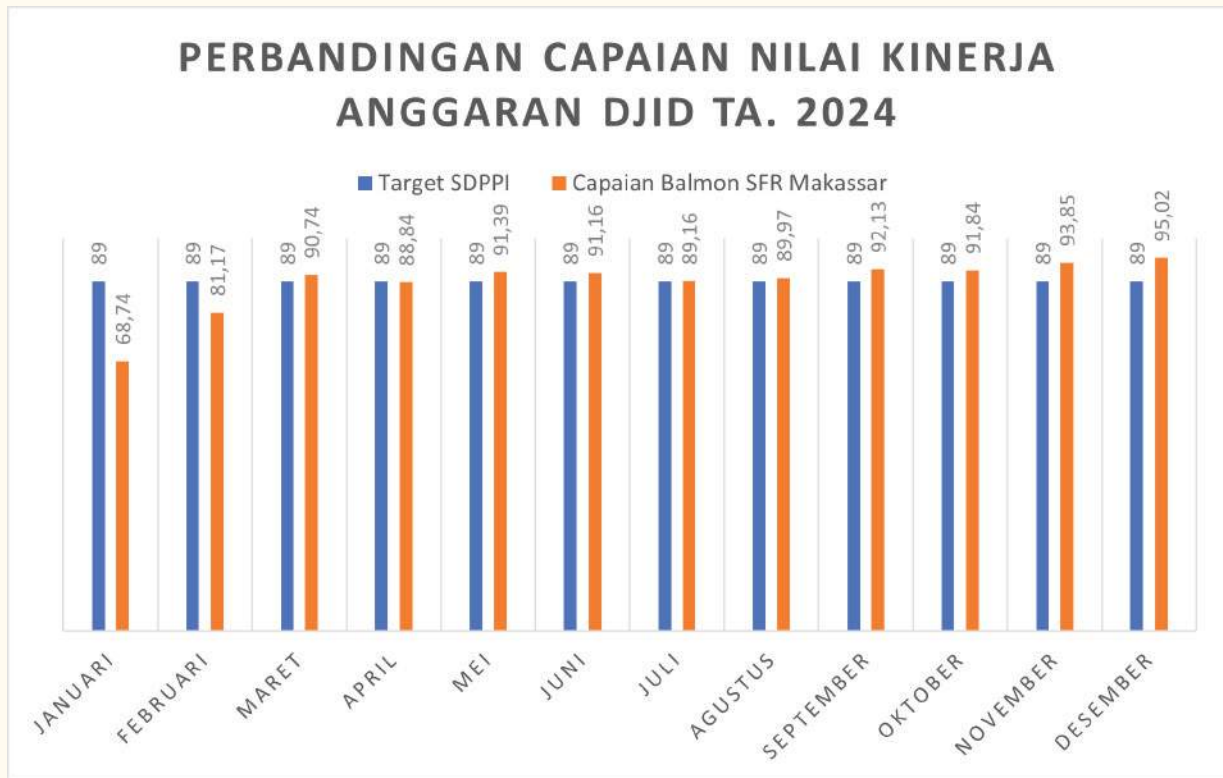
No.	Indikator	Sub Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10,00	91,83
		Deviasi Halaman III DIPA	83,66	10	12,55	
		Penyerapan Anggaran	90,78	20	18,16	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Belanja Kontraktual	95,33	10	9,53	95,98
		Penyelesaian Tagihan	100	10	10,00	
		Pengelolaan UP dan TUP	97,82	10	9,78	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25,00	100
Nilai Total			95,02			
Konversi Bobot			100%			
Dispensasi SPM (Pengurang)			0,00			
Nilai Akhir			95,02			

Grafik Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024





Berikut perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen DJID Tahun Anggaran 2024 yang dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selama tahun anggaran 2024 dengan target Nilai IKPA yang telah ditetapkan oleh DJID:

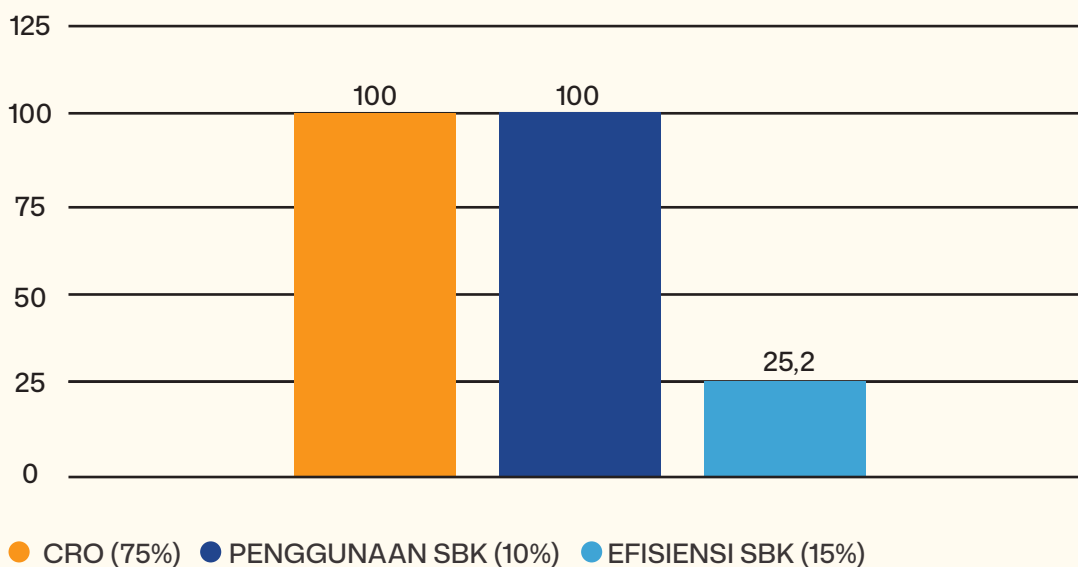


Nilai Capaian Kinerja SMART Tahun 2024

No.	Indikator	Nilai
1.	Capaian Rincian <i>Output</i> (CRO)	100
2.	Penggunaan SBK	100
3.	Efisiensi	25.20
Nilai Akhir		88,78



NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN



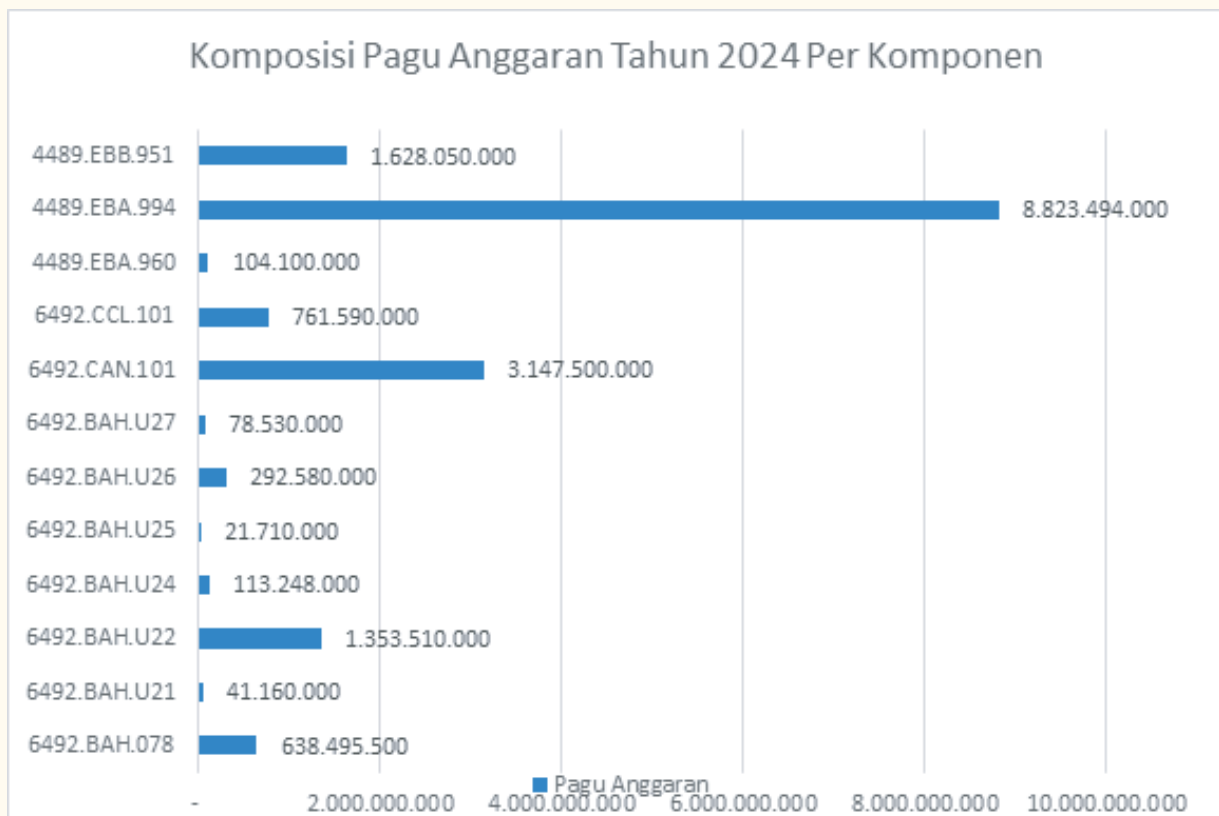
Pengelolaan Anggaran

Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mengelola pagu sebesar Rp. 22.750.427.000,- yang bersumber dari dua sumber dana, yaitu Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 6.043.932.000,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 16.706.495.000,- yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-059.03.2.613434/2024 tanggal 24 November 2023, dengan perincian sebagai berikut

No.	Kode Output	Uraian	Pagu	Target Kegiatan
1.	6492.BAH.078	Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT	Rp. 6.384.955.000,-	1 Layanan
2.	6492.BAH.U21	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi	Rp. 41.160.000,-	7 Layanan
3.	6492.BAH.U22	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi	Rp. 1.353.510.000,-	54 Layanan



4.	6492.BAH.U24	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sulawesi	Rp. 113.248.000,-	4 Layanan
5.	6492.BAH.U25	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi	Rp. 21.710.000,-	1 Layanan
6.	6492.BAH.U26	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi	Rp. 292.580.000,-	4 Layanan
7.	6492.BAH.U27	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Sungai/Laut Wilayah Sulawesi	Rp. 78.530.000,-	1 Layanan
8.	6492.CAN.101	Perangkat Monitoring UPT	Rp. 3.147.500.000,-	18 Unit
9.	6492.CCL.101	Pemeliharaan Alat Monitoring UPT	Rp. 761.590.000,-	1 Unit
10.	4489.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 104.100.000,-	1 Layanan
11.	4489.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp. 8.823.494.000,-	2 Layanan
15.	4489.EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 1.628.050.000,-	27 Unit
TOTAL PAGU			Rp. 22.750.427.000,-	





Selama tahun anggaran 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melakukan 17 (tujuh belas) kali revisi anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

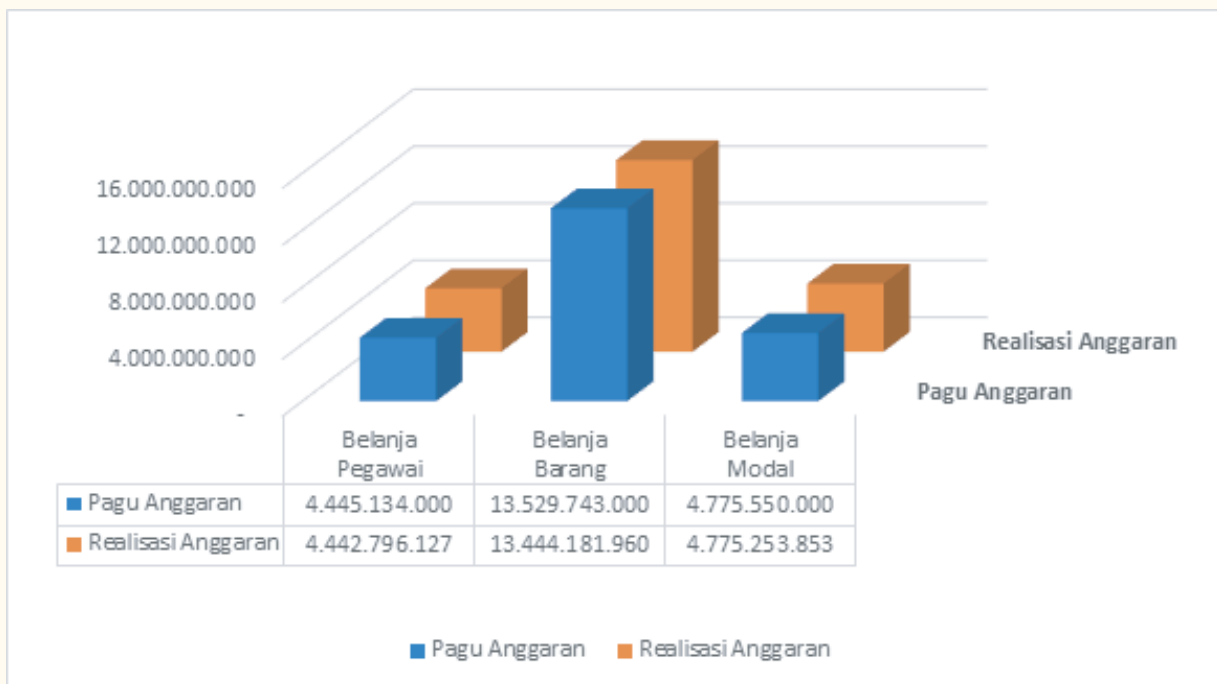
No.	Tanggal Revisi	Uraian
1.	24 Januari 2024	Revisi DJA terkait blokir <i>Automatic Adjustment</i> pada Belanja Pegawai sebesar Rp. 453.620.000,- .
2.	16 Februari 2024	Revisi Kanwil Triwulan I terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap Ralat Rencana Penarikan Dana Hal. III DIPA.
3.	22 Maret 2024	Revisi Pemutakhiran Data POK terkait pergeseran Gaji PPPK.
4.	23 April 2024	Revisi Kanwil Triwulan II terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap Ralat Rencana Penarikan Dana Hal. III DIPA.
5.	8 Juli 2024	Revisi DJA terkait Penambahan Pagu Anggaran.
6.	11 Juli 2024	Revisi Kanwil Triwulan III terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap Ralat Rencana Penarikan Dana Hal. III DIPA.
7.	29 Agustus 2024	Revisi DJA Penambahan Pagu Belanja Gaji
8.	21 September 2024	Revisi DJA terkait Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> .
9.	10 Oktober 2024	Revisi Kanwil Triwulan IV terkait Perubahan/Pergeseran Hal Pagu Tetap Ralat Rencana Penarikan Dana Hal. III DIPA.
10.	8 November 2024	Revisi DJA Pengurangan Pagu Belanja Pegawai.
11.	14 November 2024	Revisi Kanwil terkait Blokir Anggaran Perjalanan Dinas.
12.	22 November 2024	Revisi Kewenangan KPA terkait Pergeseran Dalam Hal Pagu Tetap.
13.	28 November 2024	Revisi Pemutakhiran Data POK Kewenangan KPA.
14.	4 Desember 2024	Revisi Pemutakhiran Data POK Kewenangan KPA.
15.	9 Desember 2024	Revisi Pemutakhiran Data POK Kewenangan KPA.
16.	10 Desember 2024	Revisi Kanwil terkait Penyelesaian Pagu Minus.
17.	13 Desember 2024	Revisi Pemutakhiran Data POK Kewenangan KPA.

Realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 22.662.231.940,- atau sebesar 99,61% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 22.750.427.000,-.



Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Uraian	2024		Persentase (%)
	Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp. 4.445.134.000	Rp. 4.442.796.127	99,95%
Belanja Barang	Rp. 13.529.743.000	Rp. 13.444.181.960	99,37%
Belanja Modal	Rp. 4.775.550.000	Rp. 4.775.253.853	99,99%
Total	Rp. 22.750.427.000	Rp. 22.662.231.940	99,61%



Berikut perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja tahun 2019 sampai dengan 2024

Uraian	2020		2021		2022	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 4.640.001.955	98,97	Rp. 4.166.721.926	97,80	Rp. 3.930.365.998	99,44
Belanja Barang	Rp. 9.340.533.601	99,96	Rp. 9.475.163.144	98,24	Rp. 12.176.684.071	99,93
Belanja Modal	Rp. 1.697.915.500	99,95	Rp. 129.202.963	98,25	Rp. 5.217.621.526	99,99
TOTAL	Rp. 15.678.451.056	99,66	Rp. 13.771.088.033	98,11	Rp. 21.324.671.595	99,85



Uraian	2023		2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 3.904.317.646	99,49	Rp. 4.442.796.127	99,95
Belanja Barang	Rp. 12.677.375.627	99,30	Rp. 13.444.181.960	99,37
Belanja Modal	Rp. 5.997.754.914	99,98	Rp. 4.775.253.853	99,99
TOTAL	Rp. 22.579.448.187	99,51	Rp. 22.662.231.940	99,61





Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset negara, baik secara fisik, legal, maupun ekonomis. Pengelolaan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan BMN yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balmon Makassar, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset negara serta mencegah kerugian negara sebagai akibat dari pengelolaan BMN yang tidak sesuai. Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan dan pencatatan BMN pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi SIMAN atau SAKTI. Berikut ini posisi BMN pada neraca per tanggal 31 Desember 2024:

AKUN NERACA		
Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	123.191.250
131111	Tanah	21.788.333.000
132111	Peralatan dan Mesin	47.177.308.235
133111	Gedung dan Bangunan	14.295.721.652
134111	Jalan dan Jembatan	1.582.532.911
134112	Irigasi	136.436.000
134113	Jaringan	111.787.610
135121	Aset Tetap Lain	14.960.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.155.758.962)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,971,818,752)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(688,336,561)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(32,378,076)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(31,618,840)
162151	Software	2,509,557,458
162161	Lisensi	302,474,070
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,197,148,650)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(163,684,045)
Jumlah		46,801,558,300



Persediaan

Persediaan BMN merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan yang dimiliki oleh suatu instansi dan digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional. Nilai saldo persediaan Balmon Makassar per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 123.191.250,- sesuai dengan perincian pada tabel di bawah:

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga
000004	Tinta Stempel SPI-12	1	10.500
000100	Clip Binder Besar No.260	8	432.000
000008	Lakban Hitam	3	60.000
000018	Lem Kertas Stick Deli	2	190.000
000022	Lakban Hijau	12	240.000
000023	Lakban Kuning	7	140.000
000024	Lakban Biru	12	240.000
000002	Staples Kecil Kenko	1	15.000
000003	Staples Besar Kenko	4	130.000
000004	Staples Tembak	1	200.000
000018	Staples Deli_10	1	16.500
000003	Isi Staples Besar Etona No.3 -1M	1	45.500
000005	Isi Staples Deli No. 10	3	105.000
000017	Isi Staples Deli No. 3M	4	262.000
000001	Spidol Snowman Board Marker	1	10.500
000004	Gunting	1	15.000
000143	Rak Kertas	1	150.000
000202	Box File	5	235.000
000240	Kenko Refil	1	48.000
000253	Spidol Artline Board Marker	12	126.000
000254	Spidol Artline Marker	12	126.000
000105	Kertas Foto	1	125.000
000119	Post It ttd Favo	1	10.500
000009	Amplop 90 Paperline	1	34.250
000005	Kertas Jilid Warna	1	60.500



000017	Epson Tinta Warna 001_Hitam	7	1.750.000
000018	Epson Tinta Warna 001_Yellow	9	2.250.000
000019	Epson Tinta Warna 001_Magenta	9	2.250.000
000020	Epson Tinta Warna 001_Cyan	7	1.750.000
000023	Epson Tinta Warna 664 Hitam	5	1.250.000
000024	Epson Tinta Warna 664 Yellow	5	1.250.000
000025	Epson Tinta Warna 664 Magenta	5	1.250.000
000026	Epson Tinta Warna 664 Cyan	8	2.000.000
000014	Amplop Kop Sedang	201	1.306.500
000015	Amplop Kop Besar	509	5.085.500
000016	Kertas Kop Folio	1	200.000
000131	Tinta Toner HP Laserjet 119A Black Colour Warna Original 150a 150 nw	7	10.500.000
000132	Tinta Toner HP 85A Original Cartridge cf285a for P1102 M1132 M1212 M1214	16	24.000.000
000133	Tinta Toner Epson/Workforce Pro WF- C579R Black	6	26.400.000
000134	Tinta Toner Epson/Workforce Pro WF- C579R Magenta	6	10.200.000
000135	Tinta Toner Epson/Workforce Pro WF- C579R Yellow	6	10.200.000
000136	Tinta Toner Epson/Workforce Pro WF- C579R Cyan	6	10.200.000
000226	Tinta Toner HP Laserjet 119A Original 150A- 150 NW Black	2	3.000.000
000227	Tinta Toner HP Laserjet 119A Original 150A- 150 NW Magenta	1	1.500.000
000228	Tinta Toner HP Laserjet 119A Original 150A- 150 NW Yellow	1	1.500.000
000229	Tinta Toner HP Laserjet 119A Original 150A- 150 NW Cyan	1	1.500.000
000004	BBM Genset 75 KVA Dexlite	40	548.000



000005	BBM Genset <i>Slave Dexlite</i>	20	274.000
Jumlah			123.191.250

Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Penetapan status penggunaan bertujuan untuk memastikan pengelolaan BMN yang tertib administrasi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mengoptimalkan penggunaan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja.

No	Jenis Barang	Kode Barang	Merk / Tipe	NUP	Tahun Perolehan
1	Spektrum <i>Analyzer</i>	3030301043	SPA TIPE 1 <i>Keysight</i> N9951B,	9	2021
2	Spektrum <i>Analyzer</i>	3030301043	Anritsu/MS2090A,Anritsu / MS2090A	10	2024
3	R.F. <i>Signal</i> Generator	3030301099	CE YEAR	1	2021
4	TV <i>Analyzer</i>	3030301139	MOSAIQ TELEVES	1	2021
5	Gordyin/Kray	3050206058	Minimalis <i>Cream</i>	54	2022
6	Alat DF Radio VHF	3060208005	Rohde & Schwarz VHF/UHF wideband DF antenna	1	2022
7	Repeater RX/TX	3060209012	Motorola SLR 5300	1	2020
8	Spektrum <i>Analyzer</i>	3030301043	SPA TIPE 1 <i>Keysight</i> N9951B	3	2022
9	Spektrum <i>Analyzer</i>	3030301043	Anritsu /MS2090A, Anritsu / MS2090A	6	2022
10	R.F. <i>Signal</i> Generator	3030301099	CE YEAR	11	2021
11	TV <i>Analyzer</i>	3030301139	MOSAIQ TELEVES	3	2020
12	Gordyin/Kray	3050206058	Minimalis <i>Cream</i>	1	2023
13	Radio <i>Direction</i> Finder	3060334022	Rohde & Schwarz ESMD Direction Finder	3	2022
14	<i>Portable Digital</i> Direction Finder	3060334027	PR200 + ARGUS	1	2021
15	<i>Portable Digital</i> Direction Finder	3060334027	<i>Bird Signalhawk</i> , <i>Bird Signalhawk</i>	2	2024
16	Spektrum <i>Analyzer</i>	3030301043	SPA TIPE 1 <i>Keysight</i> N9951B	1	2020
17	Spektrum <i>Analyzer</i>	3030301043	Anritsu/MS2090A, Anritsu / MS2090A	5	2023
18	R.F. <i>Signal</i> Generator	3030301099	CE YEAR	23	2013
19	TV <i>Analyzer</i>	3030301139	MOSAIQ TELEVES	33	2016
20	Gordyin/Kray	3050206058	Minimalis <i>Cream</i>	35	2022
21	Lisensi	8010101002	Lisensi	2	2020



Penetapan Status Penggunaan Kendaraan Roda 2 Tahun 2024

No	Nama Barang	Kode Barang	Merk / Tipe	NUP	Tahun Perolehan
1	Scooter	3020104002	Yamaha, B6H A/T	1	2020

Penetapan Status Penggunaan Kendaraan Roda 4 Tahun 2024

No	Nama Barang	Kode Barang	Merk / Tipe	NUP	Tahun Perolehan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3020102003	Toyota, Kijang Innova V	4	2010
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3020102003	Toyota, Kijang Innova 2.0 G A/T	5	2020
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3020102003	Toyota, Kijang Innova Luxury 2.0 A/T (TGN140R-MOTHKO)	6	2021
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3020102003	Toyota, Kijang Innova 2.0 V A/T (TGN140R-MOTHKO)	7	2021
5	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	3020103999	Toyota, Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) DSL M/T	2	2022
6	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	3020103999	Toyota, Hilux 2,45 Double Cabin 4 x 4 M/T	3	2023
7	Mobil Unit Monitoring Frekuensi	3020105007	IZUSU ELF, NHR 55	7	2013
8	Mobil Unit Monitoring Frekuensi	3020105007	Toyota, Hilux 2.4 Double Cabin G (4x4) M/T (GUN125R-0TFSX0)	8	2022

Penghapusan BMN

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Penghapusan BMN merupakan tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.



No	Risalah Lelang	Nama BMN
1	444/15.02/2024-01	Satu Paket Barang Inventaris Peralatan Mesin Spektrum <i>Analyzer</i> DF Narda IDA
2	689/15.02/2024-01	Peralatan <i>Setting</i> Instalasi
3	847/15.02/2024-01	Peralatan Mesin <i>Analyzer</i> SPA/ ELPR 100
4	851/15.02/2024-1	Kendaraan Roda Dua/ Suzuki
5	1290/15.02/2024-01	Satu Paket Berupa Bongkaran
6	1360/15.02/2024-01	Satu paket peralatan dan mesin Kantor
7	849/15.02/2024-01	Satu Paket Inventaris Kantor dan PM

Pengelolaan Barang dan Jasa

Untuk menunjang kegiatan operasional monitoring dan perkantoran rutin, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melakukan 40 (empat puluh) kegiatan pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2024, baik melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung e-purchasing maupun melalui metode tender pada LPSE.

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Metode Pemilihan
1.	Sewa Jasa Keamanan (<i>Security</i>), Balmon Makassar	597.000.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
2.	Sewa Jasa Petugas Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>), Balmon Makassar	338.400.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
3.	Sewa Jaringan Internet, Balmon Makassar	379.800.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
4.	Sewa Jaringan Internet <i>Transportable</i> , Balmon Makassar (Kabupaten Selayar)	48.000.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
5.	Sewa Jaringan Internet <i>Transportable</i> , Balmon Makassar (Kabupaten Bone)	35.000.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
6.	Sewa Mesin <i>Fotocopy</i> , Balmon Makassar	65.934.000,-	Pengadaan Langsung
7.	Sewa Lahan <i>Transportable</i> , Balmon Makassar	141.600.000,-	Penunjukan Langsung



8.	Sewa Lokasi Penempatan Slave Marusu, Balmon Makassar	119.802.000,-	Penunjukan Langsung
9.	Sewa Lokasi Penempatan <i>Slave</i> Tamalate, Balmon Makassar	119.824.500,-	Penunjukan Langsung
10.	Penambah Daya Tahan Tubuh, Balmon Makassar	121.098.000,-	Pengadaan Langsung
11.	Pemeriksaan Kesehatan <i>Medical Check-Up</i> , Balmon Makassar	72.498.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
12.	Peningkatan Kemampuan SDM, Balmon Makassar	156.000.000,-	Pengadaan Langsung
13.	Jasa Pendampingan ISO, Balmon Makassar	49.975.000,-	Pengadaan Langsung
14.	Sertifikasi ISO, Balmon Makassar	30.000.000,-	Pengadaan Langsung
15.	Sewa Lahan dan Menara LPP TVRI, Balmon Makassar	31.635.000,-	Pengadaan Langsung
16.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	104.700.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
17.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	255.993.000,-	Pengadaan Langsung
18.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	792.000.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
19.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	137.750.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
20.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	1.833.000.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
21.	Pengadaan Perangkat Monitoring, Balmon Makassar	24.000.000,-	<i>e-Purchasing</i> (Katalog)
22.	Renovasi Jalan Khusus Kompleks, Balmon Makassar	737.125.000,-	Tender
23.	Jasa Konsultan Perancang Pekerjaan Renovasi Jalan Khusus Kompleks, Balmon Makassar	92.685.000,-	Pengadaan Langsung
24.	Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Renovasi Jalan Khusus Kompleks, Balmon Makassar	59.940.000,-	Pengadaan Langsung
25.	Perbaikan <i>Rooftop</i> Ruang Server, Balmon Makassar	95.111.000,-	Pengadaan Langsung
26.	Jasa Konsultan Perancang Pekerjaan Perbaikan <i>Rooftop</i> Ruang Server, Balmon Makassar	12.650.000,-	Pengadaan Langsung
27.	Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Perbaikan <i>Rooftop</i> Ruang Server, Balmon Makassar	7.825.000,-	Pengadaan Langsung
28.	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Koperasi, Balmon Makassar	109.772.000,-	Pengadaan Langsung



29.	Jasa Konsultan Perancang Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Koperasi, Balmon Makassar	18.537.000,-	Pengadaan Langsung
30.	Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Koperasi, Balmon Makassar	10.656.000,-	Pengadaan Langsung
31.	Sewa Pengharum Ruangan, Balmon Makassar	24.309.000,-	Pengadaan Langsung
32.	Karoseri dan Instalasi Perangkat Mobil SMFR, Balmon Makassar	198.135.000,-	Pengadaan Langsung
33.	Pemeliharaan Tower dan Antena, Balmon Makassar	198.579.000,-	Pengadaan Langsung
34.	Dismantle Perangkat Mobil, Balmon Makassar	96.570.000,-	Pengadaan Langsung
35.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Balmon Makassar	159.799.952,-	e-Purchasing (Katalog)
36.	Relokasi Antena TCI, Balmon Makassar	154.000.000,-	Pengadaan Langsung
37.	Pengadaan Inventaris Kantor, Balmon Makassar	14.950.000,-	e-Purchasing (Katalog)
38.	Pengadaan Inventaris Kantor, Balmon Makassar	7.550.000,-	e-Purchasing (Katalog)
39.	Pengadaan Inventaris Kantor, Balmon Makassar	18.675.000,-	e-Purchasing (Katalog)
40.	Perbaikan Stasiun Slave Tamalate, Balmon Makassar	189.921.000,-	Pengadaan Langsung

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memiliki sumber daya manusia sebanyak 59 orang yang terdiri dari 27 PNS, 1 PPPK, 11 PPNN, 6 Petugas Kebersihan, 10 Petugas Keamanan, 2 Pengemudi dan 2 Petugas Loker Perizinan MOTS.





Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan

Selama tahun 2024 telah diusulkan 5 orang pegawai untuk kenaikan pangkat secara reguler dan fungsional serta 1 orang pegawai untuk kenaikan jabatan.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Jabatan Lama	Pangkat/Jabatan Baru	TMT
1.	Asep Rahayu Saputra NIP. 198012102005021001	III/B	III/C	1 Juni 2024
2.	Asep Rahayu Saputra NIP. 198012102005021001	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	1 Mei 2024
3.	Abdul Madjid Hasanuddin NIP. 198304112008031001	III/B	III/C	1 Juni 2024
4.	Irwan Asis Rekeng NIP. 198004122006041004	II/C	II/D	1 Juni 2024
5.	Fitriani Syahir NIP. 198606062008032002	III/A	III/B	1 Oktober 2024
6.	Hikmawati NIP. 198406142008122002	III/C	III/D	1 Desember 2024

Pengangkatan PPPK

Tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar menerima 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada jabatan fungsional tertentu.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	TMT
1.	Isabella Sulkifli NIP. 199808012024212001	IX	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	1 Februari 2024



Data Pegawai Pensiun Tahun 2024

Tahun 2024, terdapat 2 orang pegawai yang pensiun pada tahun 2024 pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar.

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Lama	Pangkat/ Gol. Baru	TMT
1.	Heriyanto NIP. 196609301989031004	IV.a / Pembina	IV.b / Pembina TK.I	1 Oktober 2024
2.	Asriadi NIP. 196410281986031004	IV.a / Pembina	IV.b / Pembina TK.I	1 November 2024

Daftar Penerima Satyalencana Tahun 2024

Tahun 2024, terdapat 1 orang pegawai pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar yang menerima penghargaan Satyalencana 20 tahun..

No.	Nama/NIP	Penghargaan
1.	Sitti Asnawati NIP. 197304122003122004	Satyalencana Karya XX Tahun

ADMINISTRASI UMUM DAN PERSURATAN

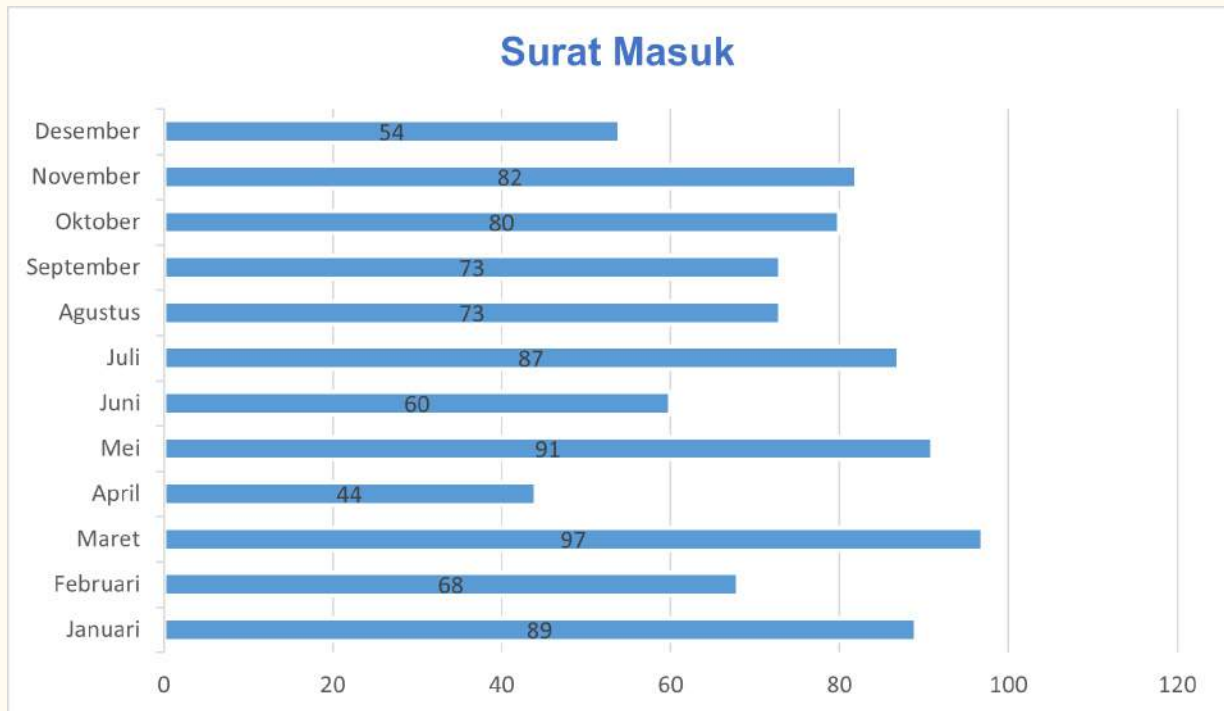
Tata persuratan adalah sistem atau proses pengurusan surat dinas yang diawali dari pembuatan, konsep naskah surat, hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat. Surat atau dokumen adalah produk administrasi yang berupa naskah yang digunakan sebagai sarana komunikasi resmi kedinasan yang mempunyai sifat tertutup dan terbuka.

Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat e-Government telah mengembangkan Aplikasi Perkantoran yang diberi nama siMAYA yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan cuma-cuma. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan Tata Naskah Dinas Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 6 Tahun 2011 mengenai Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

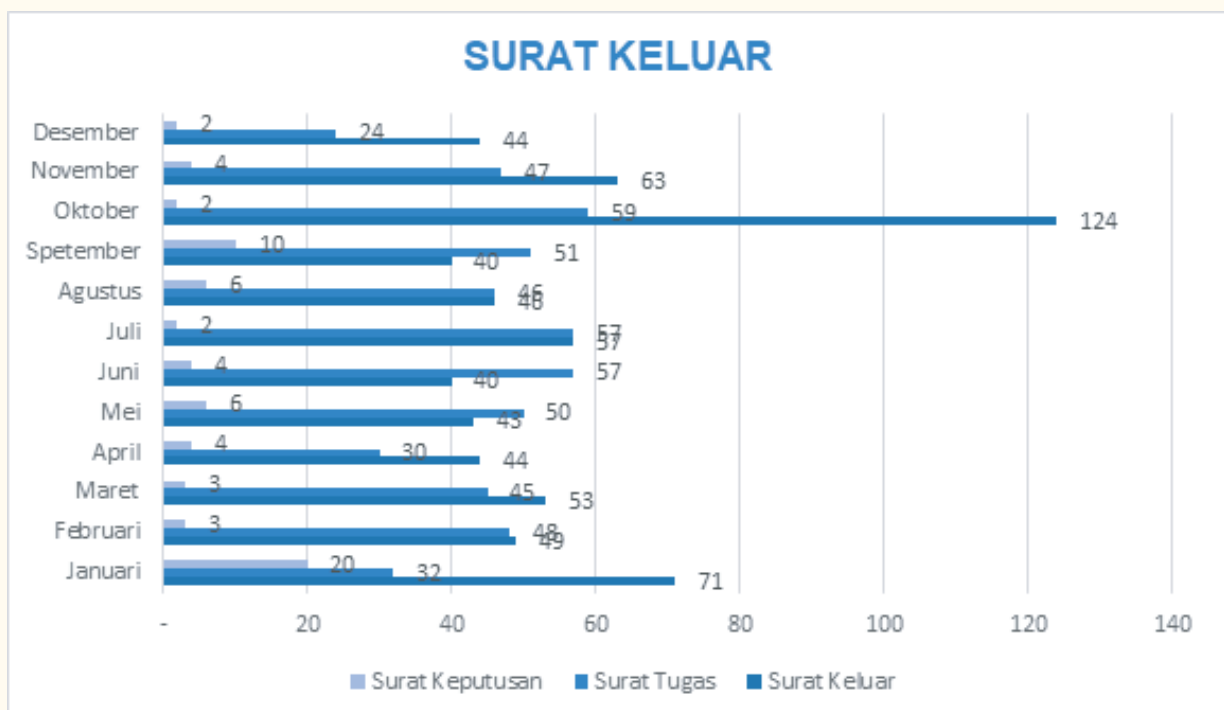


Tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah menginventarisasi sebanyak 2.184 surat masuk, surat keluar, surat tugas dan surat keputusan, dengan perincian sebagai berikut:

Grafik Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2024



Grafik Rekapitulasi Surat Keputusan, Surat Tugas, dan Surat Keluar Tahun 2024





ANALISIS DAN DAMPAK

Balai Monitor SFR Kelas I Makassar berhasil mencapai Nilai Kinerja Anggaran di atas target yang telah ditetapkan yaitu 91,90 dari target 89. Pencapaian ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, yaitu:

- A. Sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai kemampuan yang sangat baik di bidangnya masing-masing.
- B. Realisasi penyerapan anggaran yang mencapai angka 99,61% namun masih terdapat beberapa kendala, seperti adanya pemblokiran anggaran di akhir tahun anggaran, program kerja terlaksana belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta faktor cuaca yang buruk sehingga terkadang beberapa kegiatan lapangan berjalan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.
- C. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar rutin melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kerja.
- D. Pelaksanaan kontrak, baik secara é-purchasing, tender maupun pengadaan langsung terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi SIRUP.
- E. Pada pelaksanaan anggaran masih terdapat deviasi halaman III yang capaiannya masih belum maksimal.
- F. Pengelolaan UP/TUP telah terlaksana dengan maksimal, dengan jumlah revolving UP yang cukup sehingga pengelola keuangan dapat memaksimal pengelolaan UP/TUP selama tahun 2024. Hal ini tentunya didukung dengan pelaksanaan program kerja secara maksimal oleh seluruh pegawai Balmon Makassar.

Capaian kinerja yang sangat baik pada indikator Nilai Kinerja Anggaran DJID mencerminkan bahwa Balmon Makassar mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien, tepat sasaran serta komitmen tinggi dalam pelaksanaan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel sehingga memberikan dampak yang positif dan signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada stakeholder Balmon Makassar.



TINDAK LANJUT

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran pada suatu instansi atau unit kerja, baik dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran. NKA mencerminkan seberapa baik suatu entitas mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam anggaran, termasuk efisiensi, efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, baik secara internal Balmon Makassar maupun dengan unit eselon sangat penting untuk menjaga agar proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja tetap terlaksana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

EFISIENSI

Pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah berbasis web sehingga tata kelola anggaran terlaksana secara transparan dan akuntabel.



INDIKATOR KINERJA

NILAI KINERJA ANGGARAN UPT MAKASSAR 2024



BERORIENTASI PELAYANAN

Pengelolaan anggaran difokuskan untuk mendukung layanan publik yang optimal, memajukan UMKM, serta memastikan penggunaan anggaran efektif, efisien, dan tepat sasaran.



AKUNTABEL

Setiap tahapan pengelolaan anggaran dari perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan secara transparan, efisien, dan sesuai aturan.



KOMPETEN

Pengelola anggaran menguasai proses bisnis berbasis digital, aktif melakukan monitoring, evaluasi mingguan, dan mitigasi risiko agar pengelolaan keuangan lebih akurat dan patuh aturan.



HARMONIS

Koordinasi intensif antar tim dan komunikasi rutin dengan KPPN serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi kunci kelancaran pengelolaan anggaran.



LOYAL

Setiap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan dedikasi tinggi, menjaga integritas, serta nama baik instansi dan organisasi.



ADAPTIF

Pengelola anggaran mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, cepat mengadopsi aplikasi baru, serta siap menyesuaikan strategi pencairan dan penyerapan sesuai kebutuhan organisasi.



KOLABORATIF

Balmon Makassar menjalin kerja sama dengan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan KPKNL untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan tepat sasaran.



Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Latar Belakang : Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Makassar di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pengguna anggaran dan barang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan UAKPA serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 232/PMK.05/2022 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), peraturan ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Instansi (SAI) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengelolaan APBN.

Balmon Makassar telah berperan aktif dalam pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2024 dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang serta kebijakan-kebijakan bersifat antisipatif dan responsive dengan tetap berfokus pada pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, tepat sasaran dan tepat jumlah.

Proses pertanggungjawaban APBN dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full module. Seluruh proses perekaman tagihan/transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilaksanakan melalui SAKTI yang terkoneksi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sehingga memudahkan proses pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan sistem single database pada SAKTI, proses penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai Kementerian Negara/Lembaga akan menjadi lebih mudah dan terjaga validitasnya.

Capaian Kinerja : Capaian kinerja indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2024 memperoleh nilai 100 dari target 80 sehingga capaian tahun 2024 sebesar 125%.



Capaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

KINERJA

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

INDIKATOR KINERJA

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

TARGET

80%

CAPAIAN

100%

PERSENTASE

125%

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 5 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	2020	-	-
	2021	-	-
	2022	-	-
	2023	87	100
	2024	80	100

Jumlah aset pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.46.801.852.396,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.123.485.346,-, aset tetap sebesar Rp.46.227.168.217,- dan aset lainnya sebesar Rp. 451.198.833,- sesuai yang tertuang dalam neraca per 31 Desember 2024.





Ada penurunan jumlah aset pada tahun anggaran 2024 sebesar 2%, jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun anggaran 2024 juga mengalami penurunan sebesar 2%, seperti yang tertuang pada neraca per tanggal 31 Desember 2024 di bawah ini:

Nama Perkiraan	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
ASET				
Aset Lancar				
Belanja Dibayar di muka (<i>Prepaid</i>)	294.094	125.391	168.705	134,54
Persediaan	123.191.250	77.091.000	46.100.250	59,80
Jumlah Aset Lancar	123.485.346	77.216.391	46.268.955	59,92
Aset Tetap				
Tanah	21.788.333.000	21.788.333.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	47.177.308.235	43.829.713.283	3.347.594.952	7,64
Gedung dan Bangunan	14.295.721.652	13.237.229.721	1.058.491.931	8,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.830.756.521	879.006.610	951.749.911	108,28
Aset Tetap Lainnya	14.960.000	14.960.000	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	601.254.6400	(601.254.640)	(100,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(38.879.911.191)	(33.997.149.888)	(4.882.761.303)	14,36
Jumlah Aset Tetap	46.227.168.217	46.353.347.366	(126.179.149)	(0,27)
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	2.812.031.528	2.812.031.528	0	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	604.800.000	(604.800.000)	(100,00)
Aset Lain-lain	0	3.241.092.278	(3.241.092.278)	(100,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2.360.832.695)	(5.329.444.388)	2.968.611.693	(55,70)
Jumlah Aset Lainnya	451.198.833	1.328.479.418	(877.280.585)	(66,04)
JUMLAH ASET	46.801.852.396	47.759.043.175	(957.190.779)	(2,00)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Kepada Pihak Ketiga	23.650.227	417.302.502	(393.730.989)	(94,33)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	23.650.227	417.302.502	(393.730.989)	(94,33)
JUMLAH KEWAJIBAN	23.650.227	417.302.502	(393.730.989)	(94,33)
EKUITAS				
Ekuitas	46.778.202.169	47.341.740.673	(563.459.790)	1,19
JUMLAH EKUITAS	46.778.202.169	47.341.740.673	(563.459.790)	1,19
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.801.852.396	47.759.043.175	(957.190.779)	(2,00)

ANALISIS & MANFAAT

Balai Monitor SFR Kelas I Makassar berhasil mencapai Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di atas target yang telah ditetapkan yaitu 100 dari target 80. Pencapaian ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, yaitu:

- Melakukan jurnal balik/penyesuaian awal tahun atas saldo akrual yang tertuang pada neraca serta menyelesaikan transaksi resiprokal atas transaksi.
- Mengoptimalkan penggunaan menu monitoring serta menindaklanjuti to do list yang ada pada aplikasi SAKTI.



- Tepat waktu dalam melakukan rekonsiliasi bulanan baik secara internal maupun eksternal.
- Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meminimalisasi adanya kesalahan transaksi

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan juga ditemui beberapa kendala, antara lain aplikasi SAKTI yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan memonitor seluruh transaksi sering kali mengalami maintenance sehingga berdampak pada aspek ketepatan waktu dan penyampaian data hasil rekonsiliasi. Capaian kinerja yang sangat baik pada indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) mencerminkan bahwa Balmon Makassar mampu melaksanakan pelaporan keuangan secara tepat waktu, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, tepat sasaran serta komitmen tinggi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan sehingga memberikan dampak yang positif dan signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Balmon Makassar.

TINDAK LANJUT

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) digunakan untuk menilai transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi yang menyajikan prosedur transaksi secara keseluruhan. Balmon Makassar berkomitmen untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan pengelolaan aset dan anggaran, pelaksanaan pelaporan keuangan yang tepat waktu serta peningkatan kemampuan petugas pelaporan keuangan untuk memperkuat akuntabilitas dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

EFISIENSI

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia pada Balmon Makassar secara maksimal di bidang pelaporan keuangan sangat berpengaruh pada pencapaian akuntabilitas laporan keuangan. Penilaian kualitas pelaporan menjadi bagian yang sangat penting dari akuntabilitas suatu instansi, pengendalian intern, dan kesiapan dalam menghadapi audit, baik internal maupun eksternal. Penggunaan aplikasi SAKTI yang berbasis web juga sangat membantu proses pelaporan keuangan secara keseluruhan. Dengan aplikasi SAKTI yang terintegrasi satu sama lain menyebabkan peningkatan Tingkat kepatuhan dan akurasi dalam pencatatan seluruh transaksi sehingga nilai pelaporan keuangan UAKPA di tahun 2024 dapat mencapai target.

INDIKATOR KINERJA

NILAI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTASI KUASA
PENGUNA ANGGARAN (UAKPA)



BERORIENTASI PELAYANAN

Pelaporan keuangan dilakukan cepat, tepat, dan akurat untuk menyajikan informasi pengelolaan aset dan anggaran yang jelas dan mudah dipahami.



AKUNTABEL

Seluruh transaksi dicatat sesuai SAP dilengkapi data dukung valid, dan direkonsiliasi setiap bulan untuk menjamin keakuratan laporan.



KOMPETEN

Petugas menguasai regulasi dan aplikasi pelaporan keuangan serta terus meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan seminar.



HARMONIS

Pegawai menjaga lingkungan kerja yang kondusif, saling mendukung, dan menghindari konflik kepentingan demi kelancaran penyusunan laporan.



LOYAL

Laporan disusun akurat dan akuntabel dengan menjaga nama baik instansi serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar.



ADAPTIF

Petugas sigap menyesuaikan diri dengan perubahan aplikasi maupun aturan baru, serta memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi pelaporan.



KOLABORATIF

Pelaporan keuangan terlaksana melalui kerja sama lintas bagian dan komunikasi aktif dengan auditor agar laporan transparan dan terintegrasi.



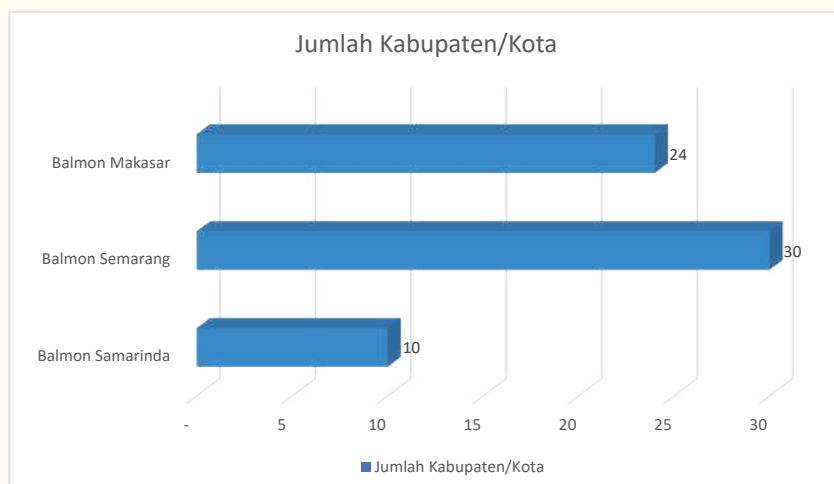
Benchmark

Telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dengan UPT lainnya di lingkungan Ditjen Infrastruktur Digital yaitu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda.

Dari grafik di bawah, luas wilayah Balmon Makassar sebesar 46.717,48 m² dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 24, Balmon Semarang memiliki luas wilayah hanya sebesar 27.999,60 m² namun memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak yaitu 30 kabupaten/kota, sedangkan Balmon Samarinda dengan luas wilayah paling besar diantara 2 balmon kelas I lainnya, yaitu sebesar 127.346,92 m² hanya memiliki 10 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan tingkat kepadatan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Semarang yang berada di Pulau Jawa paling besar dibandingkan dengan Balmon Makassar yang berada di Pulau Sulawesi dan Balmon Samarinda yang berada di Pulau Kalimantan.



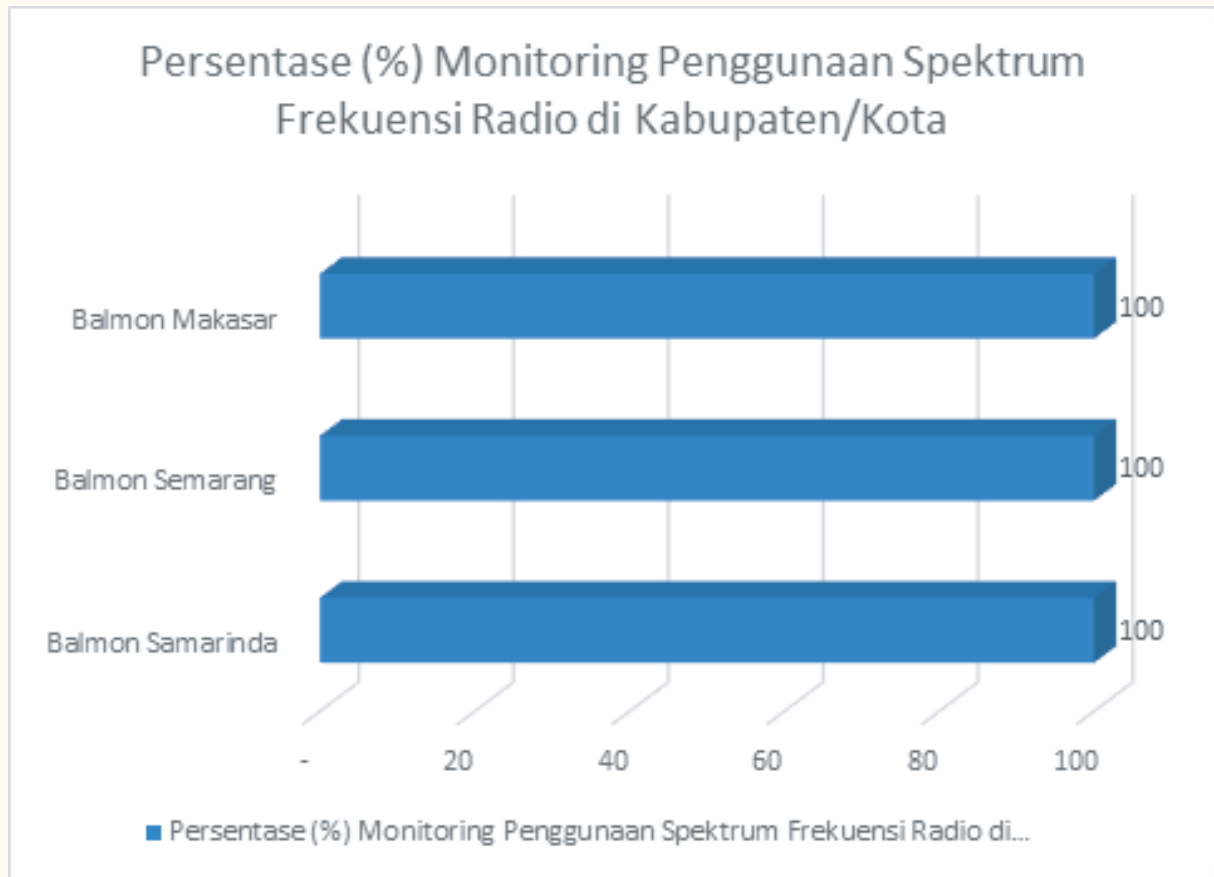
LUAS WILAYAH (Km²)



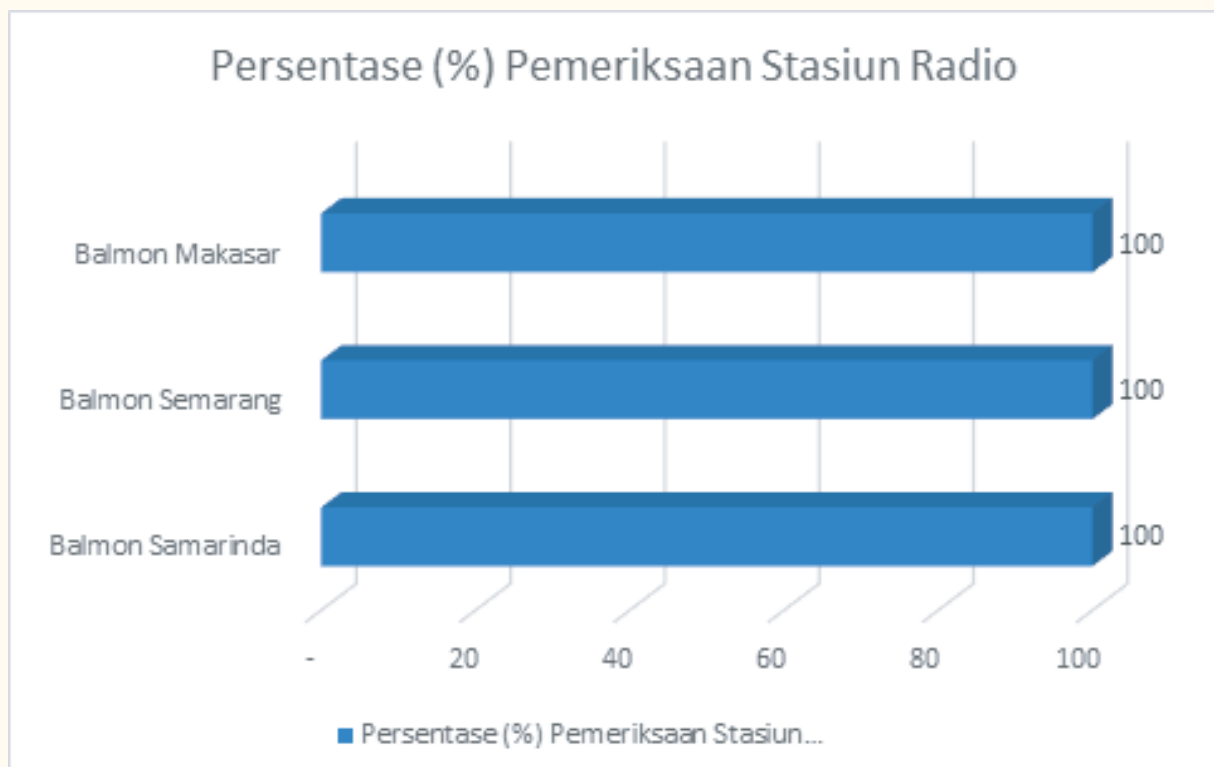
JUMLAH KABUPATEN/KOTA



IK. 1 PERSENTASE (%) MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI KAB/KOTA

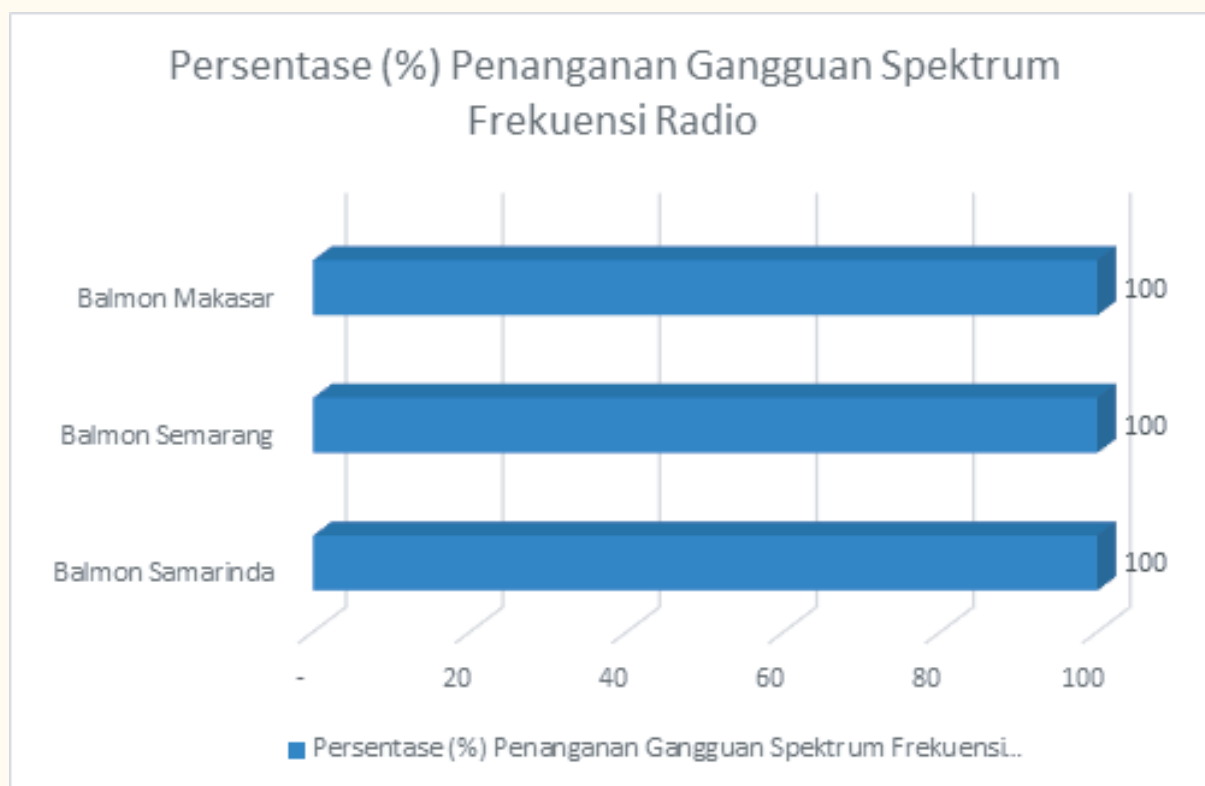


IK. 2 PERSENTASE (%) PEMERIKSAAN STASIUN RADIO

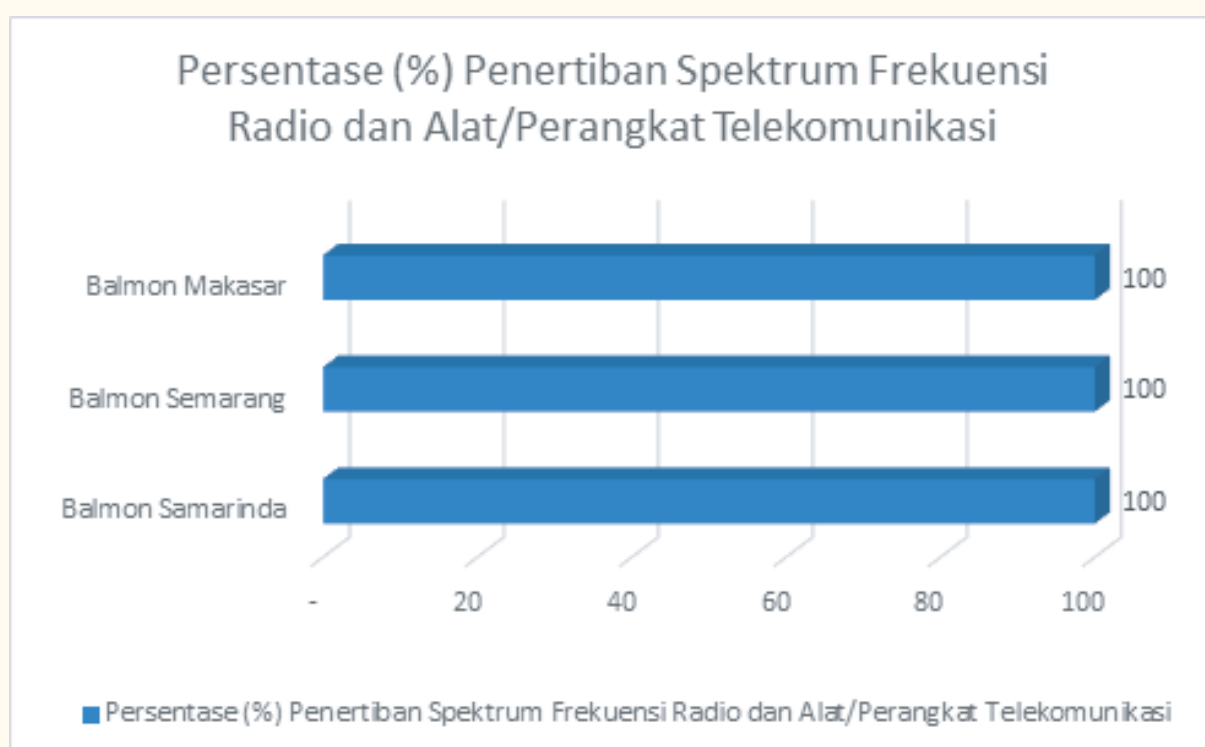




IK. 3 PERSENTASE (%) PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

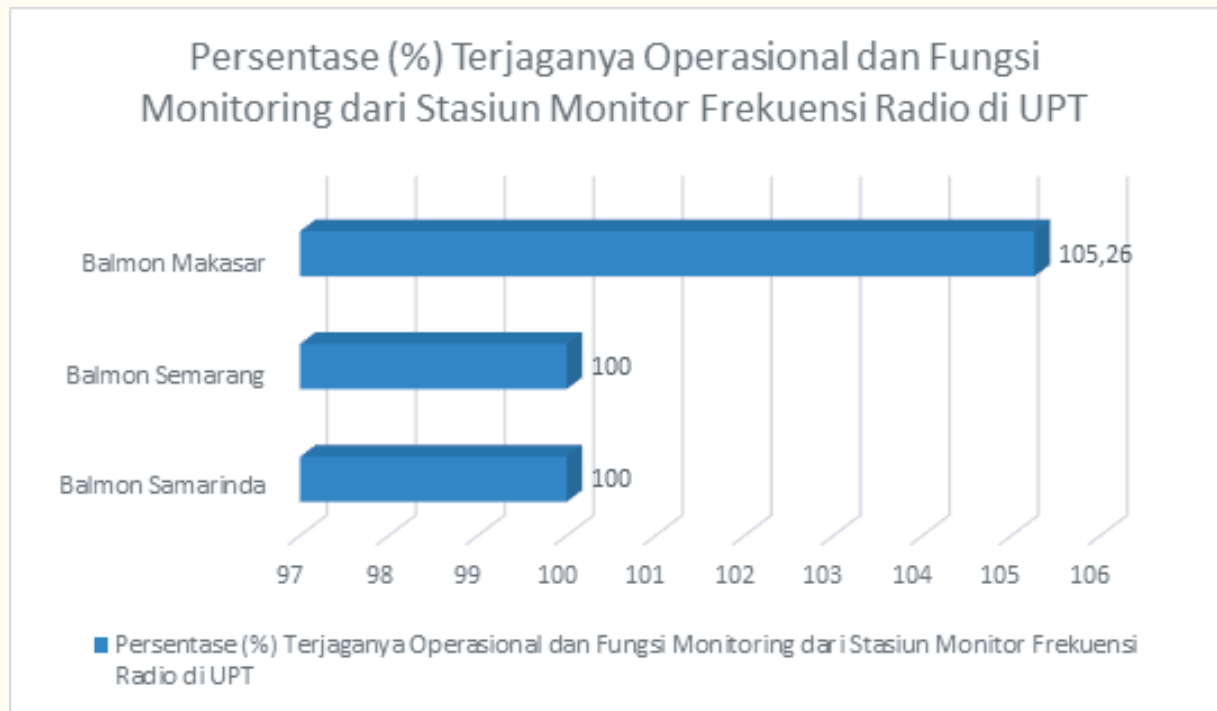


IK. 4 PERSENTASE (%) PENERTIBAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

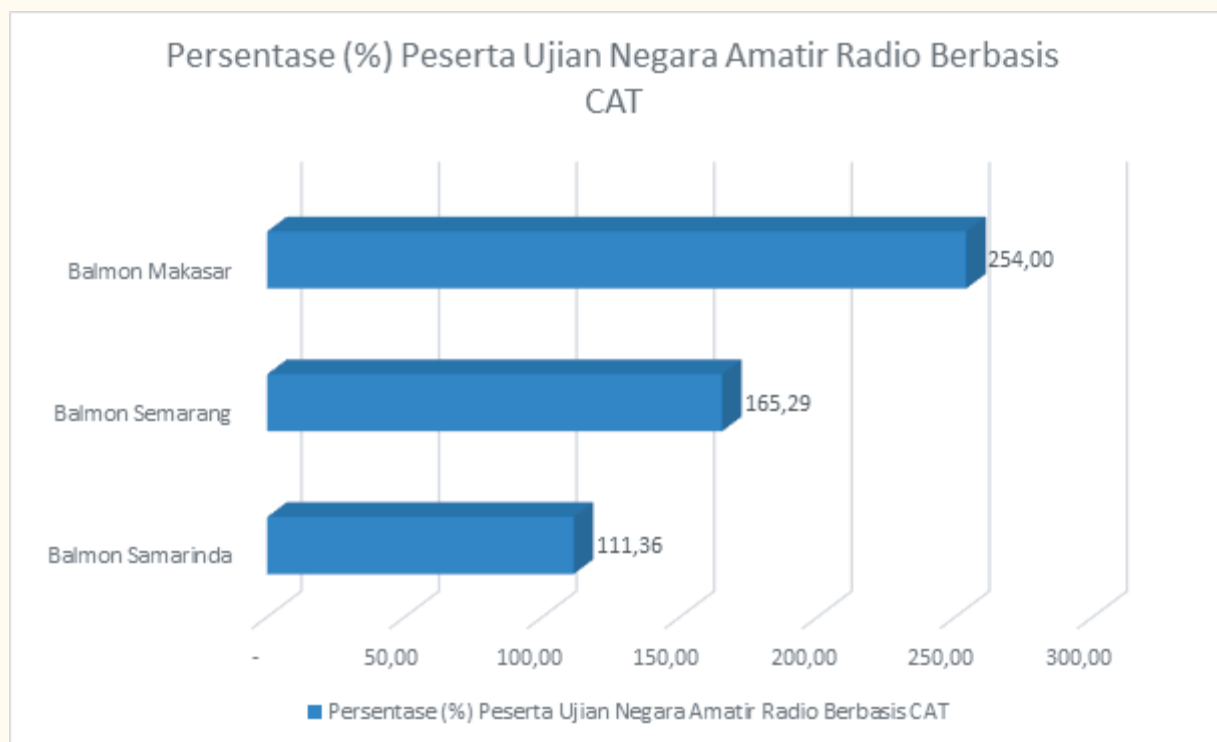




IK. 5 PERSENTASE (%) TERJAGANYA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT

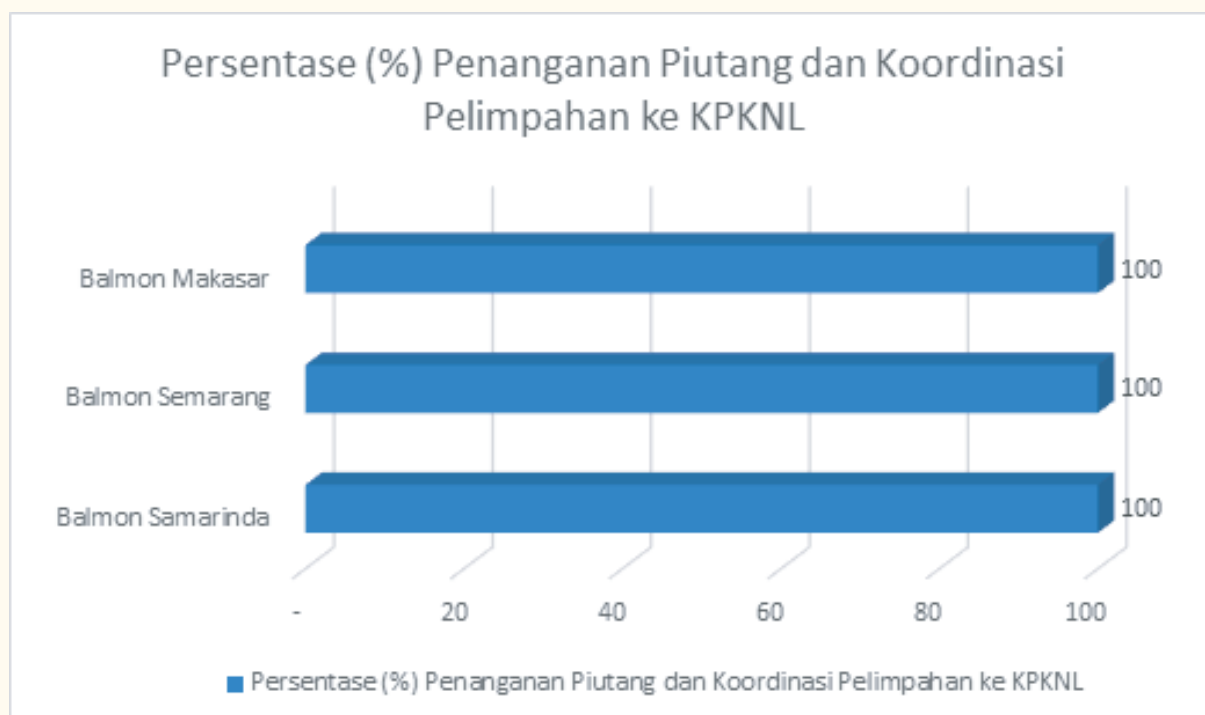


IK. 6 PERSENTASE (%) PESERTA UJIAN NEGARA AMATIR RADIO BERBASIS CAT

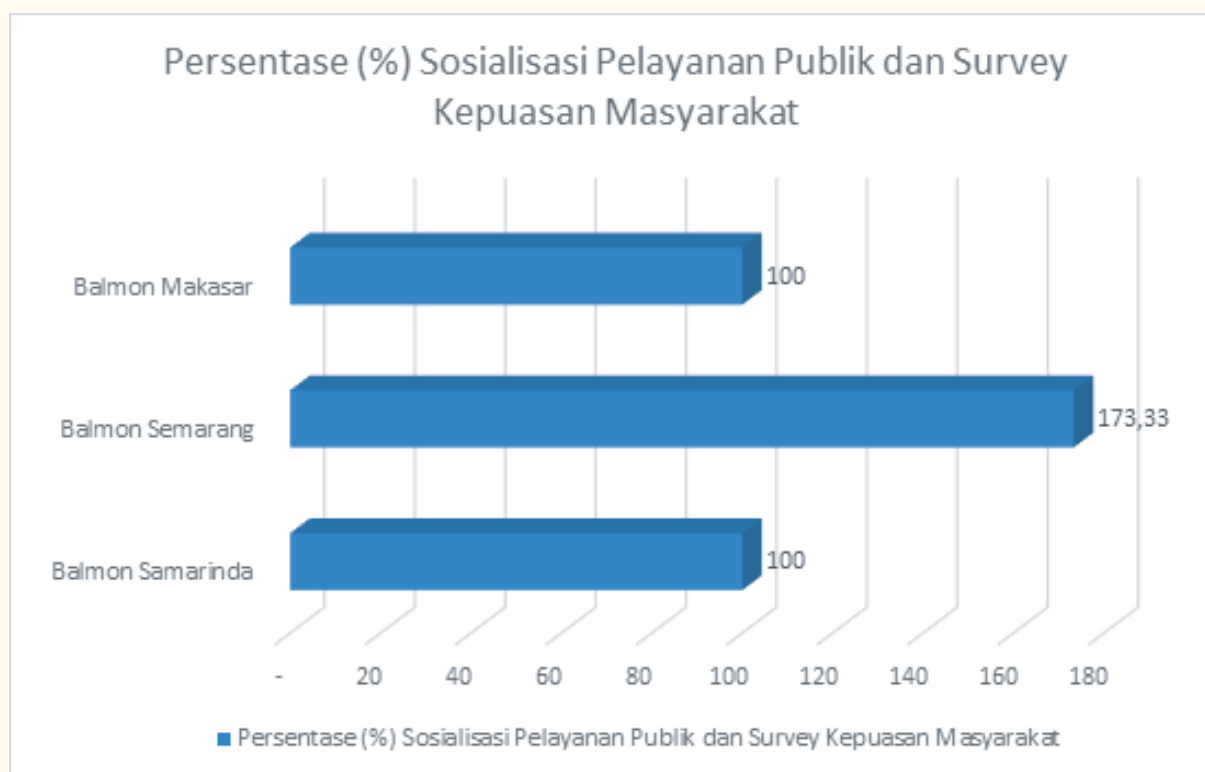




IK. 7 PERSENTASE (%) PENANGANAN PIUTANG DAN KOORDINASI PELIMPAHAN KE KPKNL

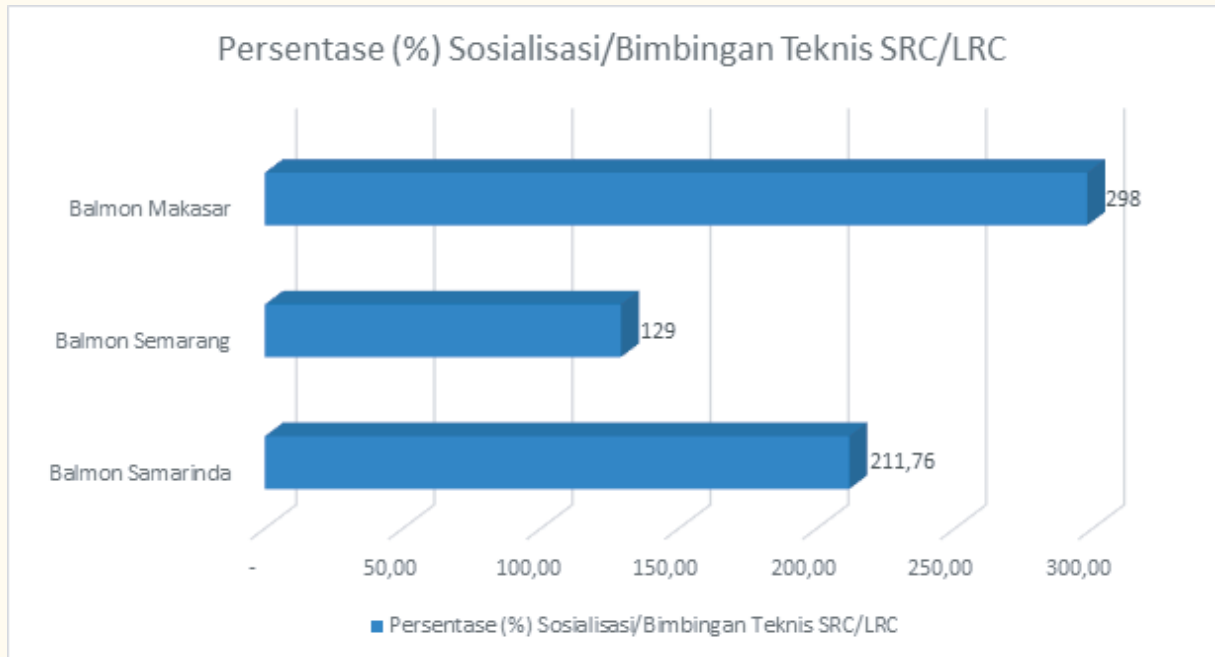


IK. 8 PERSENTASE (%) SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

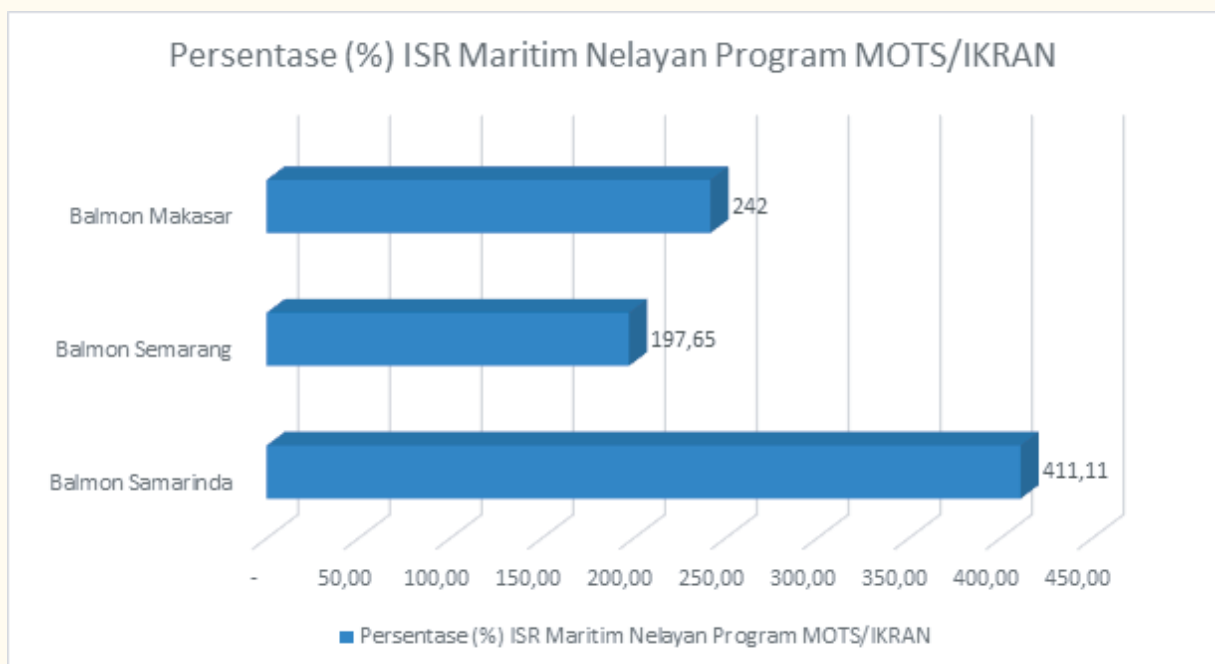




IK. 9 PERSENTASE (%) SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS SRC/LRC

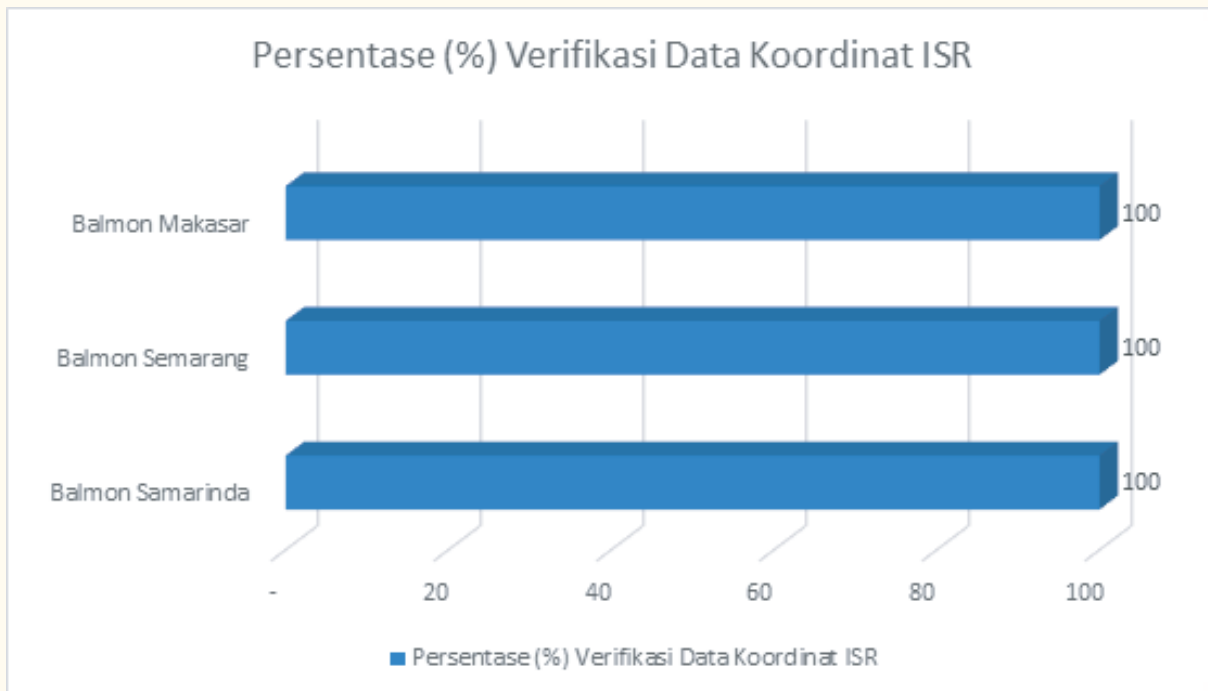


IK. 10 PERSENTASE (%) ISR MARITIM NELAYAN PROGRAM MOTS-IKRAN





IK. 11 PERSENTASE (%) VERIFIKASI DATA KOORDINAT SITE ISR



Dari gambaran grafik Indikator Kinerja (IK) yang ditampilkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat kesamaan nilai persentase capaian Indikator Kinerja (IK) pada IK.1, IK.2, IK.3, IK.4, IK.7 dan IK.11 dengan nilai capaian Indikator Kinerja sebesar 100%.

Balai Monitor SFR Kelas I Makassar memperoleh nilai capaian melebihi capaian Balmon SFR Kelas I Samarinda dan Balmon SFR Kelas I Semarang pada 3 Indikator Kinerja, yaitu:

- IK.5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, dimana nilai capaian Balmon Makassar sebesar 105,26%, sedangkan nilai capaian Balmon Samarinda dan Balmon Semarang sebesar 100%.
- IK.6 Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT, pada IK ini nilai capaian Balmon Makassar sebesar 254,00%, sedangkan nilai capaian Balmon Semarang sebesar 165,29% dan Balmon Samarinda sebesar 111,36%.
- IK.9 Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC, dimana nilai capaian Balmon Makassar sebesar 298,00%, sedangkan nilai capaian Balmon Samarinda sebesar 211,76% dan Balmon Semarang sebesar 129,00%.

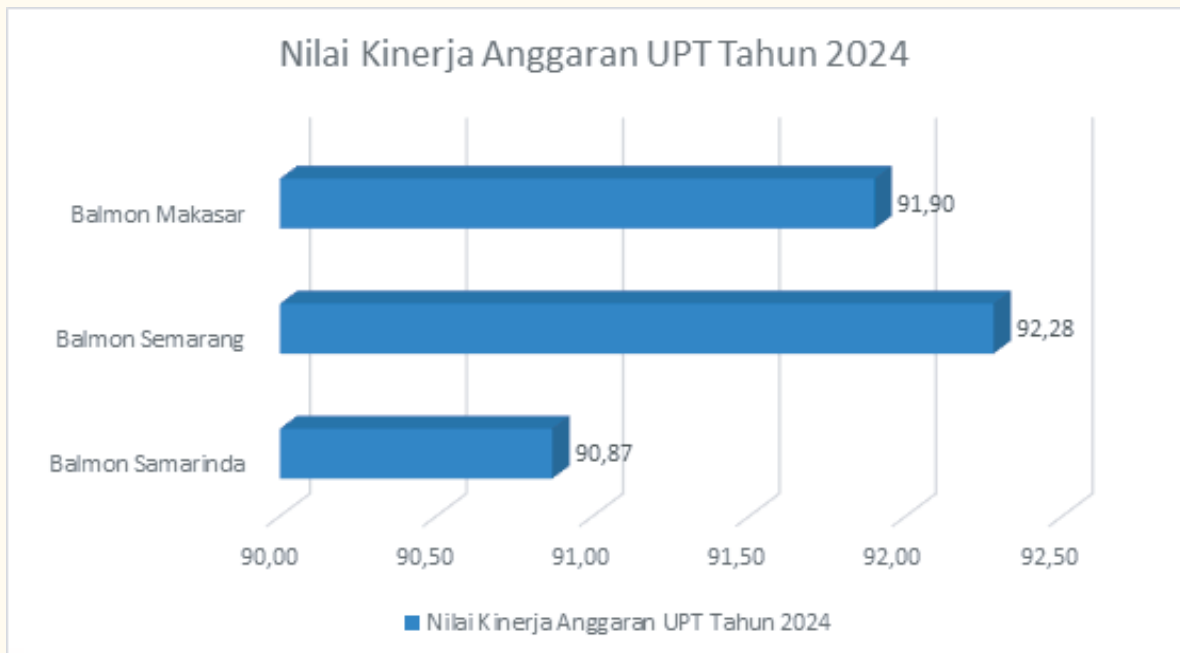
Untuk Indikator Kinerja pada IK.8 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, nilai capaian tertinggi diperoleh Balmon Semarang dengan nilai 173,33% sedangkan nilai capaian Balmon Makassar dan Balmon Samarinda masing-masing sebesar 100%.

Balmon Samarinda memperoleh nilai capaian tertinggi pada IK.10 Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN dengan nilai 411,11% disusul Balmon Makassar sebesar 242,00%, sedangkan nilai capaian Balmon Semarang adalah 197,65%.



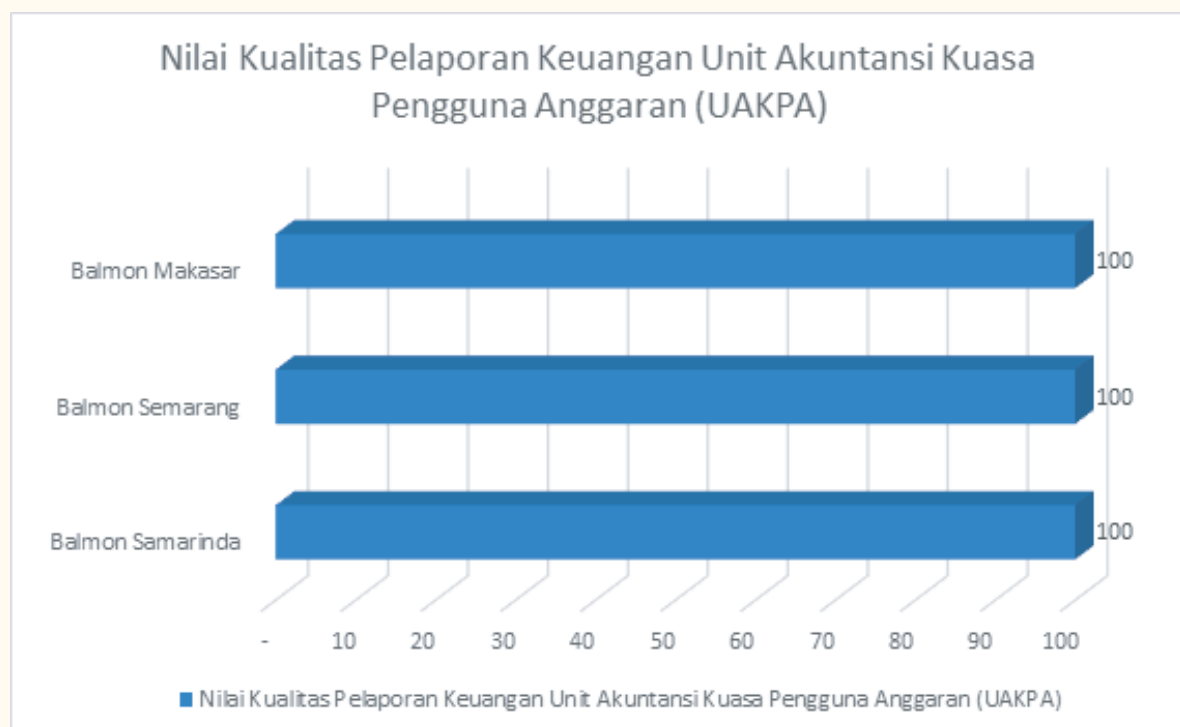
SASARAN KEGIATAN 2

IK.1 NILAI KINERJA ANGGARAN UPT TAHUN 2024



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari sisi pelaksanaan Anggaran baik Balmon Makassar, Balmon Semarang dan Balmon Samarinda memiliki nilai kinerja Anggaran yang sangat baik selama tahun Anggaran 2024. Balmon Semarang memperoleh nilai kinerja tertinggi yaitu sebesar 92,28 disusul Balmon Makassar sebesar 91,90 kemudian Balmon Samarinda dengan nilai kinerja Anggaran sebesar 90,87.

IK. 2 NILAI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)





Untuk indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Balmon Makassar, Balmon Semarang dan Balmon Samarinda masing-masing memperoleh nilai 100. Hal ini menunjukkan bahwa baik Balmon Makassar, Balmon Semarang maupun Balmon Samarinda telah melaksanakan pelaporan keuangan dengan sangat baik, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

KINERJA LAINNYA

Pemusnahan Barang Bukti

Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan peredaran serta penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi merupakan bagian terpenting dalam usaha tertib Telekomunikasi. Dalam rangka Capaian kerja menuju tertib telekomunikasi, maka perlu adanya monitoring yang berkelanjutan dan usaha penertiban dalam rangka ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan peredaran serta penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Balmon SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan operasi penertiban dan penanganan gangguan penggunaan frekuensi di wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Makassar. Dalam kegiatan penertiban dan penanganan gangguan tersebut diamankan alat/perangkat pemancar FM dan HT yang beroperasi tanpa izin, tidak bersertifikasi dan mengganggu pengguna frekuensi lainnya, sehingga dibawa dan diamankan di kantor Balai Monitor SFR Kelas I Makassar.

Terdapat sejumlah 18 unit alat/perangkat telekomunikasi yang telah dilengkapi Berita Acara Penyerahan Alat/Perangkat Telekomunikasi dan Surat Pernyataan bermeterai dari Pemilik Alat/Perangkat tersebut untuk dimusnahkan, dan telah dilaporkan ke Direktorat Pengendalian DJID serta dikoordinasikan dengan Korwas PPNS Polda Sulsel, Kejaksaan Negeri Gowa dan Pengadilan negeri Gowa. Dengan demikian, Balmon SFR Kelas I Makassar dapat segera melaksanakan proses pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi ilegal dengan pertimbangan bahwa alat/perangkat telekomunikasi ilegal tersebut akan membebani anggaran pemeliharaan/penyimpanan setiap tahunnya, memperjelas status hukum atas alat/perangkat telekomunikasi ilegal, dan menjadi bukti kepada masyarakat terkait penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Telekomunikasi.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen No.07 tahun 2021 tentang Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.



Kegiatan pemusnahan barang hasil temuan kegiatan penertiban dan penanganan gangguan penggunaan frekuensi radio yang dilaksanakan adalah sebagai bentuk kepastian hukum dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan sebagai bentuk Restorative Justice kepada pengguna frekuensi radio yang setelah dilakukan proses pembinaan, alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan tidak dapat diproses untuk memiliki ISR, Sertifikasi Perangkat dan atau perangkat tersebut apabila digunakan dapat mengganggu pengguna frekuensi lainnya sehingga kegiatan pemusnahan adalah langkah terbaik guna terciptanya penggunaan frekuensi radio yang tertib dan tidak mengganggu di wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel Daftar/Alat Perangkat Telekomunikasi yang Dimusnahkan

NO	NAMA PERUSAHAAN DAN ALAMAT	NAMA PEMILIK	JUMLAH PERANGKAT YANG DI MUSNAHKAN	TYPE/MODEL/MERK	BA. SERAHKAN KE NEGARA
1	RM. SAUNG RINDU ALAM. Jl poros pattalassang, kab. Gowa sulawesi selatan	MUSLAM	1 (satu) UNIT PESAWAT HT	MERODITH/MD-111/S/N:ES111B220 705463	Nomor: 050/Balmon.73/SP .03.04/02/2024
2	RM. SAUNG RINDU ALAM. Jl poros pattalassang, kab. Gowa sulawesi selatan	MUSLAM	1 (satu) UNIT PESAWAT HT	MERODITH/MD-111/S/N:ES111B220 705366	Nomor: 050/Balmon.73/SP .03.04/02/2024
3	RM. SAUNG RINDU ALAM. Jl poros pattalassang, kab. Gowa sulawesi selatan	MUSLAM	1 (satu) UNIT PESAWAT HT	MERODITH/MD-111/S/N:ES111B220 705255	Nomor: 050/Balmon.73/SP .03.04/02/2024
4	RM. SAUNG RINDU ALAM. Jl poros pattalassang, kab. Gowa sulawesi selatan	MUSLAM	1 (satu) UNIT PESAWAT HT	MERODITH/MD-111/S/N:ES111B220 705457	Nomor: 050/Balmon.73/SP .03.04/02/2024
5	RM. SAUNG RINDU ALAM. Jl poros pattalassang, kab. Gowa sulawesi selatan	MUSLAM	1 (satu) UNIT PESAWAT HT	MERODITH/MD-111/S/N:ES111B220 705531	Nomor: 050/Balmon.73/SP .03.04/02/2024
6	RM. SAUNG RINDU ALAM. Jl poros pattalassang, kab. Gowa sulawesi selatan	MUSLAM	1 (satu) UNIT PESAWAT HT	MERODITH/MD-111/S/N:ES111B220 705370	Nomor: 050/Balmon.73/SP .03.04/02/2024
7	RM. SAUNG RINDU ALAM. Jl poros pattalassang, kab. Gowa sulawesi selatan	MUSLAM	1 (satu) UNIT PESAWAT HT	MERODITH/MD-111/S/N:ES111B220 705364	Nomor: 050/Balmon.73/SP .03.04/02/2024
8	PT.HENGSHENG NEW ENERGY MATERIAL INDONESIA .Jl papanloe kec. Pajukukang, kab. Bantaeng	JERRY R. YUSUF,S.E	1 (SATU) UNIT PESAWAT HT	VESTRAL/ST-999/S/N:ST999Y O1659	Nomor: 542/Balmon.73/SP .03.03/012/2023



PT. TELKOM INDONESIA. Mli001, kec.nuha,luwu timur to co1055 combat sumasang	SIPRIANUS AMOL	1 (SATU) UNIT RADIO LINK	ERICSSON MMU 2H	Nomor: 139 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2023
PT.INDOSAT IOH Jl urip sumoharjo km.4 ,UNIVERSITAS BOSOWA	AQIL HADI	1 (SATU) UNIT RADIO LINK ISP	NANOBRIGE M5/UBIQUITI	Nomor: 263 /Balmon.73/SP.03.0 3/ 11/2023
PT. BUMI Delapan Delapan	ACHMAD DAHLAN	1 (satu) unit HT Motorola CP1660	AZH03KEK8AA9	Nomor:140 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2024
PT.IOH,212176 KAMPALA TO 212178 BALANGNIPA,sinjai	LA ODE MUHAMMAD ALISA	1 (satu) unit radio link	huawei RTN980 ISU 2	Nomor:141 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2024
PT.IOH,212176 KAMPALA TO 212178 BALANGNIPA,sinjai	LA ODE MUHAMMAD ALISA	1 (satu) unit radio link	huawei RTN980 ISU 2	Nomor:141 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2024
PT.IOH,212176 KAMPALA TO 212178 BALANGNIPA,sinjai	LA ODE MUHAMMAD ALISA	1 (satu) unit radio link	huawei RTN980 ISU 2	Nomor:141 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2024
PT.IOH,212636 H.laele to212251 telumpanua,pare pare	LA ODE MUHAMMAD ALISA	1 (satu) unit radio link	huawei optick RTN 950 N	Nomor:141 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2024
PT.IOH,212636 H.laele to212251 telumpanua,pare pare	LA ODE MUHAMMAD ALISA	1 (satu) unit radio link	huawei optick RTN 950 N	Nomor:141 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2024
PT.IOH,212636 H.laele to212251 telumpanua,pare pare	LA ODE MUHAMMAD ALISA	1 (satu) unit radio link	huawei optick RTN 950 N	Nomor:141 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2024
PT.IOH,212106 ukip to 212109 kima2	LA ODE MUHAMMAD ALISA	1 (satu) unit radio link	huawei ISM6	Nomor:141 /Balmon.73/SP.03.0 3/05/2024



Sebelum dilakukan pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi ilegal dengan menggunakan alat berat (slender mini/wales stoom) dan dibakar, terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan alat/perangkat yang akan dimusnahkan serta penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Alat/Perangkat Telekomunikasi Ilegal oleh Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, yang turut ditandatangani serta disaksikan oleh Plt. Kasi Korwas PPNS Polda Sulsel, perwakilan Kejaksaan Negeri Gowa dan perwakilan pemilik alat/perangkat yang akan dimusnahkan. Selanjutnya dilakukan pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi ilegal secara simbolis dengan menggunakan martil/palu beton.

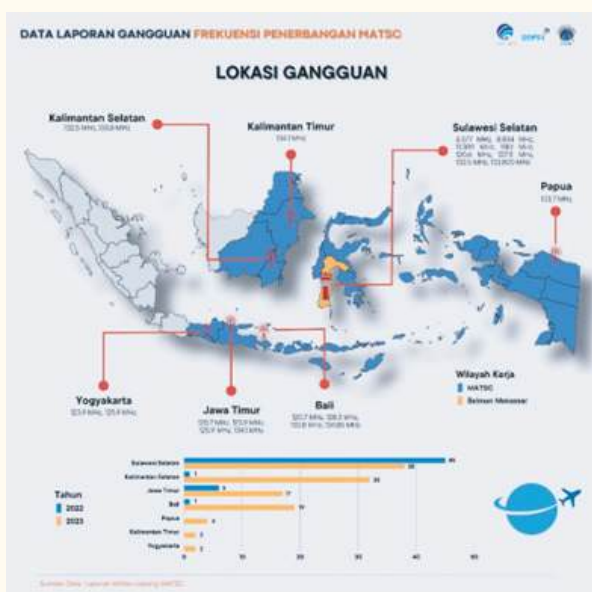




Ifast-Fest 2024



Balmon Makassar memperoleh Juara 2 pada kategori Data Challenge Infographic Kategori SDPPI IDEA pada pagelaran Ifast-Fest Tahun 2024.





PERANCANGAN ZONA INTEGRITAS



Tahun 2024 Balmon Makassar melakukan Pencanaan Zona Integritas sebagai wujud komitmen Balmon Makassar untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam hal pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta membangun unit kerja yang bebas korupsi dan memberikan pelayanan publik yang prima.

Pada tanggal 28 Februari 2024 di Hotel Four Points Makassar, Bapak Heriyanto selaku Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah mendeklarasikan serta melakukan penandatanganan pakta integritas perencanaan zona integritas bersama dengan mitra kerja Balmon Makassar.



BAB IV

PENUTUP





KESIMPULAN

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), Kementerian Komunikasi dan Digital mengemban tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu UPT Ditjen Infrastruktur Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar senantiasa bekerja dengan mengacu pada kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung misi Ditjen Infrastruktur Digital, yaitu mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.

Tahun 2024, target kinerja yang telah ditetapkan oleh Rencana Strategis UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi pedoman kerja dan prinsip dasar pelayanan prima kepada para pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan telekomunikasi khususnya telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio (nirkabel) yang merupakan sumber daya terbatas milik negara yang saat ini sangat pesat perkembangannya.

Oleh karenanya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyadari banyaknya tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar di masyarakat menuntut peningkatan kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar kepada para pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya.

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan utama dan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang menjadi penilaian dalam penetapan capaian sasaran kegiatan utama tersebut.

Capaian dari masing-masing indikator kinerja secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, yang dapat dilihat dari nilai capaian masing-masing indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian halnya dengan kinerja pada bagian keuangan yang menunjukkan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp22.662.231.940,- atau sebesar 99,61% dari total pagu anggaran sebesar Rp22.750.427.000,-.



Laporan Kinerja (LAKIN) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Laporan Kinerja ini menggunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian telah diuraikan secara deskriptif sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan masukan terhadap Laporan Kinerja ini. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.





LAMPPIRAN









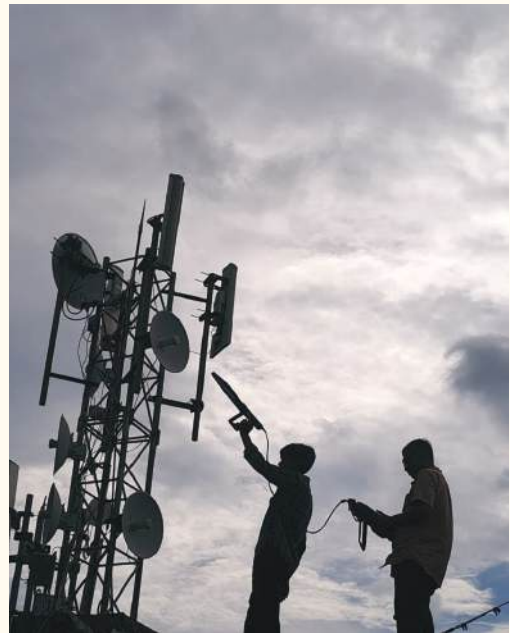














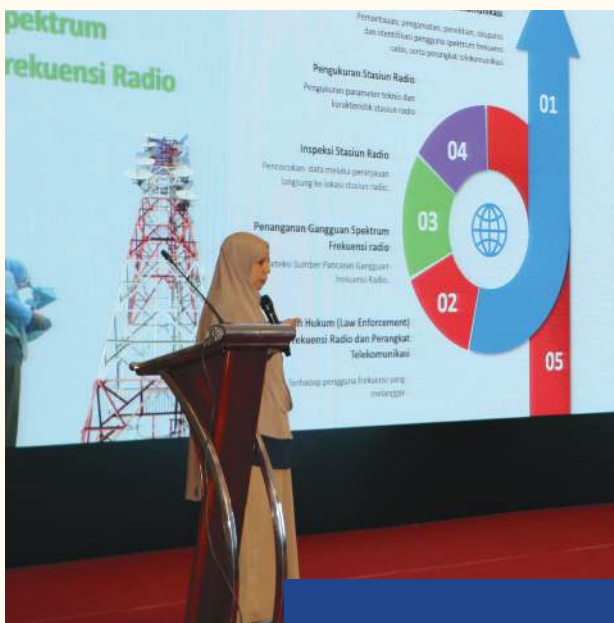
























KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



📍 Jl. Poros Malino Km. 18 Kel. Bontomanai, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

☎ 0811-4112-323

✉ upt_makassar@postel.go.id

📷 [balmon_makassar](#)

📘 [balmon_makassar](#)

🎵 [@balmon.makassar](#)

📺 [BalmonMakassar](#)

